

Pengantar  
Prof.Dr.H.Sirajuddin.M,MH.,M.Ag

Syukur Alhamdulillah segenap puji dan ungkapan rasa syukur yang teramat dalam ingin penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenan dan limpahan karunia-Nyalah pada akhirnya penulis dapat merampungkan buku "*Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*". Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa STAIN/IAIN/UIN dan perguruan tinggi lainnya, yang memiliki *concern* dalam kajian multikultural. Buku ini diharapkan juga dapat memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat mendalami studi multikultural.

LITERASI PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

# LITERASI PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

Tim Penulis

Syahri, Abd Amri Siregar,  
Abdullah Munir, Deni Febrini,  
Aisyahnur Nasution,  
Anang Mustaqim, Hadisanjaya,  
Herawati, Iwan Kurniawan,  
Kurniawan, Marah Halim,  
Mirin Ajib, Murni, Saifudin Zuhri,  
Tison Haryanto, Zannatun,  
Noni Witisma

TOLAK RADIKALISME



Penerbit CV.Zizie Utama

CV. Zizie Utama  
Alamat Redaksi : Jln. DP Negara V  
Perum Tarung Gemilang RT.05 RW.02  
Kel. Sukarini Kec. Selebar  
Kota Bengkulu  
Propinsi Bengkulu  
Telp. 083328178919  
email : info@zizie.co.id  
penerbitzizie@gmail.com

ISBN 978-623-7088-44-6



Penerbit CV.Zizie Utama

*Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*

# **LITERASI PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA**

**TIM PENULIS**

**PENERBIT CV.ZIGIE UTAMA**

# LITERASI PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

## TIM PENULIS

Syahril, Abd.Amri Siregar, Abdullah Munir,  
Deni Febrini, Aisyahnur Nasution, Anang Mustaqim,  
Hadisanjaya, Herawati, Iwan Kurniawan ZP, Kurniawan,  
Marah Halim, Mirin Ajib, Murni, Saifudin Zuhri, Tison  
Haryanto, Zannatun, Noni Witisma

## EDITOR

Prof. Dr. H. Sirajuddin.M.MH.,M.Ag  
Prof.Dr.H.Abudllah Idi, M.Ed

## Layout Buku & Cover

Dodi Isran

**ISBN : 978-623-7558-44-6**

**Hlmn 243+viii, 18x25 cm**

## *Diterbitkan Oleh*

Penerbit CV. Zigie Utama

**Anggota IKAPI Nomor 003/Bengkulu/2019**

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C  
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Propinsi Bengkulu Telp. 085369179919

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak  
buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara  
mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan  
lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis dan Penerbit.  
Isi diluar tanggungjawab Penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2020

**SAMBUTAN REKTOR IAIN BENGKULU**  
**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, keberkahan, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua, rasa syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, agar Allah SWT menurunkan nikmat yang makin banyak kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dalam mengabdikan kepada Allah SWT, bangsa dan Negara, khususnya aparatur sipil Negara kementerian Agama.

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan peningkatan peran dan fungsi segenap pihak yang terkait dengan kegiatan akademik, di antaranya adalah penulisan beberapa karya ilmiah diantaranya adalah karya ilmiah dalam bentuk buku. Alhamdulillah, saya menyambut baik dengan terbitnya Buku *Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*.

Perkembangan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI: UIN, IAIN, STAIN) telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini merupakan proses kerja panjang dan berpeluh keringat dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat baik internal maupun eksternal. Kerja keras dari berbagai pihak melahirkan wajah baru PTKI yaitu kalau dulu hanya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) paling tinggi, namun sekarang banyak PTKI beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Berdasarkan perkembangan yang membanggakan tersebut di atas, maka rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu selalu berinisiatif dan mengajak warga/ masyarakat kampus untuk melakukan upaya dalam

rangka pengembangan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah tersebut seperti membangun tradisi riset atau proyek-proyek ilmiah.

Oleh karena itu, saya sangat bangga dan gembira dengan terbitnya buku ini, yang merupakan hasil proses belajar mengajar pada mata kuliah Studi Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Multikultural di Indonesia, program studi PAI Multikultural, program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Bengkulu. Kebanggaan saya cukup beralasan, karena buku ini berisi kumpulan tulisan yang telah dipresentasikan dan telah diperbaiki berdasarkan masukan dari Dosen pengampu.

Selamat membaca buku ini, semoga bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan proses pembelajaran pada program pascasarjana IAIN Bengkulu khususnya tentang Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia. Sehingga dapat menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Barakallah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bengkulu, 2020  
Rektor IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segenap puji dan ungkapan rasa syukur yang teramat dalam ingin penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenan dan limpahan karunia-Nyalah pada akhirnya penulis dapat merampungkan buku "*Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*". Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa STAIN/IAIN/UIN dan perguruan tinggi lainnya, yang memiliki *concern* dalam kajian multikultural. Buku ini diharapkan juga dapat memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat mendalami studi multikultural.

Hadirnya buku ini merupakan rekaman rangkaian hasil kolaborasi riset antara mahasiswa/mahasiswi dengan dosen pengasuh Program Pascasarjana (Doktor) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kepercayaan, semangat berprestasi, tradisi studi dan riset di kalangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan motto; "Bekerja adalah ibadah, berprestasi adalah dakwah". Kehadiran buku ini diharapkan dapat membuka jalan kajian yang lebih kreatif, inovatif dan lebih maju dalam memajukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan demi kemajuan Pendidikan Keagamaan Islam di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam buku ini masih membutuhkan penyempurnaan di sana sini. Selain karena keterbatasan kemampuan penulis, salah satu hambatan yang juga penulis temukan dalam penulisan buku ini adalah masih sangat terbatasnya karya-karya para ulama berkaitan beberapa materi tertentu dalam buku ini. Secara pribadi penulis

berharap semoga buku ini bisa terus mengalami penyempurnaan di masa-masa yang akan datang, sehingga kajian etika politik dan pemerintahan yang islami dalam bentuknya yang lebih komprehensif bisa dihadirkan. Untuk itu pula, kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan karya ini sangat penulis harapkan.

Akhirul kalam, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan penulisan buku di masa mendatang. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak. Amiin.

Bengkulu, 2020

Tim Penulis,

## DAFTAR ISI

### SAMBUTAN REKTOR IAIN BENGKULU

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

1. PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL Syahril.....	1
2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUMBUH-KEMBANGNYA RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI Abd Amri Siregar.....	11
3. HIZBUT TAHRIR INDONESIA SERTA PERANNYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM; (Sebuah Bentuk Radikalisasi Agama dan Segregasi Pancasila?!) Abdullah Munir .....	25
4. UPAYA PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGKAL RADIKALISME DIKALANGAN MAHASISWA Deni Febrini .....	45
5. KONSEP KHILAFAH DALAM HIZBUD TAHRIR INDONESIA DAN DALAM PETA KONSEP ISLAM Aisyahnur Nasution .....	57
6. ANALISIS TENTANG KELEMAHAN DAN KELEBIHAN KELOMPOK ISLAM JEMAAH TABLIGH Hadisanjaya .....	71
7. UPAYAPONDOKPESANTRENDALAMPENCEGAH ANRADIKALISME AGAMA Anang Mustaqim .....	85
8. KRITIK PHENOMENOLOGIS TEOLOGI KENABIAN AHMADIYAH DAN GERAKANNYA DI INDONESIA Herawati.....	95
9. PROBLEMATIKA PEMAHAMAN ISLAM TANPA SANAD Iwan Kurniawan. ZP .....	109

<b>10. INDIKASI EKS-HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) PADA AKTIVIS KEGIATAN TARBIYAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN)</b>	
Kurniawan .....	115
<b>11. HIZBUL TAHRIR (ORGANISASI SEMPALAN DAN KIPRAHNYA DI INDONESIA)</b>	
Marah Halim .....	125
<b>12. KELOMPOK SEMPALAN DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI SOSIO-HISTORIS)</b>	
Mirin Ajib.....	133
<b>13. UPAYA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENANGKAL RADIKALISME</b>	
Murni.....	147
<b>14. ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR</b>	
Safudin Zuhri .....	173
<b>15. TEOLOGI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)</b>	
Tison Haryanto.....	185
<b>16. PENGUATAN NILAI-NILAI ISLAM MODERAT MELALUI PEMBELAJARAN DEMOKRASI DI MADRASAH</b>	
Zannatun Na'imah .....	203
<b>17. KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR</b>	
Noni Witisma .....	223



## PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL

**Syahril**

Mahasiswa S3 PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: [syahril@iainbengkulu.ac.id](mailto:syahril@iainbengkulu.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pencegahan paham radikalisme di media sosial. Latarbelakang dalam penulisan ini yaitu saat sekarang ini banyak sekali di media sosial terdapat berita-berita tentang paham radikalisme. Pemahaman ini akan berakibat fatal bagi seseorang jika tidak mampu dalam memilah informasi yang hoaks. Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencegahan paham radikalisme di media sosial dapat ditanggulangi dengan berbagai cara antara lain dengan *pertama*, memperdalam pendidikan literasi bermedia sosial agar proses penyebaran informasi yang baik, serta teliti dalam hal-hal yang bersifat tidak benar ataupun hal-hal yang tidak pasti agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial. *Kedua*, pemblokiran situs radikal dengan tetap berdasarkan pada etika publik tentang alasan pemblokiran oleh lembaga yang berwenang. *Ketiga*, meningkatkan komunikasi budaya lokal dalam beragama dengan pembangunan jati diri bangsa untuk memperkuat identitas kebangsaan, pemahaman falsafah budaya kepada seluruh kalangan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia. *Keempat*, kurikulum pendidikan agama lebih diarahkan pada perwujudan nilai-nilai hubungan antar manusia dan menggandengkannya dengan Pancasila. *Kelima*, kesadaran elit untuk beragama dalam berpolitik dan bukan berpolitik dalam beragama. **Kata kunci:** Paham radikalisme, media sosial.

### **PENDAHULUAN**

Pada saat sekarang ini banyak sekali di media sosial informasi mengenai kekerasan atas nama agama semakin banyak dijumpai. Fenomena kekerasan agama dapat dilihat melalui media elektronik maupun media cetak. Berbagai demonstrasi, apakah itu



bermuatan politik, sosial, ekonomi dan budaya mewarnai kehidupan masyarakat. Ada yang dipicu oleh persoalan politik, seperti pilkada, pelaksanaan syariah di dalam bernegara, ada yang difasilitasi oleh persoalan sosial beragama seperti merebaknya interaksi antar umat beragama, pluralisme dan hubungan lintas agama, ada yang disebabkan oleh persoalan ekonomi seperti kapitalisme yang semakin perkasa. Masalah-masalah ini cenderung direspon dengan tindakan kekerasan, yang dalam banyak hal justru kontra- produktif. Salah satu implikasinya adalah kekerasan agama yang dikonstruksi sebagai radikalisme menjadi variabel dominant dalam berbagai tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Secara bahasa, radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Jadi, radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap seseorang yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu dengan cara menghancurkan yang telah ada dan mengganti dengan sesuatu perubahan yang baru, yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Biasanya cara yang digunakan adalah dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara cepat dengan kekerasan dan tindakan-tindakan yang ekstrim atau dengan tindakan-tindakan yang sangat merusak.<sup>1</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini di media sosial banyak informasi dan berita-berita tentang paham radikalisme di media sosial, baik itu dikalangan anak muda, mahasiswa dan masyarakat. Jika permasalahan ini tidak ada penanganan khusus dari pihak yang berwenang maka akan menyebabkan pemahaman yang salah dan mendapatkan berita hoaks yang menyesatkan, merusak tatanan kehidupan masyarakat dan dapat memecah belah umat beragama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apa pengertian

---

<sup>1</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.



radikalisme, penggunaan media sosial pada masyarakat dan bagaimana pencegahan paham radikalisme pada media sosial?

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang pengertian radikalisme, penggunaan media sosial pada masyarakat dan pencegahan paham radikalisme di media sosial.

### **Pengertian Radikalisme**

Radikalisme menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik<sup>3</sup>

### **Penggunaan Media Sosial pada Masyarakat**

Situs jejaring sosial (bahasa Inggris: *Social network sites*) merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini

---

<sup>2</sup> Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad* (Jogyakarta: al-Zikra, 2011), h. 93.

<sup>3</sup> Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, h. 27



menampilkan halaman profil pengguna, yang didalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.<sup>4</sup>

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antar komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh Classmates.com pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah dan SixDegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung.<sup>5</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologipun berkembang pesat. Dengan begitu, banyak pembaharuan-pembaharuan yang muncul dan semakin mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok. Tak hanya itu, ditiap media sosial selalu terdapat pembaharuan sistem seperti Facebook yang awalnya hanya digunakan untuk chatting kini dapat digunakan untuk Live

---

<sup>4</sup> Dirgayuza Setiawan, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula* (Jakarta: Media Kita, 2008), 6.

<sup>5</sup> Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*", *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13(1) (Oktober 2007), article 11.



Streaming. Banyak orang menggunakan media sosial dengan tujuan mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan batinnya. Namun ada juga yang berbagi kisah inspiratif yang memotivasi orang lain. Perkembangan media sosial tentunya di dukung oleh aksesnya yang semakin mudah untuk para penggunanya. Seperti halnya Facebook yang dapat pembaharuan sistem contohnya, akses media sosial yang dapat dijalankan tanpa menggunakan komputer saja namun juga menggunakan Smartphone. Dan lagi dewasa ini, gadget menjadi kebutuhan primer bukan lagi menjadi barang mewah yang merupakan kebutuhan tersier. Hal itu dikarenakan banyaknya tuntutan zaman yang memaksa penggunaan gadget dalam beberapa waktu. Gadget sendiri memiliki fitur-fitur yang menyuguhkan berbagai informasi tentang dunia di dalamnya.

Dalam penggunaan media sosial sebagai warganet diharapkan mampu memilah informasi yang benar dan teruji serta informasi yang belum diketahui asalnya. Sebab dengan adanya media sosial yang semakin bebas, informasi yang masuk cenderung tidak terkontrol dan langsung diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses filterisasi. Dan lagi tanpa mengetahui kebenarannya masyarakat langsung menyebarkan informasi yang di dapat dengan dalih membantu.

Menurut analisis penulis bahwa karakter media sosial yang tanpa batas membuat penyebaran paham radikal semakin sulit dihalau. Media sosial itu bersifat borderless dan luas, partisipatif dengan peserta beragam, bersifat private dalam penggunaan, komunikasi bebas dan cepat dan pesan mudah dibuat. Karakter media sosial itu berseiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Hal itu semakin mempercepat penyebaran paham radikal di media sosial. Percepatan paham radikalisme menyebar juga disebabkan oleh akselerasi pengguna internet yang meningkat dan dominasi situs-situs hoaks dan radikalisme juga masih tinggi.



## Pencegahan paham radikalisme di media sosial

Menurut penulis bahwa dalam pencegahan paham radikalisme di media sosial untuk saat ini dapat ditanggulangi dengan berbagai cara.

### 1. Memperdalam Pendidikan literasi bermedia sosial

Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media menjadi sadar tentang cara media dibuat dan diakses.<sup>6</sup> Dasar dari media literasi adalah kegiatan yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka tahu bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada.

Permasalahan yang ada adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat yang dibuat membingungkan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Oleh karena itu dalam media literasi dapat digunakan oleh individu sebagai anggota dari dalam masyarakat, memilah, menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhan intelektual yang diinginkan. Literasi media terlebih lagi media sosial tidak sekedar belajar cara yang benar mengunakanya tetapi justru seharusnya bagaimana belajar menggunakan media sosial yang ada saat ini untuk proses penyebaran informasi yang baik, serta teliti dalam hal-hal yang bersifat tidak benar ataupun Hal-hal yang tidak pasti agar masyarakat bijak dalam berinternet.

Dalam Islam istilah literasi sama dengan *Tabayyun*, yaitu tuntunan yang dibahas oleh Alquran adalah selektif dalam

---

<sup>6</sup> Menurut Elizabeth Sulzby "1986", <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020



menerima dan menyampaikan informasi, kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, memaksa setiap manusia untuk tabayyun menggunakan media untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas dan selektif serta kritis dalam menerima setiap informasi. Dalam bahasa Alquran, sikap selektif dan kritis tersebut diistilahkan dengan tabayyun. Perintah tabayyun ini semakin penting, ketika fenomena perpecahan umat yang disebabkan prasangka semakin menguat.<sup>7</sup>

2. Kedua, pemblokiran situs radikal dengan tetap berdasarkan pada publik tentang alasan pemblokiran.

Salah satu lembaga yang berwenang dalam pemblokiran situs-situs yang berbau paham radikalisme adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketika situs-situs internet, youtuber dan lainnya terpapar radikalisme menyebabkan rasa cinta tanah air menjadi lemah. Lalu dalam kasus pornografi karena seseorang melakukan hal yang tidak produktif. Oleh karena itu pihak yang berwenang harus mencegah maraknya situs dan akun medsos berkonten radikalisme misalnya dengan pemblokiran situs.

3. Ketiga, meningkatkan komunikasi budaya lokal dalam beragama.

Strategi yang bisa dijalankan adalah pembangunan jati diri bangsa untuk memperkuat identitas kebangsaan, pemahaman falsafah budaya kepada seluruh kalangan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mawardi Siregar, "Tafsir Tematik Tentang Seleksi Informasi", Jurnal At-Tibyan, Vol. 2 No.1 (Juni 2017), 144-145.

<sup>8</sup> A. Safril Mubah, *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi Departemen Hubungan Internasional*, FISIP.



4. Keempat, kurikulum pendidikan agama lebih diarahkan pada perwujudan nilai-nilai hubungan antar manusia dan menggandengkannya dengan Pancasila.

Peran strategis pendidikan agama yang berorientasi pada paham nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai dasar Pancasila menjadi penting untuk dikembangkan dalam pendidikan Agama. Perjumpaan Pancasila dan Agama-agama di Indonesia merupakan tema yang menarik untuk didalami khususnya dalam mengembangkan pendidikan agama yang berwawasan religius-kebangsaan. Mengamalkan Pancasila ternyata bukan hanya sekedar ideologi bangsa, sebagai kohesi sosial bagi masyarakat/bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, tetapi nilai-nilai Pancasila merupakan roh yang sangat aktual, relevan dihayati dalam perjumpaan roh kebangsaan dan keagamaan.

Pendidikan (agama) sudah seharusnya seiring dengan pengembangan nasionalisme kebangsaan agar sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya penguatan pendidikan character Pancasila dalam pendidikan. Maka Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kemenristek Dikti dan Kementerian Agama seharusnya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan penguatan pendidikan karakter Pancasila menjadi salah satu aspek penting yang harus diwujudkan dalam seluruh mata pelajaran di sekolah termasuk dalam pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama yang berjiwa Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dr. Salman Habeahan, Pengawas Pendidikan Agama, Dosen Pendidikan Pada Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta. <https://scholae.co/web/read/1762/pendidikan.agama.dalam.bingkai..nilainilai.pancas>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020



5. Kelima, kesadaran elit untuk beragama dalam berpolitik dan bukan berpolitik dalam beragama.

Agama itu perkara privat. Politik itu urusan publik. Agama tidak boleh memengaruhi politik. Pun, politik tak layak merecoki agama. Keduanya jangan dicampuradukkan. Agama dan politik terpisah. Tidak ada relasi di antara keduanya. Begitu adagium yang berlaku di dunia Barat sekular. Akan tetapi, di dunia Islam, agama memegang peran amat penting, baik dalam kehidupan privat maupun publik. Menarik menjelajahi relasi kesalehan, ketaatan, atau religiusitas yang merupakan wilayah privat dan pilihan politik yang bersifat publik.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan di atas bahwa dalam pencegahan paham radikalisme di media sosial harus diterapkan di keluarga, masyarakat agar bisa mencegah perkembangan radikalisme yang menjadi aksi-aksi teror, bahkan bisa mengurangi radikalisme itu sendiri. Dalam pencegahan paham radikalisme di media sosial dapat ditanggulangi dengan berbagai cara antara lain dengan *pertama*, memperdalam pendidikan literasi bermedia sosial agar proses penyebaran informasi yang baik, serta teliti dalam hal-hal yang bersifat tidak benar ataupun hal-hal yang tidak pasti agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial. *Kedua*, pemblokiran situs radikal dengan tetap berdasarkan pada etika publik tentang alasan pemblokiran oleh lembaga yang berwenang. *Ketiga*, meningkatkan komunikasi budaya lokal dalam beragama dengan pembangunan jati diri bangsa untuk memperkuat identitas kebangsaan, pemahaman falsafah

---

<sup>10</sup> Usman Kansong, <https://mediaindonesia.com/read/detail/173346-religius-dalam-beragamarasional-dalam-berpolitik>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020



budaya kepada seluruh kalangan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia. *Keempat*, kurikulum pendidikan agama lebih diarahkan pada perwujudan nilai-nilai hubungan antar manusia dan menggandengkannya dengan Pancasila. *Kelima*, kesadaran elit untuk beragama dalam berpolitik dan bukan berpolitik dalam beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Safril Mubah, *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi Departemen Hubungan Internasional*, FISIP.
- Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison, "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*", *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13(1) (Oktober 2007), article 11.
- Dirgayuza Setiawan, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula* (Jakarta: Media Kita, 2008)
- Dr. Salman Habeahan, Pengawas Pendidikan Agama, Dosen Pendidikan Pada Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta. <https://scholae.co/web/read/1762/pendidikan.agama.dalam.bingkai.nilainilai.pancas>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020
- Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad* (Jogyakarta: al-Zikra, 2011)
- Mawardi Siregar, "Tafsir Tematik Tentang Seleksi Informasi", *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2 No.1 (Juni 2017)
- Menurut Elizabeth Sulzby "1986", <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020
- Usman Kansong, <https://mediaindonesia.com/read/detail/173346-religius-dalam-beragamarasional-dalam-berpolitik>. dikutip pada tanggal 10 Juni 2020
- Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003)



## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUMBUH-KEMBANGNYA RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI

ABD AMRI SIREGAR

### A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini dihadapkan kepada persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Apabila ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi, pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah *mainstream*, dapat digolongkan sebagai sikap radikal.

Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi tersebut telah menyedot banyak potensi dan energi kemanusiaan serta telah merenggut hak hidup orang banyak termasuk orang yang sama sekali tidak mengerti mengenai permasalahan ini.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Hamli mengatakan ada dua faktor yang membuat radikalisme masuk di lingkungan kampus. Salah satunya karena pemahaman agama yang kurang."Jadi mungkin



yang pertama (alasan radikalisme masuk ke lingkungan kampus) pemahaman anak-anak yang kurang tentang agama," kata Hamli dalam diskusi di Rumah Dinas Menteri Agama Komplek Widya Chandra III No 9 Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018). Faktor kedua, menurutnya, karena mahasiswa kekurangan wawasan kebangsaan. Karenanya, dua hal itu harus didorong untuk menanggulangi radikalisme masuk ke kampus.

Meski berbagai seminar dan dialog telah digelar untuk mengupas persoalan ini yaitu mulai dari pencarian sebab hingga sampai pada penawaran solusi, namun belum juga memperlihatkan adanya suatu titik terang. Makalah ini bermaksud mengeksplorasi masalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana radikalisme bertumbuh-kembang di Perguruan Tinggi dan apa faktor-faktor penyebabnya?

## **C. Radikalisme**

Secara etimologi kata radikal berasal dari bahasa latin radix yang mempunyai makna "akar" dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Kemudian dalam bahasa Inggris kata radical bermakna ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.

Selanjutnya menurut pendapat Irwan Masduqi dalam bukunya "*BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*" bahwa Radikalisme adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, mengabaikan



terhadap kesejahteraan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan maqasid al-syari'at (esensi syariat). Kemudian menurut pendapat Ahmad Rubaidi dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia* bahwa, Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Pada sudut pandang keagamaan, Radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Devinisi lain menurut Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Ratu Adil* merumuskan bahwa, Radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Menurut pendapat Agus Surya Bakti dalam bukunya yang berjudul *Darurat Terorisme : Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi* bahwa, Radikalisme dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, Radikalisme berfungsi sebagai Ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, Radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik dibidang keagamaan, sosial politik dan ekonomi.



Definisi lain juga dijelaskan oleh Zuly Qadir dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Agama di Indonesia* bahwa, radikalisme juga terkadang diartikan sebagai Islamisme. Islamisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi. Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dengan adanya unsur politik.

#### **D. Asal Kemunculan Radikalisme**

Sejarah kemunculan gerakan radikalisme dan kelahiran kelompok fundamentalisme dalam Islam lebih di rujuk karena dua faktor, yaitu:

##### **1. Faktor internal**

Faktor internal adalah adanya legitimasi teks keagamaan. Dalam melakukan “perlawanan” itu sering kali menggunakan legitimasi teks (baik teks keagamaan maupun teks “cultural”) sebagai penopangnya. Untuk kasus gerakan “ekstrimisme Islam” yang merebak hampir di seluruh kawasan Islam (termasuk Indonesia) juga menggunakan teks-teks keislaman (Alquran, hadits dan *classical sources* kitab kuning) sebagai basis legitimasi teologis, karena memang teks tersebut secara tekstual ada yang mendukung terhadap sikap-sikap eksklusivisme dan ekstrimisme ini. Faktor internal lainnya adalah dikarenakan gerakan ini



mengalami frustrasi yang mendalam karena belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya "Negara Islam Internasional" sehingga pelampiasannya dengan cara anarkis; mege bom fasilitas publik dan terorisme. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari beberapa sebab di antaranya :

*Pertama*, dari aspek ekonomi politik, kekuasaan deponstik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental islam. Itu artinya, rezim di negara-negara islam gagal menjalankan nilai-nilai idealistik islam. Rezim-rezim itu bukan menjadi pelayan rakyat, sebaliknya berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan menyengsarakan rakyat. Penjajahan Barat yang serakah, menghancurkan serta sekuler justru datang belakangan, terutama setelah ide kapitalisme global dan neokapitalisme menjadi pemenang. Satu ideologi yang kemudian mencari daerah jajahan untuk dijadikan "pasar baru". Industrialisasi dan ekonomisasi pasar baru yang dijalankan dengan cara-cara berperang inilah yang sekarang hingga melanggengkan kehadiran fundamental islam.

*Kedua*, faktor budaya, faktor ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya



sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi.

*Ketiga*, faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah terorisme ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat Islam.

### **E. Fakta Radikalisme di Perguruan Tinggi**

Pada awal munculnya gerakan atau paham radikal di Perguruan Tinggi, analisis tertuju pada Perguruan Tinggi umum (sekuler). Ada banyak penelitian yang menguatkan kesimpulan itu, misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler (UI, UGM, Unair, dan Unhas). Laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler (UI, UGM, Unair, dan Unhas) itu menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di empat kampus umum sekaligus menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal. Dengan demikian, revivalisme Islam tidak muncul dari kampus-kampus berbasis keagamaan, tetapi dari kampus-kampus sekuler (umum).

Perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi target perekrutan gerakan-gerakan radikal, daripada perguruan tinggi berbasis keagamaan yang dianggap lebih sulit. Dalam pengukuhan guru besarnya, Masdar Hilmy menegaskan gerakan radikalisme lebih sering menyerang mahasiswa di universitas umum dengan jurusan



eksakta (matematika, fisika, kimia, dan biologi).”Mahasiswa eksakta di universitas umum lebih mengandalkan ilmu logika dalam setiap memutuskan segala hal, kalau di UIN yang sudah sering diberi wawasan tentang madzab dalam Islam maka akan lebih bisa mengambil keputusan tentang tawaran bergabung gerakan radikalisme,” katanya.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya ini mencontohkan gerakan radikalisme yang dilakukan kelompok bawah tanah memberikan pesan bahwa kelompok bawah tanah jarang tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Ini menjadi pemicu radikalisme, tidak adanya persamaan persepsi antara kebijakan dengan kelompok atau golongan, adanya dorongan rasa ingin tahu tanpa diimbangi perhatian dari orang tua untuk mahasiswa. ”Gerakan radikalisme yang lebih sering ditujukan pada mahasiswa karena masa itulah sering terjadi pemberontakan dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dan tidak stabilnya emosi mahasiswa serta keluarga yang tidak ada perhatian dan lingkungan yang tidak islami,” ujarnya. (Antara Jatim, 6/4/2016).

Perkembangan terakhir tentang radikalisme, ternyata bukan saja di Perguruan tinggi umum (sekuler), sebagaimana di awal perkembangannya dulu di Indonesia. Ternyata faktanya menunjukkan gerakan radikal pun sudah marak dan subur di kampus-kampus berbasis keagamaan. M Zaki Mubarak menguraikan secara rinci tentang radikalisme di UIN Jakarta. Sejak 2009. Ada tiga mahasiswa (alumni) berinisial AR, SJ, dan FF terlibat dalam kasus rangkaian terorisme Bom Mega Kuningan (bom bunuh diri di JW Merriott dan Ritz Carlton yang sangat menggemparkan dunia), karena terdakwa menyembunyikan dua gembong



teroris Bom Mega Kuningan (Syaifudin Zuhri dan Syahrir). Pada September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim memvonis ketiga tersangka Bom Mega Kuningan dengan 4 tahun 6 bulan penjara yang semula dituntut 7 tahun penjara.

Pada bulan April 2011, peristiwa teror "Bom Buku" terjadi. Dari 17 terduga teroris yang ditangkap diketahui empat (Pepi Fernando, M Fadil, Hendi Suhartono alias Jokaw, dan Muhammad Maulani Sani) di antaranya ternyata merupakan alumni (pernah menempuh kuliah) di UIN Jakarta. Pepi menjadi aktor utama aksi teror bom buku yang dikirimkan kepada Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dhani, Yapto Soerjoseomarno, dan Gorris Mere, bahkan Pepi dan jaringannya tengah mempersiapkan pengeboman sebuah gereja. Menurut Zaki, diduga kuat berkembangnya pemahaman keberagaman radikal di UIN Jakarta ini tidak dapat dipisahkan dengan fakta terjadinya perubahan iklim kehidupan kampus yang lebih terbuka pascareformasi politik 1998. Longgarnya kegiatan kemahasiswaan di kampus telah menjadikan perguruan tinggi (UIN Jakarta), sebagai ajang kontestasi berbagai kelompok dan aliran keagamaan yang semakin beragam.

Fenomena keberagaman radikal yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa, dapat dilihat sebagai efek dari tren yang lebih besar atau nasional (makro). Meskipun UIN Jakarta lama dikenal sebagai kampus Islam yang getol mengampanyekan pemikiran keagamaan modern, bahkan dianggap liberal, nyatanya institusi pendidikan Islam ini tidaklah imun dari gelombang perubahan-perubahan tersebut.



Pergeseran dari perguruan tinggi umum ke keagamaan dapat membuktikan;

*Pertama*, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. *Kedua*, telah terjadi metamorfosis bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal. (Analisis, Volume XI Nomor 1, Juni 2011:28-29).

#### F. Faktor Penyebab Radikalisme di perguruan tinggi

Berdasarkan fakta tumbuh dan berkembangnya radikalisme di Perguruan Tinggi, menyebabkan teori besar selama ini menyatakan bahwa potensi radikalisme kerap kali dimotivasi dan dilatari oleh konteks sosiopolitik gerakan anti-Barat, maka penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendalaman kualitatif mutakhir justru menunjukkan kecenderungan berbeda.

Pertama, potensi radikalisme di kalangan mahasiswa justru timbul karena faktor internalisasi pemahaman keagamaan yang cenderung ideologis dan tertutup dan tidak semata-mata beriringan dengan gerakan radikalisme yang bermotif politik anti Barat; Kedua, potensi radikalisme yang berbasis pada pemahaman ideologis yang cenderung kaku dan hitam-putih itu terjadi di semua agama, baik di lingkungan mahasiswa Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, maupun Buddha. (Harmoni, Vol. 12, Nomor 3, September-Desember 2013:68-69, Asy-Syir'ah, Vol. 49, No. 2, Desember 2015:302-303).

Menarik untuk melihat pendapat Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul *al-Shahwah al-Islamiyah Bayn al-Juhud wa al-Tattarruf* bahwa, setidaknya ada tujuh



faktor yang mempengaruhi kemunculan Radikalisme di Perguruan Tinggi di antaranya adalah:

- a. Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang r tersebut doktriner.
- b. Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja akan tetapi sangat minim pengetahuannya tentang wawasan tentang esensi agama.
- c. Tersibukkan oleh masalah-masalah sekunder seperti menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, memanjangkan jenggot dan meninggikan celana sembari melupakan masalah-masalah primer.
- d. Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat.
- e. Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat dan semangat zaman.
- f. Radikalisme tidak jarang muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk Radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama.

Selain faktor tersebut dapat juga dilihat masifnya perkembangan organisasi mahasiswa yang dikenal dengan organisasi ekstra kampus, seperti KAMMI dan lain-lain. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya pada tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Lahirnya organisasi ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda negara Indonesia. Salah satunya adalah krisis kepercayaan terutama pada sektor kepemimpinan. Kemudian para pimpinan aktivis berinisiatif



untuk membangkitkan kepekaan pemimpin aktivis dan berkumpul di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk mendirikan organisasi KAMMI.

Sebagai sebuah organisasi yang terlahir dari antitesa pengekangan orde baru terhadap kebebasan sosial politik dunia kampus. KAMMI seperti menjadi sebuah pelarian bagi aktifis dakwah kampus yang hanya beraktivitas di dalam masjid. Pasalnya kemunculannya yang tak terduga sebelumnya merupakan sebuah inisiatif yang lahir dari kalangan muslim kampus.

Dalam perkembangannya lebih dari 19 tahun KAMMI lahir di Indonesia mengalami banyak dinamika. Mengingat pada awal berdirinya KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus berlandaskan Islam sebagai organisasinya. Kemudian pada saat ini KAMMI tidak hanya menjadi organisasi ekstra kampus melainkan menjadi OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda).

Selain KAMMI dikenal juga Gema Pembebasan. Sejarah mencatat pergerakan mahasiswa di Indonesia dimulai pada tahun 1908 yang menandai munculnya pergerakan nasional sampai mencapai klimaksnya pada tahun 1998 ketika mahasiswa bersama buruh, tani, rakyat, miskin kota bersatu padu merebut demokrasi menumbangkan pemerintahan yang dianggap diktator, rezim Presiden Soeharto (Orde Baru). Kemudian pada orde baru tidak hanya agenda reformasi yang tidak tercapai, didekade terakhir pasca reformasi, gerakan mahasiswa pun dianggap stagnan dan bahkan mengalami kemunduran.

Pada tanggal 28 Februari 2004 resmi dibentuk sebuah gerakan mahasiswa yang diberi nama Gema Pembebasan. Tujuan berdirinya organisasi ini tak lain untuk menjadikan idiologi Islam sebagai arus utama meskipun hal sedemikian sangat bertentangan



dengan mayoritas umat Islam pada umumnya. Kemudian munculnya Gerakan Mahasiswa Pembebasan di Indonesia tidak terlepas dari peran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Walaupun Hizbut Tahrir menganggap bahwa dirinya adalah partai politik tetapi di Indonesia HTI terdaftar di Depertemen hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ormas Islam.

HTI yang melihat permasalahan mahasiswa dan bangsa Indonesia serta melihat potensi gerakan mahasiswa yang strategis tersebut. Kemudian membuat sebuah divisi khusus untuk mahasiswa, yaitu divisi mahasiswa (Lajnah Mahasiswa) yang disebut dengan "HTI Chapter". Namun dalam implementasinya HTI Chapter mendapatkan kendala dalam melakukan aktivitas perekrutannya di kalangan mahasiswa. Kendala tersebut adalah persepsi mahasiswa pada umumnya menganggap bahwa HTI merupakan kelompok keagamaan yang terdiri atas ulama-ulama dan ustadz yang hanya membahas persoalan-persoalan agama saja. Melihat persoalan tersebut, aktivis HTI yang bersatus mahasiswa di Kota Surabaya kemudian berinisiatif membentuk sebuah organisasi di kalangan mahasiswa untuk membantu HTI dalam melakukan infiltrasi di kalangan mahasiswa tanpa menggunakan nama HTI secara langsung.

Pada awal tumbuh kembangnya orgnisasi ekstra kampus tersebut, dapat dikatakan luput dari perhatian petinggi kampus yang bertugas membina mahasiswa. Fokus pembinaan mahasiswa lebih tertuju kepada organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang internal kampus.

Di sisi lain, kesan religius yang ditampakkan aktifis mahasiswa yang terdidik dari organisasi ekstra kampus tadi, turut membentuk persepsi positif terhadap mereka dari pimpinan kampus.



## G. Kesimpulan

Radikalisme itu adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakini dengansatu tujuan yang dianggap benar tapi dengan menggunakan cara yang salah. Fenomena meningkatnya tindakan radikalisme dikarenakan dangkalnya pemahaman terhadap Agama dan Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan pengimplementasian terhadap nilai-nilai Pancasila dan pembentengan para Mahasiswa dari radikalisme.

Perguruan tinggi sangat rentan menjadi sasaran rekrutmen bagi gerakan-gerakan yang bersifat radikal. Salah satunya adalah Gema Pembebasan, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Target (sasaran) kelompok radikal khususnya adalah semua kelompok, terutama masyarakat perkotaan, profesional, pelajar dan mahasiswa. Radikalisme di kalangan mahasiswa pertama kali muncul Pada tahun 2011. Tempatnya di Malang Jawa Timur, sembilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi korban aksi pencucian otak oleh sebuah aliran sesat.

Kreteria Radikalisme menurut Yusuf al-Qardhawi menemukan relevansinya. Sebab istilah radikal lebih dekat dengan kepada bahaya, kehancuran dan jauh dari rasa aman. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam sejatinya selalu mengingatkan dan sangat menentang perilaku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. 1406 H. *"al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tatarruf"*. Bank al-Taqwa: Cairo

Amrullah, Taufik. 2008. *"KAMMI Menuju Muslim Negarawan, Meretan Kebangkitan Indonesia"*. Muda Cedikia: Bandung



Asrori, Ahmad. *"RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historis dan Antropisitas"*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, volume 2, nomor 2

Hanneman Samuel dan Henk Schulte Nordholt. 2004. *"Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society and Crisis"*. Pustaka Pela: Yogyakarta

Syam, Nur. 2018. *"Islam Nusantara Berkemajuan, Tantangan dan Uapaya Moderasi Agama"*, Fatawa Publising :Semarang



**HIZBUT TAHRIR INDONESIA  
SERTA PERANNYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM;  
(Sebuah Bentuk Radikalisasi Agama dan Segregasi Pancasila?!)**

**ABDULLAH MUNIR**

***Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsepsi ideologi salah satu kelompok aliran transnasional yang berkembang di Indonesia terhadap suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan; (2) mengetahui karakter aliran tersebut dalam merespons pendidikan Islam khususnya di Perguruan Tinggi Umum. Adapun objek penelitian ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tulisan ini menyatakan bahwa HTI bersifat radikal dalam hal ide politiknya. Radikalismenya tergambar dari perjuangan HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui pembongkaran total negara-bangsa sekarang ini dan menggantinya dengan negara Islam baru di bawah satu komando khalifah. Sorotan HTI terhadap pendidikan ditujukan kepada paradigma yang menjadi dasar pelaksanaan proses pendidikan di lembaga-lembaga formal. Paradigma yang dimaksud adalah paradigma pendidikan material-sekuleristik. Paradigma ini dinilai HT telah menimbulkan krisis terbesar dalam dunia pendidikan yaitu, gagalnya pendidikan melahirkan seorang manusia yang betul-betul memiliki kesalehan yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran sistem pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi Umum yang integral dan kepedulian kampus agar disharmonisasi ini bisa diminimalisir.*

***Kata Kunci:** HTI, radikal, Pendidikan Islam, disharmonisasi*

**Pendahuluan**

Salah satu isu menarik dari fenomena keberagaman kontemporer di Indonesia adalah munculnya gerakan Islam global atau yang akhir-akhir ini disebut sebagai “Gerakan Islam Transnasional”. Dari istilah tersebut tersirat bahwa *skope* gerakan ini tidak hanya terbatas pada wilayah nasional atau local seperti halnya organisasi Islam *main stream* seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul



Ulama (NU), namun bentuk utama organisasi dan aktifitasnya melampaui sekat-sekat territorial negara-bangsa (*nation-state*).<sup>1</sup> Gerakan ini antara lain meliputi Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin, Salafi, dan Jemaah Tabligh. Meski mereka dirangkum dalam satu kategori sebagai gerakan Islam Transnasional, masing-masing memiliki orientasi dan agenda perjuangan yang beragam, mulaidari yang konsen dengan aktivitas dakwah sampai yang konsen dengan perjuanganpolitik.

Istilah “Islam transnasional” sedang hangat diperbincangkan, baik di ruang-ruangakademis maupun ruang publik, seiring dengan munculnya wacana *Khilafah Islamiyah* yangdiusung oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Sebagai sebuah gerakan yang bukan“asli” Indonesia, HTI sendiri sebenarnya merupakan representasi dari “Islam transnasional”*par excellence*, mengingat keberadaan organisasi “politik” ini tidak lahir dari pergumulanidentitas keindonesiaan yang otentik, melainkan “dipindahkan”, “dibawa” atau “diimpor”dari negara lain yang cenderung tidak mau meng-“Indonesia.”

Dari sinilah, wacana “Islam transnasional” menggelinding lebih luas, seakan membawa nuansaideologis yang mengancam eksistensi organisasi keagamaan yang lahir dari pergumulanlokalisasi keindonesiaan yang otentik. Selain itu, kelompok ini juga termasuk dalam kelompok sempalan yang berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, pada tulisan ini akan di uraikan tentang akar historis dan proses transmisinya di Indonesia. Spesifiknya, tulisan ini berbicara tentangkonsep ideologi dan peranan pendidikan Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir di Indonesia. Setidaknya tulisan ini bisa memberikan sumbangsih sebagai solusi dalam menyikapi aliran keagamaan yang muncul di Indonesia ini.

## Sejarah dan Ideologi Hizbut Tahrir

Menurut John L. Esposito pada pertengahan abad ke-20, sejarah Islam didominasi oleh dua tema: (1) imperialisme Eropa; dan (2) perjuangan untuk mencari kemerdekaan dari penjajah.<sup>2</sup> Merdekanya negeri-negeri muslim dari dunia Barat pada akhirnya

---

<sup>1</sup>Peter Mandaville, *Global Political Islam*,(London dan New York, 2007), h. 279.

<sup>2</sup>John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*. Penerjemah Alwiyah Abdurrahman dan MISSI (Bandung: Mizan, 1996), h. 59.



melahirkan kecenderungan-kecenderungan ideologis yang dapat digolongkan ke dalam empat jenis. *Pertama*, tradisional Islami, yang diwakili oleh ulama-ulama konservatif dan pembela status quo. *Kedua*, sekuler nasionalis, yang diwakili oleh pegawai-pegawai negeri tingkat tinggi, tokoh-tokoh militer dan kaum minoritas muslim yang telah mengalami westernasi. *Ketiga*, reformis radikal Islam, yang mencerminkan pandangan sementara kelas menengah maupun kelas menengah ke bawah yang sedikit banyaknya juga mengalami modernisasi. *Keempat*, komunis, yang didukung oleh kebanyakan kelas bawah, tetapi pada umumnya kemudian kehilangan daya tarik di dalam masyarakat muslim.<sup>3</sup>

Kecenderungan-kecenderungan ideologis tersebut pada intinya menentang penjajahan yang berlaku atas negara-negara mereka oleh imperialisme Barat. Kecenderungan ideologis tersebut kemudian melahirkan gerakan-gerakan sosial politik yang berjuang menentang penjajahan. Di antara gerakan sosial-politik Islam lahir di awal abad ke-20 adalah Ikhwanul Muslimun pada 1928 yang dipelopori Sayyid Hasan al-Bana di Mesir, kemudian menyusul Jama'at Islami pada 21 Agustus 1941 yang didirikan oleh Sayyid Abul 'Ala al-Maududi. Keduanya lahir dengan motif yang sama yaitu menentang segala bentuk penjajahan dan mengembalikan kehidupan bangsa Arab ke jalan yang Islami.<sup>4</sup>

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1952, Hizbut Tahrir (HT)<sup>5</sup> didirikan di al-Quds (Jerusalem), Palestina. Pendirinya adalah Imam Taqiyuddin an-Nabhani (1908-1977)<sup>6</sup>. HT adalah

---

<sup>3</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1999), h. 137.

<sup>4</sup>Lebih jelas lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at al-Islami (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 86.

<sup>5</sup>Secara etimologis Hizbut Tahrir bermakna partai (حزب) pembebasan (تحرير). Lihat kamus Arab Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet. Keempat, h. 351-353.

<sup>6</sup>Ia seorang pakar hukum Islam dan aktivis politik yang lahir pada tahun 1326 H/1908 M di Palestina. Ia belajar hukum Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, dan setelah itu bekerja sebagai guru di Madrasah, kepala juru tulis, lalu menjadi hakim dipengadilan agama di Palestina dan wafat pada tahun 1397 H/1977 M. Dr. Mani' ibn Hammad al-Juhniy, *al-Mausu'ah al-Muyassaroh fi al-Adyan wa-al-madzahib wa-al-Ahzhab al-Mu'asyarah*, (Dar al-Nadwah al-'Alamiyah: 1420), jilid.1, h. 341.



gerakan sekaligus ‘partai politik Islam’<sup>7</sup> yang bersifat internasional (transnasional). Namun, pusat kegiatan HT dalam perkembangannya bukan lagi di Palestina, melainkan dipindahkan ke Yordania. Sebelum dideklarasikan menjadi partai politik, HT hanya terfokus pada desiminasi gagasan dan rekrutmen anggota. Perubahan status HT menjadi partai politik nampak, ketika an-Nabhani membentuk tim lima. Selain an-Nabhani, tim lima beranggotakan Dawud Hamdan, Munir Syakir, Abdil An-Nablusi dan Ghanim Abduh. Setelah melalui serangkaian diskusi intensif, Tim Lima pada bulan November tahun 1952 mendaftarkan HT sebagai partai politik kepada Kementerian Dalam Negeri Yordania.<sup>8</sup> Namun pemerintah justru melarang kegiatan organisasi ini. An-Nabhani tidak gentar dan tetap melanjutkan misinya menyebarkan risalah HT. Dia sangat menaruh harapan untuk membangkitkan umat Islam pada HT, gerakan yang telah dia dirikan dan tetapkan falsafahnya dengan karakter tertentu yang digali dari nash-nash syara’ dan sirah Nabi Saw. An-Nabhani menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizbut Tahrir, dimana dia sendiri yang menjadi pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Setelah berkembang enam tahun di Jerussalem, HT kemudian mengembangkan sayapnya ke wilayah lain dan dimulai dengan mendirikan cabang di Libanon pada tanggal 19 Oktober 1959.<sup>9</sup>

Sejak berdirinya Hizbut Tahrir, pimpinan dananggotanya telah menghadapi tantangan dan pencekalan, dan ini menyebabkan tersebarnya para hizbiyyin ke beberapa negara. An-Nabhani sendiri mengalami represikeras dari pemerintah Jordan. Ia ditahan dengan tuduhansubversif setelah menyerahkan aplikasi untuk mendaftarkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik. Kondisi ini

---

<sup>7</sup>Istilah ‘partai politik Islam’ lebih dipilih oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menyebut Hizbut Tahrir dikarenakan terinspirasi dari trend partai politik Arab yang muncul tahun 1930-an. Dalam kaitan ini, Suha Taji-Farouki menganggap An-Nabhani sebagai “seorang intelektual Arab yang pertama kali mengangkat gagasan mengenai partai politik modern dengan menggunakan konstruk wacana Islam”. Lihat: Ahmad Syafi’i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2001), h.11.

<sup>8</sup>M. Imaduddin Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 53

<sup>9</sup>Hussein ibn Muhsin ibn ‘Ali Jabir, *Membentuk Jama’atul Muslimin*. Penerjemah Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 244.



menyebabkan ia hidup berpindah-pindah di Jerusalem, Syria, dan Libanon sambil menyebarkan ide-idenya kepada pengikut baru dan membangun cabang-cabang HT. An-Nabhani meninggal dunia di Beirut tahun 1977 dan digantikan oleh Abdul Qadim Zallum, yang kemudian posisinya digantikan oleh Atha' Abu Rashta mulai tahun 2003 sampai sekarang.<sup>10</sup> Seperti pendiri awal HT, banyak pengikutnya mengalami tekanan dari pemerintah di negara-negara Timur Tengah yang membuat banyak dari mereka migrasi ke negara-negara Barat. Sejak tahun 1990-an, HT telah berkembang sangat cepat di Asia Tengah, Afrika Utara, Turki, Eropa dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika Jordan barangkali berperan sebagai basis utama HT, UK dianggap oleh banyak pihak sebagai basis operasi dan funding organisasi tersebut. Organisasi ini sendiri mengklaim telah memiliki cabang di lebih 40 negara, dan ini menjustifikasinya sebagai sebuah gerak global dengan jaringan yang kuat.<sup>11</sup>

Taji-Farouki mengatakan bahwa pembentukan HT nampaknya merupakan respon An-Nabhani terhadap kolonialisme Barat yang mengakibatkan jatuhnya kekhilafan Islam, pendudukan Palestina, serta terpecahnya negara-negara Muslim Arab ke dalam sejumlah negara bangsa. Oleh karena itu, perhatian utamanya adalah menyatukan negara-negara Muslim Arab di bawah satu pemerintahan Khilafah.<sup>12</sup> Dalam beberapa karyanya, An-Nabhani menunjukkan keinginannya untuk membebaskan negara Muslim dari cengkaman imperialisme Barat. Dalam bukunya, *Mafahim Hizb al-Tahrir*, ia misalnya menulis:

ويكافح الاستعمار بجميع أشكاله ومسمياته لتحقيق تحرير الأمة من قيادته الفكرية  
واجتثاث جذوره الثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من تربة البلاد  
الإسلامية، وتغيير المفاهيم المغلوطة التي أشاعها الاستعمار من قصر الإسلام على  
العبادة والأخلاق.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>al-Juhniy, *al-Mausu'ah al-Muyassaroh fi al-Adyan ...*, h. 341.

<sup>11</sup>Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan...*, h.15.

<sup>12</sup>Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan...*, h.11. Lebih lengkapnya lihat Taji-Farouki, "Islamists and Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and al-Muḥajiroun on Israel and Jews", dalam *Middle Eastern Studies*, 36: 4 (Oktober 2000), h. 2.

<sup>13</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), h. 84.



*"...Hizbut Tahrir menentang penjajahan dalam segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari qiyadah fikriyah penjajah, dan mencabut dari akar-akarnya; baik aspek budaya, politik, militer, ekonomi, dan sebagainya, dari tanah negeri kaum Muslim. Hizbut Tahrir berjuang mengubah mafahim (ide-ide) yang telah tercemari oleh penjajah, yang membatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak semata."*

Bagi An-Nabhani, pengangkatan khalifah adalah kewajiban bagi umat Islam. Meskipun bentuk pemerintahan Islam adalah isu yang diperdebatkan di kalangan ulama dan pemikir Muslim, namun An-Nabhani menetapkan pembentukan khilafah sebagai kewajiban agama yang dijustifikasi oleh al-Qur'an, Hadits dan Ijma.<sup>14</sup> Hal ini karena sejumlah kewajiban syariah, seperti penegakan aturan Islam, penerapan hukum pidana Islam, dan penjagaan perbatasan negara, bergantung pada kehadiran seorang khalifah.

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.<sup>15</sup> Partai ini melakukan indoktrinasi terhadap anggotanya; menyebarkan gagasan-gagasannya melalui selebaran, kuliah, dan khutbah, dan aktif berpartisipasi dalam politik nasional dengan ikut serta dalam pemilihan parlemen.

Hizbut Tahrir bersifat radikal dalam hal ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk menempu tujuannya, dengan meniru model dakwah Nabi Muhammad. Radikalismenya tergambar dari perjuangan HT yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui pembongkaran total negara-bangsa sekarang inidan menggantinya dengan negara Islam baru dibawah satukomando khalifah.

---

<sup>14</sup>An-Nabhani, Daulah Islam (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 276

<sup>15</sup>Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 20.



Dalam rangka menegakkan kembali KhilafahIslamiyah, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis,yang apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatandakwah *siyasi*. Sejarah perjuangan Nabi SAW padamasalampau kemudian dijadikan legitimasi bagiperiodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah HizbutTahrir di seluruh dunia. Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai thariqah/ metodedakwah. Pentahapan dakwah *siyasi* tersebut ada tiga langkah, yakni<sup>16</sup>:

**Tabel 1. Pentahapan dakwah Siyasa**

Tahap	Bentuk	Tujuan	Kondisi
1	Pembinaan dan Pengkaderan ( <i>Marhalahat-tatsqif</i> )	Membentuk individu-individu yang meyakini fikrah dan metode hizbut tahrir guna membentuk kerangka gerakan	Ditemukannya benih gerakan dan terbentuknya halaqoh untuk kemudian bergerak kepada masyarakat menawarkan konsep dan metode dakwah HTI secara individual
2	Interaksi dengan Umat ( <i>Marhalahatfa'ulm a'aal-ummah</i> )	Pembentukan kesadaran Ideologi umat dan kepatuhan kepada partai. Umat mulai berusaha menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.	Terjadi pergolakan pemikiran ( <i>al-Shira'ul fikri</i> ) dan perjuangan politik ( <i>al-Kifah assiyasi</i> ) antara umat dengan penjajah dan para penguasa zalim yang menghalangi penerapan ideologi Hizbut Tahrir.
3	Pengambilalihank ekuasaan ( <i>Marhalah istilamil al-hukm</i> )	Partai memegang kendalipemerintahan untuk menerapkan islam secara kaffah dan perkembangan risalah ke seluruh penjuru dunia	Jatuhnya rezim kekuasaan

<sup>16</sup>Ahmad Arifan, "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia", Jurnal Studi Sosial, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, h. 95.



Dengan demikian, bisa dilihat bahwa Hizbut Tahrir menjelaskan model negara Islam yang secara esensial berbeda dari model kenegaraan modern atau sekuler, baik segi asas ataupun aturan maupun pemikiran, pemahaman, dan standar acuan untuk mengatur rakyat. Demikian juga bentuk perundang-undangan yang berlaku. Model Khilafah diyakini sebagai satu-satunya solusi bagi umat Islam. Bahkan mereka membayangkan untuk menyebut bahkan mengkhayal sistem khilafah dapat mengatasi konflik Israel dan Palestina, membungkam arogansi Israel, Amerika dan Paus Roma yang bersikap intoleran.<sup>17</sup> Jelasnya, hanya sistem khilafah yang mampu menyatukan umat Islam sedunia.

### **Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia**

Datangnya HT ke Indonesia, dalam bentuk transmisi ide, pada permulaannya merupakan hasil kontak dengan komunitas HT asal Timur Tengah di Australia pada awal 1980-an. 'Abdurrahman al-Baghdadi dan 'Abdullah ibn Nuh adalah dua tokoh yang punya peranan penting dalam mengembangkan HT di Indonesia pada perkembangannya. Al-Baghdādī adalah seorang aktivis HT asal Libanon yang migrasi ke Australia di awal 1960-an guna menghindari persekusi di negaranya. Tokoh yang kedua, Abdullah bin Nuh, adalah pimpinan pesantren al-Ghazali di Bogor, Jawa Barat. Ia juga merupakan penceramah kondang dan seorang sarjana Muslim dengan keahlian dalam bidang sastra Arab yang mengajar di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (UI). Interaksinya dengan aktivis HT diawali ketika ia mengunjungi anaknya yang sedang menempuh studi di Sydney. Oleh karena Australia merupakan salah satu destinasi dari para migrant HT dari Timur Tengah, Abdullah Nuh dalam kunjungannya sempat bertemu dengan seorang ustadz muda yang karismatik, Al-Baghdadi. Terkesan dengan pengetahuan Islam yang dimiliki oleh al-Baghdadi, maka Abdullah bin Nuh mengajaknya berkunjung ke Bogor guna membantunya mengembangkan pesantrennya. Dari pesantren inilah al-Baghdadi mulai menyebarkan ide-ide HT di Indonesia.<sup>18</sup>

---

4. <sup>17</sup>Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah* (Yogyakarta: LkiS, 2012), h.

<sup>18</sup>Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan...*, h. 19.



Sejak awal perkembangannya, HTI serta gerakan Islam lainnya dibangun lewat LDK. Hal ini mengingat HTI datang di Indonesia bersamaan dengan gerakan lain seperti Gerakan Tarbiyah, Jamaah Tabligh, dan kelompok Salafi. Pada awalnya tidak ada pemisahan antara gerakan-gerakan tersebut dalam LDK; training pengkaderan diadakan bersama-sama dengan subjek dan tutor yang sama. Tetapi, sejak 1988 terjadi perpecahan di antara gerakan tersebut karena tajamnya perbedaan ideologis di antara mereka. HTI menggunakan jaringan LDK sebagai channel rekrutmen. Bahkan, menurut Collins, ide pendirian LDK digagas oleh para pimpinan HTI. Sebuah LDK di IPB Bogor, Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM), menjadi lembaga penting bagi rekrutmen awal dan penyebaran ide-ide HT. Para aktivis BKIM intens menghadiri ceramah publik yang disampaikan oleh Abdullah bin Nuh dan kemudian bergabung di Pondok Pesantren Al-Ghazali untuk belajar dari Abdullah bin Nuh dan al-Baghdadi. Setelah mendominasi LDK di Bogor, aktivis-aktivis HTI kemudian menyebarkan sayap mereka dengan merekrut anggota baru di luar Bogor melalui jaringan LDK, seperti LDK di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, IKIP Malang, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.<sup>19</sup> Setelah pisah dari gerakan Islam lainnya di LDK tahun 1994, HTI kemudian memulai aktivitas dakwahnya ke publik tanpa memakai nama HT, sembari menjaga jaringannya yang terbangun sebelumnya di kampus-kampus. Dalam hal ini, HTI menciptakan "organisasi-organisasi dan aktivitas-aktivitas yang terselubung (*undercover*) seperti seminar, halaqah mingguan, dan penerbitan buku dan pamflet". Namun demikian, semua aktivitas HTI pada periode Orba terbatas kepada taraf diseminasi ide dan rekrutmen, tanpa bergerak lebih jauh ke aksi mobilisasi di jalanan.<sup>20</sup>

Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka jalan bagi relaksasi politik dan demokrasi di Indonesia. Sebuah wilayah publik yang baru menyediakan kesempatan bagi Islam politik untuk berekspresi. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya partai Islam serta munculnya sejumlah kelompok paramiliter Islam dan gerakan Islam radikal. Menurut Bahtiar Effendy, kemunculan gerakan-

---

<sup>19</sup>Lihat Dwi Hardianto, "Hizbut Tahrir Indonesia: Dakwah Masjid yang Menggurita", *Sabili* 9: 11 (2003), h. 142.

<sup>20</sup>Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan...*, h. 21.



gerakan Islam bukanlah respon langsung terhadap demokrasi yang baru di Indonesia tetapi sebagai reaksi terhadap situasi sosial-religius dan politik pada masa transisi, yang bagi gerakan-gerakan ini tidak mencerminkan aspirasi Muslim.<sup>21</sup> Ini mencakup kelemahan negara dalam menyelesaikan konflik sosial-religius, penegakan hukum terhadap perjudian, prostitusi dan pengaturan minuman beralkohol. Semua kelompok tampak menyampaikan aspirasi bagi penerapan syariat Islam sebagai alternatif.

Ketika banyak gerakan Islam muncul di publik pada tahun 1998, HTI barulah muncul pada Mei 2000, ketika menyelenggarakan konferensi internasional tentang khalifah di lapangan tennis indoor, Stadion Senayan Jakarta. Ini adalah aktivitas publik pertama HTI yang diadakan dengan memakai nama Hizbut Tahrir, yang dengan terbuka memperkenalkan ide-ide, program, dan pimpinan HTI. Konferensi ini dihadiri oleh 5000 pendukung HTI dan menarik pemberitaan media secara ekstensif. Isu utama yang didiskusikan adalah mengenai pentingnya mengembalikan khalifah Islam sebagai respon terhadap permasalahan umat Islam. Sejak 2000, perkembangan HTI terlihat menonjol dalam kaitannya dengan keanggotaan, media, dan operasi. Ini berarti bahwa gerakan ini telah bergerak dari tahap pembinaan ke tahap interaksi dengan umat.

Adapun aktivitas HTI di Indonesia yang menonjol hingga saat ini adalah sebagai berikut:

a. Mengorganisir demonstrasi

Eksistensi HTI yang paling menonjol di publik adalah gerakan protesnya di jalanan, dalam bentuk pawai dan demonstrasi. Pada tahun 2002, misalnya, HTI memobilisasi sekitar 12.000 orang melakukan long mars dari Monas menuju Stadion Senayan untuk menuntut penerapan syariat Islam melalui pengembalian Piagam Jakarta ke dalam konstitusi.<sup>22</sup>

b. Menyelenggarakan seminar dan diskusi publik

Aktivitas intelektual HTI menemukan ekspresinya lewat seminar dan publikasi. Ini tentu saja merupakan strategi untuk

---

<sup>21</sup>Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003) h. 217-218.

<sup>22</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia: Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), h. Iv.



menyebarkan ide-ide HTI dan menarik dukungan dari segmen terdidik dari masyarakat Indonesia.

c. Publikasi melalui Media

Penggunaan media dan publikasi adalah sarana intelektual lainnya untuk menyampaikan gagasan HTI ke audiens yang lebih luas di masyarakat. Media HTI terdiri dari pamflet, buletin, majalah, tabloid, booklet, buku, DVD, dan websites.

**NKRI *vis a vis* HTI**

Kampanye HTI tentang penerapan syari'ah Islam dalam bingkai khilafah menjadi tantangan tersendiri bagi negara dan ormas-ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah yang selama ini memandang bahwa dasar negara Pancasila dipandang sebagai bentuk final bagi Indonesia. Tantangan ini menuntut negara dan ormas-ormas Islam lainnya untuk terus menerus mendialogkan masalah terkait dengan cara-cara yang lebih rasional, dan bukan dengan melalui stigmatisasi gerakan yang akan justru berakibat kontra produktif. Negara juga dituntut bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Setiap gerakan keagamaan (*ba'ca*: Islam) akan mengalami proses lahir, berkembang dan klimaks lalu menurun. Pada saatnya, diperlukan usaha revitalisasi gerakan (dakwah) agar tetap mampu menjalankan maksud utamasesuai dengan tujuan gerakan itu sendiri. Kemunculan gerakan-gerakan dakwah akibat kebersinggungan dengan pergerakan di negara-negara lain, sebenarnya dapat dijadikan motivator sebuah gerakan dakwah secara positif dan simultan dengan kelompok/ormas yang telah ada dalam mengembangkan masyarakat Islam serta bergandeng tangan dalam mengemban tugas tersebut.

Gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ingin bermimpi untuk mendirikan Imperium Islam yang pernah ada dengan gambaran kejayaan di Andalusia atau Spanyol selama sekitar 200 tahun dari masa sekitar 640 tahun berkuasa. Masa itu dianggap kejayaan Islam. Namun semenjak kejatuhan Turki Usmani pada awal abad ke-20 oleh Kemal Attaturk, HTI menganggap tidak ada pemerintahan Islam. HTI sebagai cabang dari gerakan Hizbut Tahrir Internasional berhasil menarik perhatian kalangan orang miskin dan negara dunia ketiga - termasuk Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Mesir dan sebagainya. Idiologi HTI adalah ideologi yang tak jelas ujung pangkalnya.



Berbeda dari sejumlah organisasi keagamaan lain yang siap melakukan serangkaian dialog, adaptasi serta asimilasi budaya, HTI ingin mempertegas dimensi ke-salaf-annya (untuk tidak menyebut ke-Arab-annya) di tengah Indonesia yang berbeda. Muhammadiyah atau NU, misalnya, melakukan penyebaran Islam di bumi Nusantara melalui serangkaian dialog, asimilasi, bahkan akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang tidak menekankan pada proses Arabisasi, tetapi Indonesianisasi Islam. Meminjam Bung Hatta, Muhammadiyah dan NU melakukan apa yang disebut sebagai “politik garam,” bukan “politik gincu.” Jika “politik garam” mengasumsikan pelarutan atau persenyawaan antara Islam dengan nilai-nilai lokal Indonesia, maka dalam “politik gincu” yang lebih mengemuka adalah penjagaan identitas keagamaan sesuai dengan warna aslinya.

Dengan demikian, keberadaan HTI berbeda secara diametral dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang merupakan *genre* keislaman “baru” yang muncul sebagai akibat dinamika lokal khas Indonesia. Sekalipun akhir-akhir ini terdapat gejala “transnasionalisasi” NU dan Muhammadiyah dengan munculnya berbagai cabang kedua organisasi tersebut di sejumlah negara, identitas keduanya secara substansial berbeda dari HTI. Terlebih jika dikaitkan dengan dimensi *core content* kedua organisasi ini yang lebih mengaksentuasi “Islam versi Indonesia,” ideologi transnasionalisme HTI lebih merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, di mana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia dibawah otoritas tunggal *Khilafah islamiyah*.

*Khilafah* sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidan. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.

Doktrin *Khilafah islamiyah* diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi



konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia. Tidak ayal, sinyalemen “menantang” dari kelompok HTI inisempat membuat elit sejumlah organisasi sosial-keagamaan, terutama NU, menjadi gerahdengan menuduhnya sebagai organisasi makar yang hidup dengan mendompleng demokrasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewedahi segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.

Menanggapi hal ini, Ibn Taymiyah menyebutkan dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*:

"أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا"

"*Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara*"<sup>23</sup>

HTI yang lahir di Palestina, dan bukan hanya gagal mendirikan khilafah islamiah, tetapi juga gagal membebaskan Palestina dari jajahan asing, justru dibawa ke Indonesia. Andaikata hanya ide-ide dasarnya yang dibawa dan disalurkan secara elegan barangkali bisa dimaklumi. Sebaliknya, mereka malah merasa memilikinegara ini, dan orang lain yang tidak mendukung cita-citanya dinilai sebagai kapitalis dan sekularis yang harus disingkirkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mereka hendak mengganti negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila ini dengan khilafah Islamiah yang berdasar Islam ala Taqiyuddin al-Nabhani. Apakah ini bukan suatu bentuk kolonialisasi?

---

<sup>23</sup>Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa-al-Ra'iyah* (Saudi: Wizarah al-Syu'un, 1418), h. 129



Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan. Yang salah bukan Pancasila, tapi sistem pemerintahan dan mental aparat dan pejabatnya. Dengan mental aparat dan pejabat seperti saat ini, dasar negara Islam atau bahkan khilafah Islamiyah pun tidak akan banyak membantu.

### **HTI dan Pendidikan Islam**

Sebagaimana yang telah di singgung di awal, bahwa perjalanan menyebar dan perekrutan HTI terjadi di kampus-kampus Indonesia melalui lembaga dakwah kampus. Kampus yang di tuju adalah kampus-kampus umum. Sengaja mereka bergerak di kampus-kampus umum yang tidak memahami Islam dengan mendalam, karena pada umumnya, mereka yang biasa berfikir matematis dan eksak mudah didoktrin ajaran Islam yang bersifat eksklusif. Sasaran itu diambil, karena para petingginya merasa dan meyakini betul bahwa HTI tidak laku dijual di lembaga pendidikan keagamaan yang memahami Islam secara mendalam, seperti STAIN, IAIN, UIN, apalagi di pondok pesantren.

Beragam alasan melatarbelakangi keterlibatan anggota HTI menjadi aktivis. Umumnya mereka tertarik pada HTI karena HTI memberikan pencerahan berupa paradigma berpikir yang jelas bersifat solutif bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Tawaran HTI berupa syaria'ah Islam dan khilafah menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa pemuda HTI.

Sebagai mana lazim dalam sebuah gerakan, jaringan formal dan informal berperan sangat penting dalam rekrutmen anggota. Jaringan formal adalah jaringan yang dikembangkan oleh sebuah organisasi secara kelembagaan, sedangkan jaringan informal adalah jaringan yang dikembangkan oleh individu anggota organisasi yang dijalankan secara personal. Termasuk dalam jaringan informal adalah persahabatan dan jalinan keluarga. Model terakhir ini terbukti sangat ampuh dalam rekrutmen anggota organisasi, terutama organisasi bawah tanah (*clandestine*).<sup>24</sup>

Dalam kaitan ini, LDK dengan segala variannya mempunyai andil yang signifikan dalam rekrutmen kader-kader HTI.

---

<sup>24</sup>Din Wahid, "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Surabaya Jawa Timur", *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011), h.129.



Jaringan kelembagaan dan hubungan personal terlihat bekerja dalam rekrutmen kader-kader baru HTI. Pola pembinaan yang terus menerus dan konsisten dengan ide-ide yang jelas dan tegas telah berhasil menelorkan kader-kader yang cukup militan. Militansi kader-kader HTI terlihat tidak saja ketika mereka berusaha menarik kawan-kawannya ke dalam barisan mereka, tetapi juga keuletan mereka dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan apa yang mereka yakini: penerapan syari'ah Islam secara kaffah, dan pembentukan kembali khilafah Islamiyyah yang dibubarkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Attaturk.

HT berpandangan, bidang pendidikan perlu dijadikan sebagai salah satu sasaran penerapan syari'at Islam karena sebagai institusi yang berhubungan dengan hajat orang banyak, justru mengidap banyak kelemahan. Sorotan HT terhadap pendidikan ditujukan kepada paradigma yang menjadididasar pelaksanaan proses pendidikan dilembaga-lembaga formal. Kelemahan dan krisis yang terjadi dalam dunia pendidikan dalam pandangan HT bersumber pada paradigma yang digunakan. Paradigma yang dimaksud oleh HT adalah paradigma pendidikan material-sekuleristik. Paradigma ini dinilai HT telah menimbulkan krisis terbesar dalam dunia pendidikan yaitu, gagal nya pendidikan melahirkan seorang manusia yang betul-betul memiliki kesaleh yang tinggi.

Kelemahan pada tataran paradigma melahirkan manusia yang jauh dari visi dan misi penciptaannya, menurut HT, semakin diperparah lagi oleh kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksanaan pendidikan, yaitu: (1) kelemahan pada lembaga pendidikan yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta tidak berfungsinya gurud dan lingkungan pendidikan sesuai dengan kehendak Islam; (2) faktor keluarga yang tidak mendukung, dan; (3) faktor masyarakat yang tidak kondusif.

Selama ini masih ditemui di beberapa kampus PTU kurang berfungsinya mata kuliah PAI sebagai pembentuk kepribadian mahasiswa. Artinya mata kuliah PAI hanya berfungsi sebagai mata kuliah pengetahuan semata, yang sekedar cukup diketahui saja sebagai pengetahuan tambahan. Akibatnya fungsi sesungguhnya dari mata kuliah PAI diambil alih dan dikelola oleh lembaga keagamaan Islam di kampus atau di luar kampus. Baik berbentuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, kegiatan kajian di Masjid kampus maupun luar kampus, dan kegiatan keagamaan yang dikelola secara



dinamis oleh organisasi tertentu dalam bentuk serta wadah lain yang mengemas PAI menyatu dengan kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Analisis HT terhadap permasalahan pendidikan yang tidak saja menyentuh aspek paradigma, tetapi juga aspek fungsionalnya, memberikan suatu gambaran bahwa HT memahami pendidikan sebagai proses dialektika antara sekolah (lembaga pendidikan formal), masyarakat, dan keluarga. HT menempatkan strategi sebagai suatu tata cara dalam pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian Islam. Strategi yang ditempuh HT untuk mengembangkan kepribadian Islam terdiri dari tiga langkah, yaitu: pertama, menanamkan aqidah Islam dengan metode pembuktian sesuai dengan kemampuan akal (metode aqliyah). Bukan dengan dogma atau metode-metode lain, termasuk bukan dengan metode ilmiah. Kedua, memotivasi untuk senantiasa konsisten dengan pola fikir dan pola jiwa Islam. Ketiga, mengembangkan kepribadian dengan cara mengajarkan tsaqafah Islam, memotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam mengisi pemikiran dengan tsaqafah Islam dan beraktivitas dengan orientasi untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah.

Slogan-slogan yang dikumandangkan HTI menjadi slogan-slogan pula para mahasiswa di berbagai kampus PTU. Slogan-slogan yang paling populer dan mendapat dukungan kuat dari para mahasiswa aktivis Islam antara lain:

- Kita harus memperjuangkan kembali model pemerintahan yang dipraktekkan oleh Nabi dan Khulafaur-Rasyidin
- Kita harus memperjuangkan tegaknya kembali kekhalifahan Islam
- Khilafah Islam sebagai sebuah solusi
- Setiap paham yang tidak bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sesat dan kafir
- Hukum pidana dan perdata kita tergolong hukum *thoghut* karena tidak bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Jika komitmen dengan Islam, seharusnya hukum cambuk bagi pezina dan rajam bagi pezina mukhsan masuk dalam hukum pidana Indonesia

---

<sup>25</sup>A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 12.



Data tersebut merupakan hasil responden yang dilakukan oleh Munawar Rahmat<sup>26</sup> dalam mengamati corak berpikir keagamaan mahasiswa di UPI. Penelitiannya menemukan bahwa mahasiswa aktivis Islam cenderung memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif.

Jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi umum (PTU) adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta toleran dalam wadah NKRI. Corak berpikir keagamaan yang dikehendaki oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam adalah corak berpikir keagamaan yang inklusif, bukan yang eksklusif, bukan yang liberal, dan bukan pula yang tidak jelas corak berpikir keagamaannya.

Afiliasi organisasi keagamaan yang dijadikan rujukan bagi mahasiswa biasanya diperoleh dari orang tua dan ulama yang menjadi otoritas penentu hidupnya. Atau bisa jadi dari organisasi maupun kegiatan kepemudaan yang ia ikuti sebelum mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Kenyataan yang sangat sulit sekali untuk dirubah apalagi jika fanatisme tersebut sudah melekat. Bahkan sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi bisa berubah menjadi fanatisme yang tercela, yaitu menganggap dirinya yang paling benar dan yang lain sebagai yang salah.<sup>27</sup>

Perbedaan bisa menjadi ajang untuk bersaing dalam kebaikan, bukan bersaing untuk saling klaim mana yang benar dan mana yang salah. Ataupun persaingan untuk saling menyebarkan api permusuhan serta pendoktrian untuk menjauhi kelompok mahasiswa Islam tertentu. Persaingan yang diharapkan adalah misalnya organisasi atau kelompok mahasiswa Islam saling berkompetisi meraih prestasi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut juga bisa menjadi ajang untuk memberikan warna bagi kampus sehingga gesekan dan dinamisasi bisa berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran sistem pembelajaran PAI yang integral dan kepedulian kampus agar disharmonisasi ini bisa diminimalisir.

Dengan demikian, kedepannya diharapkan tidak ada mahasiswa Islam yang berpola pikir eksklusif menganggap dirinya

---

<sup>26</sup>Munawar Rahmat, "Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 10, No. 1, 2012.

<sup>27</sup>Yusuf al Qardhawi, "Islam Radikal (Analisi terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)," dalam *Ash-Shahwah al-Islamiyah bain al-Juhud wa At-Tatharuf*, ed. Hawin Murtadho (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 41.



paling benar dan unggul. Serta tidak ada mahasiswa Islam yang melakukan syiar Islam tanpa memasukkan semangat dan cinta pada pembangunan peradaban. Tidak ada lagi mahasiswa Islam yang radikal secara buta tanpa pendalaman teks dengan konteks masyarakat secara bersamaan. Maupun yang fanatik pada sesuatu, waktu, serta tempat yang salah.

### **Kesimpulan**

Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.

Jika HT dan HTI bermimpi mendirikan Imperium Islam itu sah-saja. Namun, di balik itu yang justru membahayakan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh HTI cenderung menciptakan radikalisasi agama dan keyakinan yang menciptakan segregasi dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Selain itu, hasil dari temuan di atas tadi menunjukkan bahwa salah satu komponen dari sistem pembelajaran Pendidikan Agama termasuk Pembelajaran PAI di PTU belum berjalan secara integral.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, A. Rifqi. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Al-Amin, Ainur Rafiq. *Membongkar Proyek Khilafah*. Yogyakarta: LkiS. 2012
- Arifan, Ahmad. "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 2, Nopember 2014.,
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003
- Esposito, John L. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*. Penerjemah Alwiyah Abdurrahman dan MISSI. Bandung: Mizan. 1996
- Hardianto, Dwi. "Hizbut Tahrir Indonesia: Dakwah Masjid yang Menggurita", *Sabili* 9: 11. 2003



- Ibn Taymiyah, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa-al-Rā'iyah*. Saudi: Wizārah al-Syu'ūn. 1418
- Jabir, Hussein ibn Muhsin ibn 'Ali. *Membentuk Jama'atul Muslimin*. Penerjemah Abu Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Al-Juhnīy, M. Dr. Mānī' ibn Ḥammād. *al-Mausū'ah al-Muyassaroh fī al-Adyān wa-al-madzāhib wa-al-Aḥzāb al-Mu'āṣarah*. Dār al-Nadwah al-'Ālamīyah: 1420
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at al-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina. 1999
- Mandaville, Peter. *Global Political Islam*. London dan New York. 2007
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2001
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- An-Nabhānī, Daulah Islam. Jakarta: HTI Press, 2007
- An-Nabhānī, Taqiyuddīn. *Mafāhim Ḥizb al-Tahrīr*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007
- al Qardhawi, Yusuf. "Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)," dalam *Ash-Shahwah al-Islamiyah bain al-Juhud wa At-Tatharuf*, ed. Hawin Murtadho. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Rahmat, M. Imaduddin. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2005
- Rahmat, Munawar. "Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 10, No. 1, 2012.
- Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan. 1999
- Tahrir, Hizbut. *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia: Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004
- Taji-Farouki, "Islamists and Threat of Jihad: Ḥizb al-Tahrīr and al-Muḥajiroun on Israel and Jews", dalam *Middle Eastern Studies*, 36: 4. Oktober 2000
- Wahid, Din. "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Surabaya Jawa Timur", *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011

*Hizbut Tahrir Indonesia  
Serta Perannya dalam Pendidikan Islam;  
(Sebuah Bentuk Radikalisasi Agama dan Segregasi Pancasila?!)*

**Abdullah Munir**





## **UPAYA PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGKAL RADIKALISME DIKALANGAN MAHASISWA**

(Upaya Perguruan Tinggi dalam rangka Penguatan Wawasan  
Moderasi Beragama Dan Nasionalisme/Kebangsaan?)

**DENI FEBRINI**

### **Pendahuluan**

Salah satu tantangan perguruan tinggi Islam ditengah derasnya arus globalisasi saat ini adalah membentuk sumber daya insani yang tidak hanya unggul secara teoritik-akademik namun ia juga menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas..Menumbuhkan wawasan kebangsaan dengan tetap menjunjung tinggi 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi sangat penting untuk menangkal masuknya paham radikalisme yang bisa memecah belah bangsa.

Manusia PTU (mahasiswa) menghadapi keterbauran dan kehampaan nilai sehingga sulit untuk mementukan benar dan salah. Mereka merasa masih memiliki nilai-nilai tersebut yang bersifat luhur dan suci, tetapi dalam kehidupan nyata mereka dipaksa untuk melandaskan kehidupannya dengan menerapkan nilai-nilai pragmatis yang bersifat material dan sekuler. Mereka memandang kewajiban pelaksanaan nilai keyakinan dan ibadah (agama) sebagai masalah pribadi dan individual sehingga ketika memasuki lapisan teknostruktur digunakan nilai dan norma lain yang berbeda dengan keyakinannya. Acapkali bertentangan dan membingungkan. Manusia mulai kehilangan kepribadian yang berdasarkan keyakinan agamanya dan teralienasi terhadap norma agamanya. Manusia memiliki kepribadian yang lain (ganda), yang dibangun berdasarkan pandangan hidup pragmatis dan sekularis. Mahasiswa sedang mengalami *disturbance of self image* (keguncangan citra diri) dan *split personality* (kepribadian yang pecah).

Sebagian besar mahasiswa, dapat dipastikan, mengikuti *mainstream* keagamaan masyarakat Muslim Mayoritas kelompok besar ini, juga dapat dipastikan, memahami dan melaksanakan agama secara "tradisional" dan "konvensional". Sebagian mereka bahkan



tidak terlalu peduli dengan atau concern terhadap agama. Mereka yang peduli, seperti dapat disaksikan, melaksanakan ajaran-ajaran agama selayaknya dan seadanya, sebagaimana mereka terima dari orang tua dan lingkungan sosialisasi keagamaan yang biasa. Mereka ini dapat disebut sebagai „common’ Muslim, yaitu Muslim yang melaksanakan ajaran agama, tetapi tidak terlalu bersemangat.

Kelompok kedua adalah mahasiswa yang merasa perlu mengembangkan diri, dalam konteks keagamaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Islam, dan dalam konteks akademis, untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan keterampilan ilmiah. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan ini memilih untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa Islam, seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dorongan untuk memasuki organisasi mahasiswa Islam itu, menjadi lebih kuat, ketika mahasiswa menyatakan bahwa terdapat cukup banyak anggota atau mantan anggota mereka yang kemudian menonjol dan cukup terkemuka, baik dalam lingkungan kampus maupun setelah mereka keluar atau tamat dari perguruan tinggi. Dengan demikian, organisasi mahasiswa Islam tersebut “menjanjikan” tidak hanya peningkatan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, tetapi juga mobilitas akademis dan mobilitas sosial politik kelak. Namun demikian, organisasi-organisasi mahasiswa Islam ini setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir mengalami kemerosotan, khususnya dalam keanggotaan. Kemerosotan itu tidak hanya disebabkan perubahan politik pada tingkat nasional terhadap kehidupan mahasiswa – seperti Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang merupakan “depolitisasi” mahasiswa – menjelang akhir 1980; tetapi juga karena perubahan dalam sistem pendidikan tinggi sendiri, seperti: pengenalan Sistem Kredit Semester, yang menggiring mahasiswa untuk lebih berkonsentrasi pada perkuliahan dan tugas-tugas akademis lainnya, ketimbang keterlibatan dalam organisasi mahasiswa (Islam) yang cenderung menghabiskan banyak waktu (time consuming).

Pembinaan keagamaan di Perguruan Tinggi sebenarnya dilakukan melalui berbagai jalur, baik jalur akademik kurikuler maupun ekstra kurikuler. Pada jalur kurikuler proses pembinaan keagamaan dimasukan kepada mata kuliah di berbagai fakultas di



lingkungan Perguruan Tinggi, sedangkan pada jalur ekstra kulikuler Perguruan Tinggi melaksanakan program pembinaan khusus dan bertahap. Namun tetap berkaitan erat dengan proses pembelajaran.

Dalam rangka menangkal radikalisme di dalam kampus, Menteri Nasir menegaskan, Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nantinya akan mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan di dalam kampus yang berbasis pada Pancasila dengan menjaga 4 (empat) pilar kebangsaan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, nama MPK berubah lagi menjadi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Perubahan nama ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan peran MKWU sebagai kelompok mata kuliah yang menjadi roh dan memberikan landasan bagi pengembangan kepribadian mahasiswa dan pengembangan bidang ilmu masing-masing.

Sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Dari Latar belakang diatas, Permasalahan yang diangkat pada makalah ini adalah Bagaimana Upaya Perguruan Tinggi dalam rangka Penguatan Wawasan Moderasi Beragama Dan Nasionalisme/Kebangsaan?

## **PEMBAHASAN**

### **Program Penguatan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi**

Karakter adalah perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik dalam keseharian yang meliputi watak terpuji, akhlak mulia, sikap mental dan budi pekerti yang luhur. Adapun



nilai-nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK adalah: **religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas**. Nilai-nilai utama tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 3 pilar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), kekayaan budaya bangsa (kearifan lokal) dan kekuatan moralitas yang dibutuhkan bangsa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Uraian dari 5 nilai utama tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Religiositas**

Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

Subnilai religius antara lain beriman dan bertaqwa, disiplin ibadah, cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih, mencintai dan menjaga lingkungan, bersih, memanfaatkan lingkungan dengan bijak.

### **2. Nasionalisme**

Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

3. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, semangat kebangsaan, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghargai kebhinnekaan, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.



#### **4. Kemandirian**

Merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

#### **5. Gotong Royong**

Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

#### **6. Integritas**

Merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Dasar hukum kegiatan PPK adalah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."



2. Agenda Nawacita No. 8: Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental.
3. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan.
4. RPJMN 2015-2019: "Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran".
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan PPK adalah

1. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
2. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia;
3. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK

### **Bentuk Kegiatan Penguatan Pendidikan karakter di perguruan Tinggi**

Salah satu tantangan perguruan tinggi Islam ditengah derasnya arus globalisasi saat ini adalah membentuk sumber daya insani yang tidak hanya unggul secara teoritik-akademik namun ia juga menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Untuk itu, Perguruan sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan ajaran-ajaran agama, tentu menyadari betapa pentingnya Islam untuk



dijadikan basis dalam membangun integritas dan moralitas peserta didiknya. Dalam rangka mendukung dan merealisasikan arah tujuan tercantum dalam statute perguruan tinggi diperlukan langkah-langkah yang cerdas dan efektif, serta dukungan dari semua pihak, sehingga harapan-harapan dapat tercapai dengan baik. Dalam kaitan ini, untuk melahirkan profil-profil generasi terdidik yang menjadi harapan semua pihak, Perguruan Tinggi sebagai pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) berupaya merealisasikan suatu program pembinaan keagamaan secara khusus dan bertahap. Pembinaan keagamaan di Perguruan Tinggi sebenarnya dilakukan melalui berbagai jalur, baik jalur akademik kulikuler maupun ekstra kulikuler. Pada jalur kulikuler proses pembinaan keagamaan dimasukkan kepada mata kuliah di berbagai fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi, sedangkan pada jalur ekstra kulikuler Perguruan Tinggi melaksanakan program pembinaan khusus namun tetap berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Misalnya:

1. Orientasi Nilai-nilai Dasar Islam (ONDI)

ONDI merupakan kegiatan yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia melalui Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) sebagai program pembinaan keagamaan awal bagi mahasiswa. Kegiatan ONDI adalah salah satu program pengenalan kampus yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai dasar Islam, yang terangkum dalam materi tauhid, ibadah, dan akhlak. Pelaksanaan program ini merujuk kepada acuan yang telah ditetapkan dalam pola pengembangan mahasiswa (polbangmawa) yang telah menjadi keputusan rektor Universitas. Secara historis, program ini lahir sebagai pengganti dari P4 pada masa orde baru. Selain itu, pembinaan keagamaan ONDI juga merupakan entry poin (bekal awal) untuk memasuki pendidikan selanjutnya di kampus. Untuk itu, program ini merupakan kegiatan ekstra kulikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. sebab tes tersebut merupakan syarat memasuki pembinaan keagamaan selanjutnya, yaitu pembinaan agama tahap I –sekarang dengan nama Pesantrenisasi-dan LKID. Berkenaan dengan pelaksanaannya, secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan oleh DPPAI dan kerjasama berbagai pihak, baik itu pihak rektorat maupun fakultas yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi. Sebagai suatu kegiatan yang



terprogram ONDI memiliki beberapa tujuan yang dapat dicapai, diantaranya meliputi tujuan umum dan khusus.

- a. Tujuan Umum
  1. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran beragama sebagai warga maupun sebagai warga negara Indonesia.
  2. Mahasiswa mampu menciptakan suasana kampus yang islami dan mengemban fungsi catur dharma UII sebagai lingkungan Ilmiah yang berbasis pada nilai-nilai Islam.
- b. Tujuan Khusus
  1. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan nilai dasar ketauhidan
  2. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan nilai dasar ibadah dengan baik sesuai tuntunan agama Islam.
  3. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan nilai akhlak al-karimah sesuai tuntunan Rasulullah saw.
  4. Mahasiswa memiliki pemahaman pengetahuan Islam Moderat, Islam KeIndonesiaan dan Moderasi beragama
  5. Memperkuat konten Perkuliahan PAI secara kontekstual dalam proses Perkuliahan

Mengingat bahwa implementasi suatu program pembinaan dapat dikatakan berhasil bila telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka hal yang patut disadari bersama bahwa untuk mencapai itu semua tidaklah mudah, perlu etos kerja yang baik dan konsistensi dari berbagai pihak, khususnya pihak penyelenggara. Selain itu, api semangat mahasiswa dalam memahami dan memperdalam wawasan keagamaan harus terus dikobarkan, sebagai bagian dari proses pembentukan mentalitas kuat yang diilhami dari pemahaman ajaran Islam yang utuh.

## 2. *Placemant Test Agama*

*Placement test* Agama merupakan tes pengelompokan bagi mahasiswa dalam memasuki pesantrenisasi (Pembinaan Keagamaan). Kegiatan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui wawasan atau kemampuan keagamaan mahasiswa, sehingga nantinya dapat dikelompokkan sesuai tingkat keagamaan yang mereka miliki. Hasil *placement test* ini dikategorikan kedalam tiga tingkatan, yaitu tingkatan lanjut, menengah, dan dasar.

Latar belakang dari dibentuknya program ini adalah sebagai langkah awal untuk memudahkan proses pembinaan selanjutnya, yaitu pembinaan agama tahap I. Hal ini mengingat latar belakang



mahasiswa yang beragam, sehingga wawasan keagamaanyapun menjadi bermacam-macam. Adapun materi yang diujikan kepada mahasiswa dalam *placement test* terdiri dari dua kelompok, yaitu baca-tulis Al-Qur'an dan pratik ibadah. Praktik ibadah terdiri dari taharah, shalat fardhu dan beberapa shalat sunat serta do'a, sedangkan baca-tulis Al-Qur'an yaitu membaca ayat Al-Qur'an yang telah ditunjuk oleh penguji, hafalan beberapa surat pendek, dan menulis beberapa kata atau kalimat arab.

### 3. *Pesantrenisasi*

Sebagaimana pembinaan sebelumnya, bahwa kegiatan pesantrenisasi juga merupakan program pembinaan Perguruan Tinggi yang bersifat wajib, sebab ini merupakan syarat untuk mengikuti program pembinaan keagamaan mahasiswa berikutnya. Pembinaan agama dengan model pesantrenisasi adalah kegiatan tindak lanjut dari program pembinaan ONDI. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara bergantian sesuai kelompok dan jenjang yang telah ditentukan pada kegiatan ONDI dan *placement test* yang telah diadakan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut dari program pembinaan sebelumnya, model pembinaan dalam bentuk pesantrenisasi ini, sebenarnya merupakan upaya Perguruan Tinggi dalam meningkatkan efektifitas pembinaan keagamaan yang dalam penyelenggaraannya lebih bersifat bimbingan dan pendampingan secara baik dan terprogram.

Pelaksanaan kegiatan pesantrenisasi diselenggarakan baik tempat dan waktunya tergantung dengan perguruan tinggi masing-masing. Kendatipun demikian, waktu yang digunakan dalam proses pembinaan tidak *full day*, namun dimulai dari sore hingga pagi hari. Hal ini dilakukan agar proses pembinaan tidak mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan. (dok. UII)

Sebagai Pembanding, IAIN Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pesantrenisasi bagi 206 mahasiswa semester I IAIN Bengkulu pada tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan pesantrenisasi diselenggarakan di tiga Pondok Pesantren yang ada di Kota Bengkulu (Pesantren Hidayatul Qomariah, Pesantren Darussalam dan Pesantren Pancasila) selama satu bulan *full day*. Mahasiswa diserahkan secara Penuh kepada Pondok Pesantren yang ditunjuk. Dalam bentuk Program Pendalaman Islam



Berwawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dengan materi Islam Moderat dan Moderasi keberagamaan, Islam Keindonesiaan/Kebangsaan, Tahfizul Qur'an, Mengaji dan Praktek Ibadah.

Adapun muatan kurikulum yang diterapkan, secara garis besar merupakan kelanjutan dari Salah satu tantangan perguruan tinggi Islam ditengah derasnya arus globalisasi saat ini adalah membentuk sumber daya insani yang tidak hanya unggul secara teoritik-akademik namun ia juga menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Untuk itu, Universitas Islam Indonesia (UII), sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan ajaran-ajaran agama, tentu menyadari betapa pentingnya Islam untuk dijadikan basis dalam membangun integritas dan moralitas peserta didiknya.

## KESIMPULAN

Dari kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sangat diperlukan bagi mahasiswa agar mahasiswa mampu menangkal paham radikalisme. Pendidikan Karakter adalah perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik dalam keseharian yang meliputi watak terpuji, akhlak mulia, sikap mental dan budi pekerti yang luhur. Adapun nilai-nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK adalah: **religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas**. Nilai-nilai utama tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 3 pilar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), kekayaan budaya bangsa (kearifan lokal) dan kekuatan moralitas yang dibutuhkan bangsa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. 2007. "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN: Dari Pendekatan Dikotomis- Atomistik ke Integratif-Interkonektif" dalam Fahrudin Faiz (ed.). *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Penerbit SUKAPress.

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2004. *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan*



*Tinggi Umum*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.

Garis-garis Besar Program Pengajaran PAI. <http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/gbpps/gbpps-agamaislam>. diunduh 11 Oktober 2008.

Keputusan Dikti Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Depdiknas, 2000.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, Nomor: 38/DIKTI/KEP/2002 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Keputusan Mendiknas Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yani, M. T. 2009. Dinamika Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2(5). LPPM-IAIN Mataram

*Upaya Perguruan Tinggi Dalam Menangkal Radikalisme Dikalangan  
Mahasiswa*  
**Deni Febrini**





## KONSEP KHILAFAH DALAM HIZBUD TAHRIR INDONESIA DAN DALAM PETA KONSEP ISLAM

AISYAHNUR NASUTION

### ABSTRAK

Hizbut Tahrir adalah gerakan Islam (*al-harakah al-Islamiyah*) yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Politik menurut HT adalah mengatur segala urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan hukum-hukum syariat Islam. HT juga menegaskan jati dirinya dengan kalimat negasi untuk membedakan dirinya dari kelompok lainnya (Hizbut Tahrir, 2009). HTI cocok dengan karakter sebagai gerakan. HTI menginginkan tatanan masyarakat yang sama sekali baru. HTI bukan sekedar ingin memperbaiki masyarakat sekuler sekarang, namun lebih dari itu, HTI bertekad menggantinya sama sekali dengan masyarakat yang baru, yaitu tatanan masyarakat yang Islami. Hizbut Tahrir yang berpendapat bahwa khilafah adalah kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secara *kaffâh* (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan menerapkan Syariat Islam secara *kaffâh*. Maka tegaknya khilafah adalah sebuah kewajiban. Dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakannya merupakan dosabesar. Hizbut Tahrir Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia seharusnya lebih membukadiri terhadap semua kalangan, dan diharapkan lebih mematuhi peraturan pemerintah serta memperkuat peran serta kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperluas akses dan dalam membantu menyelesaikan permasalahan negara, sehingga kalangan masyarakat dan pemerintah nantinya akan memahami bahwa Hizbut Tahrir Indonesia bersungguhsungguh dalam membantu Negara Khususnya HTI, meskipun penulis apresiatif terhadap segala upaya membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat dan ide agar



kembali kepada kehidupan Islami dalam segala aspek, namun tentunya dapat menawarkan konsep yang tidak hanya idealistik, namun juga realistik. Sekiranya perlu merumuskan kembali konsep khilafah dalam bentuk dan kemasan yang sesuai realitas-realitas politik yang ada sekarang ini, misalnya konsep khilafah bukan dalam arti negara, tetapi persatuan umat Islam. Sistem khilafah di Indonesia tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Yang membuat khilafah sulit untuk di terapkan di Indonesia karena memiliki beberapa faktor: Ormas-ormas Islam sendiri ada yang menolak akan sistem khilafah di Indonesia, karena faktor keberagaman agama di Indoensia maka Indonesia tidak bisa menerapkan sistem khilafah di Indonesia. Dan Indonesia juga tidak bisa menjadikan salah satu agama sebagai pedoman hukum Negara, itu akan menciderai persatuan yang sudah dibentuk dari berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia.

## PENDAHULUAN

*Khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Dengan demikian, dapat dipahami makna khilafah digunakan oleh Al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelolah wilayah, baik luas maupun terbatas. Secara ringkas, Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir mendefenisikan daulah khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah Imamah, imamah dan khilafah mempunyai arti yang sama.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Internasional yang berideologi Islam. Artinya, Hizbut Tahrir menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Dengan demikian, dalam menetapkan ide, hukum- hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, Hizbut Tahrir hanya berdasarkan pada Islam. Didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang dilahirkan di Ijzim pada tahun 1909, masuk wilayah Haifa. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa` bin Ismail bin Yusuf an -Nabhani. Gelar an-



Nabhani dinisbahkan kepada bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni Padang Sahara Palestina. Ayah Taqiyuddin, Ibrahim bin Mustafa adalah seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Ibu Taqiyuddin menguasai beberapa cabang ilmu syariah yang diperoleh dari ayahnya Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Pada saat berumur 13 tahun Taqiyuddin dapat menghafal al-Quran dengan baik. Taqiyuddin sangat menyukai ilmu-ilmu syariah karena kebiasaannya melihat ayahnya mengajar, oleh karena itulah pada saat beranjak dewasa Taqiyuddin melanjutkan pendidikannya di al-Azhar Mesir mengambil ilmu syariah.

Jika kita perhatikan secara seksama, pergerakan dan perjuangan yang dilakukan Hizbut Tahrir bukanlah organisasi biasa yang tujuan organisasinya hanya amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi perjuangan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir lebih dari itu yaitu ingin menyatukan kembali umat Islam di dunia dalam satu naungan daulah khilafah. Hizbut Tahrir menamakan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam. Namun dalam kenyataannya, Hizbut Tahrir di Indonesia terdaftar sebagai organisasi Islam. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat; bersama-sama umat berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utama kehidupan ini, serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan wahyu yang di turunkan Allah SWT dalam segala aspek kehidupan.

Sejalan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Apa Pengertian Politik Islam ?
2. Apa Pengertian Khilafah ?
3. Bagaimana Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir?
4. Bagaimana Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam ?

Tujuan penulisan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian politik Islam.
2. Untuk mengetahui pengertian khilafah.
3. Untuk mengetahui Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir.
4. Untuk mengetahui Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam.



## LANDASAN TEORI

### Pengertian Politik Islam

Perkataan politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis yang maknanya kota. Dalam teori politik Islam, politik itu identik dengan *siyasa*h secara bahasa disebut dengan mengatur. Fiqh siyasa adalah aspek ajaran islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau kebijakan suatu negara terhadap negara-negara lain. Politik dapat juga dikatakan kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi / menangani suatu masalah.

### Pengertian Khilafah

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah.<sup>1</sup>Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syaria. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi di wa adaulah (agama dan negara).<sup>2</sup>

Kata khilafah seakar dengan kata khalifah (mufrad), *khalaif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (fi'il madi), kholafa (خلف). Kata khalifah, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, khalifah berarti "wakil", "pengganti", "penguasa", gelar bagi pemimpin tertinggi dalam

---

<sup>1</sup>Ade Shitu-Agbetola, "Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyid kutb, (dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991), h. 25

<sup>2</sup>Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al- Fikr,



komunitas muslim, dan bermakna “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.

Dalam uraian di atas tampak, kata khilafat yang berakar pada kata khalafa, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah imam. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para jurus Muslim.

### **Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir**

#### **1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir (HT) atau Liberation Party (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953.<sup>3</sup>

Sejak di dirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina, doktor lulusan Universitas AlAzhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina.<sup>4</sup> Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zalum hingga wafat 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha' Abu Rastah secara internasional.<sup>5</sup>

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada

---

<sup>3</sup>Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, (Bogor: Al-Izzah Press, 2002), h. 4

<sup>4</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 359.

<sup>5</sup>Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 265-266.



tahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hzbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.<sup>6</sup>

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan tsaqafah (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (ash shira' al-fikr). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.<sup>7</sup>

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (marhalah al-da'wah) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (marhalah al-tatsqif), melalui halaqah-halaqah. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (marhalah tafa'ul ma'a alummah). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam

---

<sup>6</sup>Ihsan Samarah, Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani, h 5-6

<sup>7</sup> Hizbut Tahrir, Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 23.



sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (marhalah istilam al-hukm). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

## 2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan sivitas academica IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah adalah alumni dan dosen IPB.

Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.

HTI dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian seksama.

Hizbut Tahrir maupun HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini karena menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislative.



Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena ini, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali Khilafah Islamiyah atau kekhalifahan Islam. Kekhalifahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khalifah Usmaniyyah, dan diganti oleh sistem Republik oleh Kemal Ataturk, seorang nasionalis sekuler Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI sendiri memang mengakui bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan. Namun demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan Hizbut Tahrir lebih banyak melontarkan ide/wacana, dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dipandang pro Barat.

### **Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam**

#### **1. Konsep Khilafah Politik Islam Hizbut Tahrir**

Menurut Hizbut Tahrir, Islam adalah prinsip ideologi yang terdiri dari aqidah dan syariat. Aqidah merupakan fungsi untuk memecahkan persoalan manusia, menjelaskan bagaimana memecahkan persoalan tersebut, memelihara dan mengembangkan ideologi tersebut. Islam sebagai prinsip ideologi inilah yang kemudian menjadi pola hidup lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme, dan isme-isme lainnya.<sup>8</sup>

Hizbut Tahrir yang bahwa kemunduran dunia Islam disebabkan lemahnya pemahaman Umat terhadap Islam yang

---

<sup>8</sup>Muhammad Hussain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, penerjemah: Zamroni Bogor: Pustaka Tarriqul Izzah,) h. 43



sangat parah. Kelemahan dan kemunduran tersebut disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, tidak ada pemahaman yang mendalam mengenai fikroh Islamiyah (konsep) dikalangan para aktifis kebangkitan Islam. *Kedua*, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai Thariqoh Islamiyah (metode pelaksanaan) dalam menerapkan Fikrah. *Ketiga*, tidak adanya usaha untuk menjalin fikrah Islamiyah dan thoriqoh Islamiyah sebagai suatu hubungan yang solid yang tidak bisa dijelaskan.<sup>9</sup> Hizbut tahrir menolak segala sistem dan Ideologi yang berasal dari pengaruh barat, semua ide dan pemikiran Hizbut tahrir berasal dari ajaran Islam. Seperti tercermin dalam namanya hizbut Tahrir yang berarti partai kemerdekaan, Hizbut Tahrir berusaha memerdekakan negeri-negeri kaum Muslimin diseluruh dunia dari cengkraman berbagai deologi termasuk didalamnya nasionalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir mayoritas bersifat politik (Dakwah Siyasi). Maksudnya, Hizbut Tahrir memperhatikan unsur-unsur masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya dengan syar'i. Bagi Hizbut Tahrir, yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara unsur-unsur masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskan dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta dari persepsi yang keliru, yang sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang kufur. Kegiatan politik ini juga nampak terlihat dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politiknya.

Adapun perjuangan politiknya, dapat terlihat dari penentangannya terhadap orang-orang kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

---

<sup>9</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Pokok-Pokok Pemikiran Hizbut Tahrir* (Bogor: pustaka Thariqul Izzah, 1993), h. 1-2



Perjuangan politik yang juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan penghianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat; melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, begitu halnya bila mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam. Dengan ini, konsep politik Hizbut Tahrir lebih kepada penentangan terhadap ide-ide Barat.

Hizbut Tahrir yang mengemban Dakwah Islam agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan, sehingga aqidah Islam dapat menjadi dasar negara dasar konstitusi dan undang-undang. Karena aqidah Islam adalah aqidah aqliyah (dasar untuk pemikiran) dan aqidah siyasyah (dasar untuk politik) yang memancarkan aturan untuk pendidikan, sosial masyarakat dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Hizbut Tahrir, untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu bahkan tidak boleh meniru pola lain, dan supaya kembali pelaksanaan yang murni dari ajaran Islam, yaitu kembali kepada pola zaman Al-Khulafa' al-Rasyidun. Hizbut Tahrir menganggap implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat yang niscaya untuk mencapai tujuan ini.

## 2. Sikap Politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia : Khilafah Islamiyah dan Negara Kesatuan

Hizbut Tahrir yang berpendapat bahwa khilafah adalah kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Maka tegaknya khilafah adalah sebuah kewajiban. Dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakannya merupakan dosa besar.

Dasar pemikiran untuk nasionalisme sekuler ditengah masyarakat

Islam dikemukakan oleh Ziya Gokalp, dia mengusulkan pemisahan gamadarinegara atas dasar teori Durkheim tentang evolusi sosial.

---

<sup>10</sup>Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. (Bogor. Pustaka Thariqah Izzah, 2002), h. 24-25



Dalam bentuk soliditas primitif, aspek- aspek kehidupan sosial yang berbeda-beda agama, negara, budaya, dan hukum berjalan beriringan. Akan tetapi, ciri soliditas organik penting yang ada di tengah masyarakat maju adalah pemisahan semua aspek sosial itu. Dia juga berargumen bahwa manusia membentuk berbagai macam kelompok yang berlainan, dari keluarga sampai pada masyarakat Internasional, namun yang terpenting dari semuanya adalah kelompok bangsa.

Para pengusung ide formalisme Islam dalam negara negara menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Tiga istilah yang paling sering digunakan adalah "Khalifah Islamiyah", "Daulah Islamiyah", dan "Negara Islam". Istilah khilafah berasal dari tradisi pemerintahan Islam masa-masa awal yang dikomandani khulafa al-Rasyidin; istilah Daulah di pinjam dari Daulah Umayyah dan daulah abbasiyah yang waktu itu diartikan sebagai "putaran pemerintahan dinasti" sedangkan istilah negara sebagai terjemahan dari nation state yang baru diperkenalkan belakangan oleh nicholo michiavelli. Dalam dunia Islam istilah negara Islam dikenal baru abad 20.

Konsep khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir adalah sebuah Sistem pemerintahan Islam yang diperaktekan di sebuah wilayah tertentu yang mendapat dukungan opini yang gridhoterhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Islam di wilayah itu. Konsep pemerintah ini adalah konsep yang konstitusi atau undang- undang dasarnya adalah syariat, semua yang dipraktekan disana (wilayah) adalah yang di perintahkan oleh syariat, termasuk ketika membuat regulasi/aturan-aturan. Konsep khilafah ini mencakup sistem pemerintahannya sekaligus pemimpin yang bisa menjadi pemimpin atau khalifah.

### 3. Kelemahan Konsep Khilafah, dan Penerapan Nilai-Nilai Islam (Syariat Islam) di Indonesia

Khilafah Islamiyah adalah absurd untuk dilaksanakan. Hal itu disebabkan tidak mudah mencari rumusan khilafah yang disepakati oleh seluruh umat Islam yang menyebar di sejumlah kawasan dunia. Konsep khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir adalah hanya salah satu rumusan dari Taqiyuddin al-Nabhani, yang belum tentu diamini oleh para ulama yang lain.<sup>8</sup> Ideologi khilafah berbeda dengan ideologi Indonesia, apabila sistem



khilafah diterapkan di Indonesia maka ideologi bangsa Indonesia yang telah menjadi empat pilar akan sia-sia kita pertahankan. Sistem khalifah yang berhak melegalisasi perundang-undangan dengan bersumber dari Islam berdasarkan ijtihad. Jika terdapat perselisihan antara negaradengan rakyat atau antara pelaku politik maka harus dikembalikan tolak ukurnya kepada Allah dan Rasul, kepada al-Quran dan al-Sunnah. Inilah tolak ukur sekaligus landasan yang tetap, tidak berubah. Ini pulalah yang menjamin keistiqamahan sistem politik Islam. Sementara kalau sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang menjadi landasan hukumnya adalah UUD 1945. Dalam hal ini segala peraturan tentang kenegaraan sudah ditetapkan.

Bagi Hizbut Tahrir sendiri kelemahan dari konsep khilafah ini tidak ada, jika ada kesalahan atau kelemahan itu bukan ada pada konsepnya tetapi ada pada implementasi oleh generasi-generasi sebelumnya yang mempraktekan khilafah. Konsep khilafah ini merupakan konsep dari Allah, maka yang berasal dari Allah itu adalah konsep yang benar yang tidak bisa di tandingi dengan konsep manapun yang dibuat manusia.

## KESIMPULAN

1. Konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah ini. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, Undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan, maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
2. Konsep Khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan



dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk nation state (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah.

3. Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Shitu-Agbetola, *"Theori of al- Khilafah in The Religion-Political View of Sayyid kutb*, (dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991
- Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006
- Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa*.Beirut: Daar al- Fikr, 2000
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

*Konsep Khilafah Dalam Hizbud Tahrir Indonesia Dan Dalam Peta Konsep  
Islam*  
**Aisyahnur Nasution**





## **ANALISIS TENTANG KELEMAHAN DAN KELEBIHAN KELOMPOK ISLAM JEMAAH TABLIGH**

### **HADISANJAYA**

#### **PENDAHULUAN**

Jamaah Tabligh tentu bukan nama yang asing lagi bagi masyarakat kita. Lebih-lebih bagi mereka yang menggeluti dunia dakwah. Dengan menghindari ilmu-ilmu fikih dan akidah yang sering dituding sebagai 'biang pemecah belah umat', membuat dakwah mereka sangat populer dan mudah diterima masyarakat berbagai lapisan.

Merebaknya Jamaah Tabligh sebenarnya hanyalah salah satu sekuen dari perkembangan serupa di banyak negara. Kelompok ini sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, dan menjadi ujung tombak gerakan islamisasi di negara-negara atau daerah-daerah non-muslim. Mereka bisa karena menawarkan format Islam yang lebih ramah, sederhana, sentuhan personal serta tekanan pengayaan spritualitas personal. Format semacam ini bagaimanapun mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kapitalisme dan modernisme.

Jamaah Tabligh adalah merupakan potret gerakan dakwah islam kekinian yang bersifat lintas negara. Islam yang terlihat pada wajah Jamaah Tabligh adalah santun, rendah hati, dan cenderung menghindari khilafiyah (perbedaan pendapat). Para aktivitas Jamaah Tabligh (karkun) secara rajin dan berkesinambungan berkhuruj (keluar) untuk menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang menarik, agar Islam menjadi sistem hidup para pemeluknya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar pemeluk agama Islam melaksanakan ajaran Islam secara kaffah, secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong, terutama mereka yang paling giat meramaikan shalat di masjid.

Meskipun demikian, Jamaah Tabligh tetap menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menuduh kelompok ini adalah



bagian dari jaringan Islam garis keras. Namun, sebagian lainnya, justru berpendapat berbeda. Jemaah Tabligh dianggap semata-mata komunitas dakwa yang bersifat apolitis. Adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan komunitas ini sesungguhnya belum banyak dieksplorasi sehingga tidak mudah dipahami. Hal ini sebenarnya wajar, mengingat komunitas ini relatif kurang terbuka kepada publik.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh ("Kelompok Penyampai") (bahasa Arab: التبليغ جماعة) adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah (sempurna). Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada golongan Islam saja. Tujuan utama gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang Sufi dari tarekat Jisytiyah yang berakidah Maturidiyah dan bermazhab fikih Hanafi. Ia bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il al-Hanafi ad-Diyubandi al-Jisyti al-Kandahlawi kemudian ad-Dihlawi.

Al-Kandahlawi adalah nisbat kepada Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Adapun ad-Dihlawi adalah nisbat kepada Dihli (New Delhi, *-red.*), ibukota India. Di tempat dan negara inilah, markas gerakan Jamaah Tabligh berada. Adapun ad-Diyubandi adalah nisbat kepada Diyuband, yaitu madrasah terbesar bagi penganut mazhab Hanafi di Semenanjung India. Sementara itu, al-Jisyti adalah nisbat kepada tarekat al-Jisytiyah, yang didirikan oleh

---

<sup>1</sup>Dr. Khalimi, MA, *Ormas-ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi dan politik, (Jakarta Gaung Persada Press, 2010), hal99*



Mu'inuddin al-Jisyti. Muhammad Ilyas dilahirkan pada tahun 1303 H dengan nama asli Akhtar Ilyas. Ia meninggal pada 11 Rajab 1363 H.<sup>2</sup>

Muhammad Ilyas tumbuh berkembang di lingkungan keluarga sangat agamis dan dengan tradisi keilmuan yang sangat kental. Ayahnya, Muhammad Ismail adalah seorang penganut tasawuf yang sangat abid dan zahid. Dia telah mengabdikan hidupnya dalam ibadah dan tidak lagi terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran.

Muhammad Ilyas telah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama Syaikh Muhammad Yahya. Selesai itu, dia belajar di madrasah Mahahirul Ulum, di kota Saharanpur. Dan pada tahun 1326 H, di berangkat ke Deoband. Sekolah ini terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283 H/1867 M. Di sini dia belajar hadist Jami Shahih Turmuzi dan Shahih Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar Kutub al-Sittah pada kakaknya sendiri, Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.<sup>3</sup>

Asy-Syaikh Saifurrahman bin Ahmad ad-Dihlawi mengatakan, "Ketika Muhammad Ilyas melihat mayoritas orang Meiwat (suku-suku yang tinggal di dekat Delhi, India) jauh dari ajaran Islam, berbaur dengan orang-orang Majusi para penyembah berhala Hindu, bahkan memakai nama-nama mereka, dan tidak ada lagi keislaman yang tersisa selain hanya nama dan keturunan, serta kebodohan yang kian merata, tergeraklah hati Muhammad Ilyas. Pergilah ia kepada syaikhnya dan syaikh tarekatnya, seperti Rasyid Ahmad al-Kanhuhi dan Asyraf Ali at-Tahanawi untuk membicarakan masalah ini. Ia

---

<sup>2</sup>Bis Bri Musliman, hlm. 583, Sawanih Muhammad Yusuf, hlm. 144—146, dinukil dari Jama'at Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah, hlm. 2)

<sup>3</sup>Dr. Khalimi, MA, Ormas-ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi dan politik, (Jakarta Gaung Persada Press, 2010), hal200



pun akhirnya mendirikan gerakan tabligh di India atas perintah dan arahan dari para Syaikhnya tersebut.”<sup>4</sup>

Adalah hal yang ma’ruf di kalangan *tablighiyin* (para pengikut jamaah tabligh, -red.) bahwa Muhammad Ilyas mendapatkan tugas dakwah tabligh ini setelah kepergiannya ke makam Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.<sup>5</sup> (*Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 3)

Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi, kepemimpinan jamaah tabligh diteruskan oleh puteranya, Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi (1917-1965), ia dilahirkan di Delhi, dalam mencari ilmu ia sering berpindah-pindah tempat dan guru sekaligus menyebarkan dakwah. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din, Delhi. Kitabnya yang terkenal adalah *Amani Akhbar*, berupa komentar kitab *Ma’ani al-Atsar*, karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah. Kemudian penyebaran Jamaah Tabligh dilanjutkan oleh Amir yang ketiga yaitu In’am Hasan.

Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering meyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama “gerakan iman”. Ilham untuk mengabdikan hidupnyatotal hanya untuk islam terjadi ketika Maulana Ilyas melangsungkan ibadah haji keduanya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas menyerukan slogannya, “Aye Musalmano!” Musalman bano” (dalam bahasa urdu), yang artinya “Wahai Umat muslim! Jadilah yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah). [8]Tabligh resminya bukan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk

---

<sup>4</sup>*Nazhrah ‘Abirah l’tibariyah Haulal Jama’ah at-Tablighiyah*, hlm. 7—8, dinukil dari kitab *Jama’atut Tabligh Aqa’iduha wa Ta’rifuha*, karya Sayid Thaliburrahman, hlm. 19

<sup>5</sup>*Jama’atut Tabligh Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 3



menjadi muslim yang menjalankan agamanya dan hanya satu-satunya gerakan islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya.

Jamaah ini muncul di India, kemudian tersebar ke Pakistan dan Bangladesh, negara-negara Arab dan keseluruh dunia. Di antara negara-negara yang banyak pengikutnya yaitu Mesir, Sudan, Irak, Bangladesh, Pakistan, Suriah, Yordania, Palestina, Libanon. Pimpinan pusatnya berkantor di Nizhamuddin, Delhi.

Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jamaah Tabligh berhasil berjalan di Asia Selatan. Dengan dipimpin Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas, gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.

### **Jemaah Tabligh di Indonesia**

Jemaah Tabligh di Indonesia meski tak sepopuler organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama, namun Jamaah Tabligh terbilang mempunyai anggota yang cukup banyak. Anggota Jamaah Tabligh di Indonesia sangat bervariasi yang berasal dari berbagai profesi, antara lain kalangan profesional, artis, pegawai negeri, tentara dll. Pusat markas Jamaah Tabligh di Indonesia berada di Jakarta, khususnya di masjid kebun jeruk di Jl.Hayam Wuruk, Jakarta Kota. Dimasjid ini kita akan menjumpai ratusan jemaah yang hampir seluruhnya berjanggut.

Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Pada Acara ijtima’ tabligh untuk skala Asia Tenggara ini dihadiri oleh sekitar 20.000 orang Jamaah



Tabligh. Kenyataan ini sungguh di luar dugaan untuk sebuah organisasi yang relatif baru dan tidak mempunyai akar di Indonesia.<sup>6</sup>

### Asas dan Landasan Jemaah Tabligh

Jamaah Tabligh mempunyai suatu asas dan landasan yang sangat teguh mereka pegang, bahkan cenderung berlebihan. Asas dan landasan ini mereka sebut dengan *al-ushulus sittah* (enam landasan pokok) atau *ash-shifatatus sittah* (sifat yang enam), dengan rincian sebagai berikut :

Merealisasikan syahadat La ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah.

Menurut Jamaah Tabligh, iman berarti membenarkan perkataan seseorang dengan pasti karena percaya kepadanya. Secara istilah iman adalah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw, dengan begitu saja tanpa, melihat secara langsung karena percaya dan yakin terhadapnya. Sebagai mana yang diterangkan dalam Q.S.Al-Anbiya (21):25.

"Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".

Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda dan memasukan keyakinan yang benar terhadap Dzat yang mencipta, Pemberi rezeki, Pemberi manfaat, Pemberi bahaya, Memuliakan, Menghinakan, Menghidupkan, Mematikan, Penahan. Mereka memahami kalimat tauhid semakna dengan tauhid Rububiyah.

---

<sup>6</sup>H. As'ad Said Ali, Islamisme Jamaah Tabligh,  
[http://www.nu.or.id/page/id/dinamic\\_detil/4/32537/kolom/JamaahTabligh.html](http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/4/32537/kolom/JamaahTabligh.html)



Adapun tentang pemaknaan *La ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah* dengan pernyataan bahwa hal itu untuk mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda yang mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda dan memasukkan yang benar terhadap Dzat Allah, maksudnya manusia yang menyakini Allah dan mengeluarkan keyakinan dari selain-Nya sebagaimana ayat :

“Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam, dan sesungguhnya benar-benar akan melihatnya dengan pandangan yang menimbulkan keyakinan”.

### **Shalat dengan Khusyu’.**

Dapat mengambil manfaat dari *qudratullah* (kuasa Allah) secara langsung, maka wajib melaksanakan perintah Allah berdasarkan pentunjuk Rasulullah. Perintah yang paling penting dan sebagai asas adalah menegakkan shalat dengan khusyu. Khusyu adalah takut di dalam hati dan ketenangan pada anggota tubuh.<sup>7</sup> Jamaah Tabligh sangat memperhatikan menunaikan shalat bagaimanapun kondisi sibuknya. Perkara ini dituntut kepada stiap muslim dan pelakunya akan diberi pahala oleh Allah dengan cara mempelajari dan mengamalkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, *sunnah-sunnahnya* dan hukum-hukumnya.

### **Ilmu**

Untuk dapat mengambil manfaat dari Allah secara langsung perlu mematuhi semua perintah-Nya menurut cara Nabi Muhammad SAW, hal ini dapat terwujud dengan berusaha mendapatkan ilmu Ilahi. Ilmu merupakan harta yang kekal bagi manusia. Bagi Jamaah Tabligh ilmu tentang hukum-hukum dan masalah-masalah fiqih serta ilmu tauhid, maka mereka perhatikan dan menghargai.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Muntakhab Ahadist; Dalil-Dalil Pilihan Enam Sifat Utama*, (terjemahan) Ahmad Nur Khalis Al-Adib, Munjahid, Yogyakarta; Al-Shaff, 2006, hlm.15

<sup>8</sup>Nazar Al-Jarbu, “Waqafat ma’a Jama’at Al-Tabligh” hlm. 5-6



Dalam menjelaskan tentang ilmu, Jamaah Tabligh mentamsilkannya dengan tingkat kualitas tanah. Tanah ada tiga macam kualitas begitu juga manusia. Jenis tanah yang pertama adalah yang bisa mengambil manfaat dari air, sehingga bisa hidup kembali setelah tadinya mati. Ia pun bisa menumbuhkan tanaman, sehingga manusia dan hewan dapat memanfaatkannya. Jenis manusia pertama adalah manusia yang memperoleh petunjuk dari ilmu. Jenis tanah yang kedua adalah yang tidak dapat memperoleh manfaat ntuk dirinya, akan masih berfaedah, yaitu menampung air untuk makhluk-makhluk lain. Sehingga manusia dan hewan hanya dapat memperoleh manfaat.

Demikian juga jenis manusia yang kedua yaitu mereka yang memiliki hati yang bagus hafalannya, namun tidak memiliki pikiran yang cerdas, mereka juga tidak mempunyai kesungguhan dalam mengamalkannya. Jenis manusia ini memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang mereka peroleh. Jenis manusia yang ketiga adalah mereka yang tidak memiliki hati yang bagus. Ketika mereka mendengar suatu ilmu mereka tidak dapat memperoleh manfaat darinya hingga tidak dapat memberi manfaat pada yang lain, hal itu layaknya tanah yang gersang.

### **Memperbaiki Niat**

Niat adalah melaksanakan segala perintah Allah untuk mencari keridhaan Allah semata dan agar amal bersih dari riya dan ingin dikenal orang. Setiap orang Islam diwajibkan beramal dengan yakin terhadap apa yang telah dijanjikan Allah disertai rasa rindu penuh harap akan pahala dan balasan dari sisi Allah. Mencari keridhaan Allah (ihtisab) dalam mengerjakan amal-amal shalih dan menghadapi kesusahan merupakan sikap bersegera mencari pahala. Cara mendapatkannya adalah dengan tunduk berserah diri kepada Allah.

### **Menghormati Kaum Muslimin dan Bersikap Lembut Kepada Mereka.**



Ikramul Muslimin (lemah lembut terhadap kaum muslim) adalah melaksanakan perintah Allah yang berhubungan dengan hamba-hambanya dengan berpedoman pada petunjuk Nabi Muhammad Saw., dan menjaga kehormatan umat islam. Orang islam adalah orang-orang yang tunduk dan lembut perangnya dan mereka sangat patuh terhadap perintah dan larangan Allah.

### **Dakwah dan Khuruj di jalan Allah**

Untuk memperbaiki keyakinan dan amal pada diri seseorang dan seluruh umat manusia perlu adanya usaha menghidupkan kerja Nabi Muhammad Saw., ke seluruh alam sesuai dengan cara beliau, yakni melalui metode keluar untuk berdakwah dan tabligh.

### **Konsep Dakwah Jamaah Tabligh**

Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep khuruj (keluar untuk berdakwah). Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap sebagai pengikut Jamaah Tabligh, jika sudah turut serta dalam khuruj. Sebab khuruj bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban.

Konsep khuruj yang dibangun Jamaah Tabligh berdasarkan landasan teologis pimpinan Jamaah Tabligh. Landasan hukum khuruj bagi jamaah tabligh berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (Al-Imran : 104 dan Al-Imran :110).

Begitu juga dengan hadist, khuruj didasarkan pada satu hadist Nabi yang berbunyi "apabila ummatku di akhir zaman mengorbankan 1/10 waktunya di jalan Allah, akan diselamatkan." Maka setiap hari mereka juga harus menyisakan 2,5 jam waktu mereka untuk berdakwah. Yang lebih menekankan kepada aspek pembinaan suluk/akhlak, ibadah-ibadah tertentu seperti dzikir, zuhud, dan sabar.

Penafsiran akan arti khuruj yang dimaksud oleh ayat di atas, berdasarkan mimpi pendiri Jama'ah Tabligh ini, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran 110 yang berbunyi : "Kuntum khoiru ummatin ukhrijat linnasi



...” menurutnya kata ukhrijat dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan (siyahah).

Konsep khuruj dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap;

- 3 hari dalam sebulan
- 40 hari dalam setahun
- 4 bulan sekali dalam hidup

Dalam khuruj yang dilakukan, tempat dan target dakwah sudah ditentukan. Biasanya mereka yang khuruj berkelompok terdiri dari 5-10 orang. Mereka biasanya diseleksi oleh anggota syura Jamaah Tabligh siapa saja yang layak untuk khuruj. Mereka yang khuruj dikirim ke berbagai kampung yang telah ditentukan. Di kampung tempat berdakwah, para Jamaah Tabligh ini, menjadikan masjid sebagai base camp. Kemudian mereka berpencar ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak masyarakat lokal untuk menghadiri pertemuan di masjid dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

### **Kelemahan dan Kelebihan Jamaah Tabligh**

Beberapa kelemahan yang menurut penulis terdapat dalam ajaran Jamaah Tabligh diantaranya adalah :

- a) Mencukupkan diri atau membatasi diri mereka hanya pada satu sumber atau rujukan saja, yaitu Kitab Fadhail A'mal karangan Muhammad Zakariya al-Kandahlawi.
- b) Sistem Dakwah Kuruj selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan cenderung bertentangan dengan prinsip tanggung jawab kepala keluarga yang wajib menafkahi keluarga, mendidik dan melindungi keluarga. Sebagai mana kita ketahui bahwa hukum menafkahi keluarga adalah *Fardhu Ain*, sedangkan hukum mendakwahi orang lain adalah *Fardhu Kifayah*.

Sebagai contoh kasus dapat penulis kemukakan disini, yaitu ;



- Kasus pertama, ada seorang anggota jemaah tabligh yang penulis kenal selama selalu sibuk kuruj berbulan bulan, sementara membiarkan istrinya mengambil alih tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga dengan membanting tulang setiap hari berjualan dari sore sampai malam hari.
- Kasus kedua, ada juga seorang anggota jemaah tabligh yang penulis kenal, selama ini juga selalu sibuk kuruj sehingga melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya dan mengakibatkan istrinya pulang kerumah orang tuanya, dan akhirnya bercerai.

Inilah hal-hal yang menurut penulis menyebabkan sistim dakwah kuruj yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk kelemahan dari kelompok jemaah tabligh.

- c) Kurang memiliki ilmu yang luas tentang keislaman untuk berdakwah kepada umat. Orang-orang yang bergaul dengan mereka tidak bisa memungkiri keengganan mereka untuk menimba ilmu agama dari para ulama, dan minimnya mereka dari buku-buku pengetahuan agama Islam. Bahkan, mereka berusaha menghalangi orang-orang yang mencintai ilmu dan menjauhkan mereka dari buku-buku agama serta para ulamanya.<sup>9</sup>

Disamping beberapa kelemahan diatas Jemaah Tabligh menurut penulis juga memiliki banyak kelebihan, antara lain :

- a) Senantiasa sholat berjamaah di masjid dan mengamalkan sunah
- b) Hidup berjamaah dengan satu ikatan yang sangat kuat
- c) Sanggup mengorbankan waktu, tenaga dan uang demi mencapai tujuan
- d) Berhasil mendisiplinkan diri menjauhi perdebatan yang tidak bermanfaat dalam hal-hal agama.
- e) Satu -satunya jemaah yang memiliki persiapan fisik untuk turun ke medan jihan peperangan.

---

<sup>9</sup>Jama'atut Tabligh Mafahim Yajibu an Tushahhah, hlm 6 dengan ringkas



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Jamaah Tabligh merupakan gerakan Islam yang telah mendunia. Sejak kemunculannya di India gerakan ini tetap berada pada perbaikan individu sebagai fokus utama. Sarana yang digunakan oleh Jamaah Tabligh adalah para penggerak dakwahnya itu sendiri. Aktivitas dakwah dibawa secara langsung oleh anggotanya ke berbagai daerah di berbagai belahan dunia.

Sedangkan di Indonesia perkembangan Jamaah Tabligh begitu pesat, dapat dilihat dari semakin banyaknya anggota yang tersebar luas serta aktivitas keagamaan yang dilakukan ditengah-tengah kaum muslim negeri ini, sehingga Jamaah Tabligh saat ini mudah ditemukan diberbagai daerah.

Pada konsep pemikiran yang dibawah Jamaah Tabligh, kehidupan adalah sebuah aktivitas peribadahan. Selain terus memperbaiki akhlak dan ibadah, mengajak orang lain untuk ikut berdakwah dijalan Allah adalah salah satu nilai yang cukup penting.

Metode dakwah yang dibawa oleh Jamaah Tabligh sangat fleksibel dan mudah diterima. Banyak tantangan terhadap pergerakan dakwah Jamaah Tabligh, hujatan yang sering berasal dari ulama salafi, tetapi ajaran Jamaah Tabligh tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, hanya saja masih terdapat beberapa kelemahannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Dr. Khalimi, MA, *Ormas-ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi dan politik, (Jakarta Gaung Persada Press, 2010), hal99*



2. *Bis Bri Musliman*, hlm. 583, *Sawanih Muhammad Yusuf*, hlm. 144 – 146, dinukil dari *Jama'atut Tabligh Mafahim Yajibu An Tushahhah*, hlm. 2)

3. *Dr. Khalimi, MA, Ormas-ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi dan politik, (Jakarta Gaung Persada Press, 2010), hal200*

4. *Nazhrah 'Abirah I'tibariyah Haulal Jama'ah at-Tablighiyah*, hlm. 7 – 8, dinukil dari kitab *Jama'atut Tabligh Aqa'iduha wa Ta'rifuha*, karya Sayid Thaliburrahman, hlm. 19

5. *Jama'atut Tabligh Mafahim Yajibu an Tushahhah*, hlm. 3

6. H. As'ad Said Ali, *Islamisme Jemaah Tabligh*, [http://www.nu.or.id/page/id/dinamic\\_detil/4/32537/kolom/JamaahTabligh.html](http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/4/32537/kolom/JamaahTabligh.html)

Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Muntakhab Ahadist; Dalil-Dalil Pilihan Enam Sifat Utama*, (terjemahan) Ahmad Nur Khalis Al-Adib, Munjahid, Yogyakarta; Al-Shaff, 2006, hlm.15

*Konsep Khilafah Dalam Hizbud Tahrir Indonesia Dan Dalam Peta Konsep  
Islam*  
**Aisyahnur Nasution**





## **UPAYA PONDOK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME AGAMA (TRANSFORMASI KURIKULUM DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM KEPAHIANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RADIKALISME**

**ANANG MUSTAQIM**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan usaha sengaja untuk mendewasakan manusia muda menjadi manusia yang bertanggungjawab dan memiliki kemampuan tertentu sebagai penerus kebudayaan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 yang berbunyi "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka perlu ada komponen pendidikan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah biaya, manajemen, tenaga pendidik, sarana prasarana, isi/kurikulum, proses dan evaluasi. Semua komponen ini saling berkaitan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Keberadaan pesantren memiliki tanggungjawab besar dan strategis dalam mengembangkan pendidikan Islam berwawasan global-multikultural. Hal ini disebabkan karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak mencetak agamawan dan intelektual muslim. Pesantren merupakan tempat diajarkannya pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip saling menghargai perbedaan, kerukunan, perdamaian, kesantunan, dan manifestasi akhlak mulia. Sejatinya pesantren senantiasa mengajarkan para santrinya dengan penuh kesabaran, toleran, sederhana, mandiri dan saling menghormati, suri tauladan yang baik, menghormati para

---

<sup>1</sup> UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



ulama dan berusaha taat terhadap ajaran agama dan patuh terhadap undang-undang Negara.

Keberlangsungan hidup dan keberadaan pesantren-pesantren seperti itu patut diduga karena pesantren telah menjalankan dan menyebarkan syariat Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para penyebar Islam di Indonesia dan cara-cara yang dipraktikkan oleh para wali songo. Pada umumnya dalam berdakwah pesantren senantiasa berpegang pada firman Allah dan hadis Nabi yang selalu mengetengahkan cara-cara hikmah sebagai agama rahmatanlilalamin.

Namun disisi lain, ada sebahagian masyarakat yang menganggap pesantren sebagai momok lahirnya pemahaman garis keras dalam merealisasikan ajaran-ajaran agamanya dan bersikap intoleran. Dengan adanya beberapa kejadian-kejadian kekerasan sampai kepada aksi pengeboman dengan mengatas namakan agama.

Dalam konteks actor radikalisme, wacana yang berkembang dipahami sebagai kelompok orang yang kebanyakan terdidik dari pendidikan pesantren. Akibatnya tumbuh dalam pemahaman publik bahwa pesantren merupakan tempat pendidikan bagi calon teroris. Isu radikalisme yang mengaitkannya dengan pesantren telah membuat opini public terhadap pesantren menjadi buruk.<sup>2</sup> Kemajuan informasi komunikasi telah menembus benteng dunia pesantren. Dinamika sosial ekonomi telah mengharuskan pesantren tampil dalam dunia pasar bebas atau *free market*.

Untuk itu, apabila tidak ingin dicap sebagai sarang munculnya kelompok radikal, maka pesantren harus dapat memberikan respon yang sebaik-baiknya untuk menghadapi berbagai perkembangan tersebut, bahkan untuk mengeliminir serta membasmi tindakan-tindakan radikal yang dikomandoi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Transformasi yang tidak bertentangan dengan motto pesantren sejak

---

<sup>2</sup> Nuhrison M.Nuh, Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama,2010).<sup>3</sup>



dahulu yaitu memelihara cara lama yang baik dan mengambil dan mengembangkan cara baru yang lebih baik.<sup>3</sup>

Banyak yang bias dilakukan oleh pesantren untuk persoalan ini, diantaranya adalah dengan mentransformasi sistem pendidikan pesantren dengan cara merumuskan kembali tujuan, metode, kurikulum secara komprehensif untuk menanggulangi radikalisme agama.

Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Latin, *a littleracecourse* (suatu jarak yang ditempuh dalam pertandingan olah raga), yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi *circleofinstructionnya* itu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata “kurikulum” berasal dari Bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam Bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauili dalam Muhaimin menjelaskan bahwa al- Manhaj sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Kurikulum dalam bidang pendidikan dalam arti yang sempit dapat dikemukakan sebagai berikut: Kurikulum menurut Muhammad Ali Khalil adalah “seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan”.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Crowand Crow adalah “rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran

---

<sup>3</sup>Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, vol.1 (Jakarta: Fatma Press, 1999).

<sup>4</sup>M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). 85.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Khalil, *Qamus Tarbiyah, English-Arab*, (Beirut: Daral-Ilmal-Maliyyin, tp, th). 103



yang disusun secara sistematis, sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu".<sup>6</sup>

Menurut K. Soegarda Poerbaka Watjadan H. Harahap, kurikulum berarti: Pertama, suatu kelompok mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk dapat lulus mencapai sertifikat dalam salah satu bidang tertentu. Kedua, suatu rencana umum mengenai isi atau bahan-bahan pelajaran khusus, yang oleh suatu sekolah atau pendidikan disajikan kepada pelajar untuk tulus dan mendapat sertifikat atau untuk dapat memasuki suatu jabatan atau bidang tertentu. Ketiga, suatu kelompok pelajaran dan pengalaman yang diperoleh oleh si pelajar dibawah bimbingan sekolah.<sup>7</sup>

Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pembuat kurikulum; pertama, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi dan fungsi setiap jenjang pendidikan. Filosofi kurikulum yang profesif seperti humanisme dan rekonstruksi social dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum. Kedua, teori kurikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantive yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat *individualistic* tetapi sebagai makhluk sosial, budaya, politik dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa dan dunia. Keempat, Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar tidak hanya mengandalkan siswa belajar individualistis, tetapi juga dikembangkan dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu

---

<sup>6</sup> Crowand Crow, Pengantar Ilmu Pendidikan, (yogyakarta: RakeSarasasin, 1990), Edisi III. 75

<sup>7</sup> R. Soogarda Poerbakawatja dan AH. Harahap, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung 1982), Cet.III. 188



kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik. Kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternative assessment (portofolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.<sup>8</sup>

Sikap menghormati orang lain dapat ditumbuh kembangkan dalam diri siswa melalui dimensi-dimensi pendidikan agama dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

1. Pendidikan agama seperti fikih, tafsir tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan muqaran (perbandingan). Tentunya, bukan sekadar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.
2. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa (untuk jenjang tertentu) juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Contoh, dialog tentang puasa yang bisa menghadirkan para bikshu atau agamawan dari agama lain sehingga peserta didik diharapkan mempunyai pemahaman tambahan khususnya dalam menilai keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda agama.
3. Untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan hanya sekadar menyelenggarakan dialog antar agama, namun juga menyelenggarakan program *road show* lintas agama, untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain.
4. Untuk menanamkan kesadaran spiritual, pendidikan Islam perlu menyelenggarakan program *spiritual workcamp*, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirim siswa untuk ikut dalam

---

<sup>8</sup> Syamsul Ma'arif, M.Ag, Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan), Disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam di Lembang Bandung tanggal 26- 30 November 2006



sebuah keluarga selama beberapa hari. Siswa harus melebur dalam keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut petani, maka ia harus pula membantu keluarga tersebut bertani dan sebagainya, dengan harapan siswa akan mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk menghargai dan menghormati orang lain.

5. Untuk menumbuhkan kepekaan social maka menyelenggarakan program *sahur ont he road*, misalnya pada bulan Ramadhan. Dirancang sahur bersama antara siswa dengan anak-anak jalanan.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

Kurikulum menurut Muhammad Ali Khalil adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan,<sup>10</sup> sedangkan menurut Crow and Crow adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu.<sup>11</sup>

Untuk menanggulangi radikalisme agama, kurikulum pesantren harus mentransformasikan dengan berbagai ciri khasnya kearah yang lebih memperhatikan keragaman sosial, budaya dan lainnya dengan tujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Modern Darussalam merupakan perpaduan antara salafiyah dan modern. Santri diajarkan "al-fiqh,, ala>madha>hibalarba"ah." (Fiqih menurut empat mazhab). Guna menanggulangi radikalisme agama maka dijadwalkan kedatangan TNI dan POLRI kepesantren untuk penyuluhan kepada santri atas bahaya radikalisme agama. Pimpinan pesantren menyeleksi setiap calon guru yang akan masuk

---

<sup>9</sup> Ibid...

<sup>10</sup> Muhammad AliKhalil,Qamus Tarbiyah,English-Arab,(Beirut:Daral-,Ilmal-Maliyyin,tp,th).103

<sup>11</sup>Crowand Crow, Pengantar Ilmu Pendidikan,(yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), Edisi III. 75



kepesantren ini agar tidak membawa paham-paham radikal. Dewan guru juga memantau buku bacaan santri yang berindikasi radikal. Pengawasan terus dilakukan baik internal yaitu pergaulan sesama teman atau keluarga atau external yaitu pergaulan santri dengan orang luar dari paham radikal.

Kegiatan harian yang bersifat *continue* sebagai upaya memupuk cinta tanah air dan bangsa juga dilakukan seperti adanya kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap awal pekanya itu pada hari sabtu, selain itu juga ada upacara-upacara untuk memperingati hari hari besar-besar Negara seperti upacara bendera 17 Agustus dan upacara pada tanggal 22 Oktober sebagai peringatan hari santri nasional.

Pimpinan Pondok Pesantren menyakini bahwa dengan kegiatan-kegiatan tersebut mampu meningkatkan kecintaan santri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan cara inilah kami dapat menanggulangi radikalisme agama pada santri. Santri diajarkan mars, *hubbulwathon minaliman*“ Karya KH.Abdul Wahab Chasbullah 1934 dan mars tersebut dinyanyikan pada saat hari santri tanggal 22 Oktober. Pancasila dan ke-Indonesiaan diajarkan dipesantren ini. Para santri bukan hanya dikenalkan dengan pelajaran agama tetapi juga dikenalkan budaya Indonesia dengan lebih mendalam sehingga santri lebih mencintai tanah airnya dan mampu menjaganya dengan baik bukan dengan cara yang keras atau kasar.

Pesantren selalu mensosialisasikan cinta tanah air kepada santrinya. Bahwa bangsa ini harus dijaga dengan cara yang baik bukan dengan kekerasan. Paham ini menjadi kebijakan pimpinan dalam memanej para santri dan guru.

Pondok Pesantren Modern Darussalam memadukan materi ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan kepesantrenan. Materi ke-Islaman terdiri atas aqidah, syari“ah, akhlak, serta tradisi keilmuan dan kerohanian Islam. Materi keindonesiaan terdiri atas pancasila dan UUD 45, UU No.20 Th.2003, serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.



Kurikulum di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang mengkombinasikan antara kurikulum dari kementerian agama dengan kurikulum dari pondok pesantren baik salafiyah dan modern seperti pada mata pelajaran Hadist. Buku/kita rujukan Mata pelajaran Hadist diajarkan secara berjenjang, selain dari kementerian agama kita rujukan yang lainnya diantara kelas 7 Mukhtarul Ahadist, kelas 8 dan 9 Hadist Arbain, kelas 10-12 Bulughul Marram.

Mata pelajaran Tauhidatauqidah akhlah juga diajarkan secara berjenjang mulai dari ushuludin diajarkan pada kelas 7, kitab uss"adah pada kelas 8, jawahirulkalamiyah untuk kelas 9, kelas 10 dan 11 mata pelajaran tauhid dengan kitabnya kifayatul awam, dan kelas 12 mata pelajaran tauhid dengan kitabnya nashoihulibad.

Sebagai upaya untuk membekali santrinya dengan akhlak yang mulia, di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang ada penambahan mata pelajaran Adabiyah yang di ajarkan secara berjenjang yaitu kitab A"lala diajarkan di kelas 7, akhlaquillibain dan akhlakhul lil banat diajarkan dikelas 8 dan 9, sementara untuk tingkat kelas 11 dan 12 menggunakan kitab Ta"limmuta"alim yang di semua satuan pendidikan dan kepengasuhan secara berjenjang dan berkelanjutan sebagai kesatuan tujuan dan usaha baik visi, kurikulum, tenaga pendidik, metodologi, dan sarpras untuk mencapai visi lembaga.

Pramuka diwajibkan di pesantren ini, karena dengan pramuka, santriakan menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan nanti akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara ini dengan baik.

Hal ini sesuai dengan prinsip mutu Pesantren Modern Darussalam yaitu:

1. Satu isi- Satu Usaha,
2. Perbaikan Berkelanjutan,
3. Kepemimpinan Strategis,
4. Pandangan Jangka Panjang,



5. Sistemik,
6. Kebijakan berbasis data,
7. Kebijakan berbasis ilmu dan
8. Manajemen berbasis nilai Islam. Serta fungsi organisasi Pondok Pesantren Modern Darussalam adalah sebagai pusat pengkaderan cendekiawan ulama (*center of excellences*), lembaga pendidikan pencetak sumber daya manusia (*human resource*), lembaga pemberdayaan masyarakat (*agent of development*), agen perubahan social (*agent of change*), dan pusat peradaban muslim di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kurikulum di Pondok Pesantren Modern Darussalam memiliki susunan seperangkat perencanaan dan media guna mengantar lembaga pondok pesantren dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkannya. Tujuan pendidikan yang dimaksud adalah untuk menunjang pertumbuhan peserta didik atau santri agar memperoleh kemampuan dalam memecahkan masalah di dalam kehidupan nyata dan tujuannya tidak mengarah kepada radikalisme berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan mengubah tatanan politik yang sudah mapandangan cara kekerasan.

Kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk mencegah adanya radikalisme terprogramkan secara berkelanjutan dengan bekerja sama dengan aparat pemerintah. Hal ini tentunya bernilai positif untuk memberikan pembelajaran bagi santri untuk mencintai tanah airnya sekaligus menekan dan mencegah masuknya paham radikalisme di Pondok Pesantren Modern Darussalam

## DAFTAR PUSTAKA

Crow and Crow. 1990. Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Rake Sarasin

Muhammad Ali Khalil. Qamus Tarbiyah, English-Arab. Beirut: Dar al-Ilmal-Maliyyin, tp, th

M. Arifin. 1993. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

*Upaya Pondok Pesantren Dalam Pencegahan Radikalisme Agama  
(Transformasi Kurikulum Di Pondok Pesantren Modern Darussalam  
Kepahiang Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme*  
**Anang Mustaqim**



- Nuhrison M.Nuh. 2010. Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- R. Soogarda Poerbakawatja dan AH. Harahap. 1982. Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung
- Sahal Mahfudh. 1999. Pesantren Mencari Makna, vol.1. Jakarta: Fatma Press
- Syamsul Ma'arif, 2006. Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan), Disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam di Lembang Bandung tanggal 26- 30 November 2006
- UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



## KRITIK PHENOMENOLOGIS TEOLOGI KENABIAN AHMADIYAH DAN GERAKANNYA DI INDONESIA

HERAWATI

### *Abstract*

*The advancement of Ahmad's thoughts showed in his debate conversancy towards Ulamas and Muslim saints alongwith his papers. Many of his followers disseminated Ahmadiyah's teaching until now. Ahmadiyah movement in Indonesia had been become thorn in muslim community due to some divergences in term of Aqidah in Islam. The debates were on prophetic, death of Isa Al-Masih, birth of Al-Mahdi and reception of revelation. The existence of Ahmadiyah considered either against Islam or social conflict contribution. The divergence had led to social discrimination but radical flow. The renewal thought of Ahmadiyah urged to conduct on reasons of conflict reconciliation and philosophical thought of Ahmad.*

**Keywords:** *Theology, prophetic, Ahmadiyah, movement.*

### Abstrak

Berkembangnya pemikiran Mirza Gulam Ahmad adalah karena kemahirannya dalam berdebat dengan banyak ulama dan tokoh-tokoh agama lain serta tulisan-tulisannya. Sehingga ia memiliki banyak pengikut yang turut menyebarkan paham Ahmadiyah hingga sekarang. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia dianggap menjadi duri dalam tubuh komunitas Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan paham dalam beberapa hal terutama terkait dengan persoalan akidah dalam Islam. Terutama soal kenabian, kematian Isa al-masih, kelahiran Al-Mahdi dan penerimaan wahyu. Teologi Ahmadiyah tidak hanya dianggap bertentangan dengan Islam tetapi eksistensinya juga berakibat pada konflik sosial yang meresahkan. Akibat perbedaan itu, komunitas ini mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat sekitar bahkan di klaim sebagai aliran radikal. Perlu



adanya langkah *tajdid* dalam Ahmadiyah meskipun Ahmadiyah sendiri adalah gerakan *tajdid*. Langkah *tajdid* ini merupakan upaya untuk rekonsiliasi konflik sosial dan pengembangan filosofis pemikiran Mirza Gulam Ahmad yang relevan dengan Islam.

**Kata Kunci: teologi, kenabian, Ahmadiyah, gerakan.**

## PENDAHULUAN

Aliran Ahmadiyah yang telah lama hadir di Indonesia menjadi kelompok yang terkucilkan di masyarakat. Terlebih pasca pernyataan MUI bahwa aliran ini sesat. Kelompok ini tak jauh beda nasibnya dengan kelompok Syiah yang juga sering kali mendapatkan perlakuan negatif dari masyarakat. Sayangnya kebanyakan mereka adalah berstatus ekonomi menengah ke bawah. Sehingga perlakuan diskriminatif masyarakat menambah kesengsaraan hidup mereka. Terlebih mereka juga lebih memilih hidup secara komunal dan tidak mau berbaur dengan masyarakat lain. Hal ini menambah kesan kecurigaan dan prasangka buruk terhadap kelompok Ahmadiyah maupun Syiah.

Bermula dari berdirinya kerajaan Mughal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa selama tiga abad di India yang berpusat di kota Delhi dan didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1256 M telah mendatangkan keragaman budaya dan peradaban bagi negara India dan tercatat dalam sejarah sebagai pionir perubahan di India.<sup>1</sup> Sebagai pemegang tempat kekuasaan saat itu mulai mengalami guncangan dan diambang kehancuran. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya kekuatan pemerintah karena faktor dekadensi moral dan pola hidup mewah para pejabat pemerintah, khususnya pasca Raja Aurangzeb; <sup>2</sup> dan banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama seperti Guru Tegh Badhur, Guru

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 14

<sup>2</sup> Iskandar Zulkarnaen, *Ahmadiyah di Indonesia: Sebuah Titik Yang Dilupa*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2001), h. 47.



Gobin Singh (*Sikh*) dan Raja Udaipur dan Sivaji (Hindu).<sup>3</sup> Pemberontakan ini menyebabkan stabilitas negara rapuh. Selain itu adanya campur tangan Inggris yang datang ke India sejak abad ke-15 M, khususnya pascarevolusi India atau yang dikenal dengan pemberontakan *Munity* tahun 1957 M yang berakhir dengan kemenangan Inggris atau *East India Company*. Sejak saat itu India menjadi salah satu negara kolonial Inggris terpenting di dunia.<sup>4</sup>

Beberapa tahun menjelang kelahiran Gulam Ahmad terjadi berbagai masalah yang mengganggu stabilitas sosial di India. Beberapa masalah tersebut antara lain, *pertama* gencarnya kristenisasi di seluruh dunia khususnya pada tahun 1804 M setelah dibentuknya *British Bible Society* dan pada rentang tahun 1814–1815 M hingga abad ini ditetapkan sebagai abad penginjilan Agung (*The Great Century of World Evangelization*) yang menyebabkan jutaan orang India masuk menjadi Kristen.<sup>5</sup> *Kedua*, banyaknya bermunculan kelompok yang menamakan *neo Hindu* seperti sekte Arya Samaj yang paling militan dan agresif. *Ketiga* moral dan intelektual umat Islam di India pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kebiasaan umat Islam pada waktu itu banyak yang meminum khamr, mengisap candu, pergi ke tempat pelacuran, malas masuk masjid dan perpecahan sesama kelompok umat Islam.<sup>6</sup>

Fenomena teologi kenabian Ahmadiyah menjadi perdebatan penting penting sepanjang sejarah karena dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Perdebatan ini pula yang belakangan menyebabkan terjadinya diskriminasi dan bahkan pembakaran masjid Ahmadiyah di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas secara kritis fenomena teologi kenabian Ahmadiyah dan gerakannya di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1978), h. 87-88.

<sup>4</sup> Iskandar Zurkarnaen, *Ahmadiyah di Indonesia*, h. 48-50.

<sup>5</sup> A.R.Dard, *Life of Ahmad: The Founder Of Ahmadiya Movement*, (Lahore: Tabshir Publication, 1948), h. 24.

<sup>6</sup> Mirza Gulam Ahmad, *Kemenangan Islam*, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1959), h. 12



### Lahirnya Ahmadiyah

Gulam Ahmad dilahirkan tepatnya tanggal 13 Februari 1835 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1250H di dusun Qadian. Ia memiliki kembaran perempuan yang kemudian meninggal dunia. Qadian adalah nama sebuah desa yang sekitar 36 Km dari kota Amristar salah satu provinsi di Punjab atau sekitar 57 Km Timur laut kota Lahore. Kata "qadian" adalah nama yang diambil dari silsilah Mirza Gulam Ahmad yang bernama Mirza Hadi Beg yang diangkat sebagai *Qadhi* yaitu hakim oleh pemerintah pusat Delhi. Pada awalnya desa tersebut bernama Islampur Qadhi kemudian Qadhinya dihilang dan hanya tersisa "Islampur." Namun karena faktor pengangkatan Qadhi tersebut lambat laun nama *Islampur* nya hilang dan tinggal *Qadhi* yang kemudian berubah menjadi Qadian.<sup>7</sup> Sebenarnya nama asli Mirza adalah *Gulam Ahmad* sementara kata *Mirza* melambangkan keturunan *Moghul* dan sebutan *Gulam* adalah melambangkan marga keluarga. Kebiasaan Gulam Ahmad adalah suka menggunakan nama *Ahmad* bagi dirinya secara ringkas. Panggilan Ahmad ini pula diyakini sebagai nama yang sering dipanggil oleh Allah Swt ketika Mirza Gulam Ahmad menerima ilham-ilham dari-Nya sehingga Mirza Gulam Ahmad lebih senang kalau orang memanggilnya dengan nama tersebut. Bagi Jemaat Ahmadiyah kelahiran Mirza Gulam Ahmad dalam keadaan kembar merupakan bukti nyata dan berita yang sempurna dari kabar gaib yang tertera dalam kitab agama Islam bahwasanya Imam Mahdi akan lahir kembar. Gulam Ahmad merupakan anak kedua dari Gulam Murtada kakaknya bernama Gulam Qadir.<sup>8</sup>

Ayah Gulam Ahmad bernama Mirza Gulam Murtada seorang tabib. Sementara kakeknya bernama Mirza Atha' Muhammad ibn Mirza Gul Muhammad seorang tokoh terkenal dari keturunan bangsawan di daerahnya. Jika dirunut dari silsilah keluarganya kakeknya adalah keturunan Haji Barlas. Haji Barlas adalah seorang raja di kawasan Qesh yang merupakan paman *Amir Tughlak Temur*. Pada waktu Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khurasan dan Samarkand kemudian

---

<sup>7</sup> Asep Burhanuddin, *Gulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 32.

<sup>8</sup> Saleh A.Nahdi, *Sejumlah Riwayat Dan Mukjizat Pendiri Ahmadiyah*, (Jakarta: Raja Pena, 2001), h.4.



menetap di sana. Pada abad 10 H atau 16 M seorang keturunan Haji Barlas bernama *Mirza Hadi Beg* berserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khurasan ke daerah Gurdashpur di Punjab, India.<sup>9</sup>

Pada tahun 1891 Mirza Gulam Ahmad mengaku mendapatkan ilham dari Allah tentang wafatnya Nabi Isa yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Allah kemudian mengirimkannya sebagai pengganti Nabi Isa. Pengakuan ini mendapatkan respon dari masyarakat muslim India, salah satunya dari Nazir Hussain, seorang ahli hadits. Kemudian keduanya berjanji melakukan perdebatan ilmiah. Tentang dua keyakinan ini. Sayangnya perdebatan itu urung diselenggarakan karena keributan dan kekacauan terjadi. Pada tanggal 20 Juli 1891 Mirza Gulam berdebat dengan Nazir Hussain, murid dari Muhammad Hussein Batalwi di Ludhiana, India, yang dimulai pada.

Dalam perdebatan tersebut Mirza Gulam Ahmad bersedia untuk membatalkan pengakuan sebagai Mesias yang dijanjikan jika Muhammad Hussein Batlwi bisa membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit. Namun hal ini tidak dapat dilakukan. Setelah 12 hari perdebatan dilakukan, kedua belah pihak dipertahankan pendapat mereka sendiri dan satu sama lain menyalahkan opini lawan. Sejak saat itu pula Mirza Gulam Ahmad mendapatkan pengikut dan mulai mengembangkan pemikirannya di India.

### **Teologi Kenabian Mirza Gulam Ahmad menurut kajian Teologi Islam**

Masalah teologi kenabian Mirza Gulam Ahmad ada perbedaan baik dari segi definisi kenabian maupun dalam mengartikan ayat Alquran yang terkait dengan kenabian. Dalam masalah kenabian bagi Mirza Gulam Ahmad dan Ahmadiyah dalam mendefinisikan kenabian berbeda yang dipahami secara umum

---

<sup>9</sup> Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Gulam Ahmad*, (Bogor: Jamaah Ahmadiyah, t.t.), h. 2. Lihat juga Spencer Lavan, *The Ahmadiyah Movement: A History and Perspective*, (New Delhi: Manohar Book Service, 1973), h. 22-23



terutama Ahlussunnah. Menurut Mirza Gulam Ahmad dan Ahmadiyah defenisi Nabi adalah laki-laki balig, berbudi pekerti baik yang kepadanya diturunkan wahyu. Jika wahyunya mengandung hukum-hukum atau undang-undang baru yang belum ada pada syariat sebelumnya, ia namakan Nabi membawa syariat baru dan jika wahyunya mengulang atau menguatkan wahyu kitab yang sebelumnya saja dan tidak menambah atau mengurangnya maka Nabi yang demikian dinamakan Nabi pembantu.<sup>10</sup> Selian itu mereka juga meyakini bahwa Nabi yang membawa syariat disebut Nabi Tasyri pada jenis ini contohnya kita dapati seperti Nabi Musa a.s dan Nabi Muhammad saw. Lalu ada pula Nabi yang tidak membawa syariat yang disebut Nabi *Gairu Tasyri'* contohnya seperti Nabi Ismail a.s dan Nabi Harun a.s. Nabi *Gairu Tasyri'* ini terbagi atas nabi yang tidak terikat dengan nabi sebelumnya dan Nabi yang terikat atau pengikut nabi sebelumnya yang membawa syariat.

Menurut Alquran, kenabian yang terikat atau pengikut nabi sebelumnya yang membawa syariat masih tetap ada. Ada begitu banyak ayat Alquran yang mendukung pemahaman tersebut contohnya:

*"Barangsiapa yang ta'at kepada Allah Taala dan Rasul-Nya (Muhammad saw), maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat yaitu Nabi-nabi, Siddiq-siddiq, Syahid-syahid dan Solihin-solihin".*<sup>11</sup>

Berbeda dengan Mirza Gulam Ahmad, Ahlusunnah wal jamaah mendefinisikan bahwa Nabi adalah seorang laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan hukum syarah untuk diamalkan sendiri. Sedangkan Rasul Allah adalah seseorang laki-laki yang merdeka yang mendapatkan wahyu Allah dengan hukum syarah untuk diamalkan sendiri serta disebarkan ke umatnya.

*"Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu*

---

<sup>10</sup> Ahmad Nurdi, *Masalah Kenabian*, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1987), h. 4

<sup>11</sup> Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Mengenai Kenabian*, (Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Artikel, 1999),



tiada mengetahui." (Q.S Al-Anbiya' [21] : 7).<sup>12</sup>

Perbedaan lain antara Gulam Ahmad dengan Ahlussunnah ada dalam penafsiran tentang kenabian. Mirza Gulam Ahmad serta Ahmadiyah meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad saw walaupun tetap mengakui Nabi Muhammad Saw.<sup>13</sup> Mirza Gulam Ahmad mendasari pendapatnya pada ayat Alquran menyebut adalah firman Allah Swt:

*"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu."* (Q.S Al-Ahzab [33] : 40).<sup>14</sup>

Mirza Gulam Ahmad mengartikan ayat tersebut sebagai berikut:

- Lafaz ختم dibaca dengan tanda kasrah pada huruf ت berarti stempel dan bukan berarti menutup dan stempel dipergunakan untuk mengabsahkan sesuatu. Berarti, ayat itu khusus kepada Nabi Muhammad saw adalah stempel bagi para Nabi.<sup>15</sup>
- Sesungguhnya "Al-Khatam" tersebut diartikan bukan "terakhir" akan tetapi artinya adalah "lebih utama" maka pengertian ayat menjadi: "Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang lelaki diantara kalian akan tetapi ia adalah utusan Allah dan Nabi yang paling utama" bukan artinya kenabian itu sudah terhenti dengan kenabian Beliau.
- Pengertian dari "An-Nabiyin" adalah "pandai atau cerdas" berarti artinya ia manusia yang pandai dan dengan kepandaianya ia menjadi Nabi.
- Sedangkan pengertian dari "An-Nabiyin" ialah para nabi-nabi yang membawa syariat baru yaitu bahwa Nabi Muhammad saw ialah penutup bagi nabi-nabi yang membawa syariat

---

<sup>12</sup> Muhammad Ahmad, *Tauhid Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 81

<sup>13</sup> Abdul Basit, *Wahyu Ilahi*, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008), h. 17.

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Ahmadiyah*, (Bogor: Artikel, 2006), h. 7.

<sup>15</sup> Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Da'watul Amir: Seruan Kepada Kebenaran*, (Jakarta: Majelis Ansharullah, 2006), h. 47



seperti Harun bagi Musa a.s.<sup>16</sup>

Sedangkan *Ahlussunnah Wal Jamaah* meyakini Nabi Muhammad saw adalah “penutup para Nabi” itu disebut dan ditafsirkan oleh para imam ahli tafsir:

1. Tafsir Ibnu Katsir. “Ayat yang menyatakan dengan terang, bahwa Nabi tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad saw. Begitu juga Rasul, lebih-lebih tidak ada lagi.
2. Hal yang sama juga ditegaskan dalam tafsir Jalalain.<sup>17</sup>
3. Imam Abu Hayyan menjelaskan, “Jumhur ulama tafsir membaca “*Khatim*” yang artinya bahwa beliau menutup para Nabi yaitu yang datang terakhir, dan ‘Ashim membacanya “*Khatam*” yang artinya bahwa para Nabi ditutup dengan kenabian Muhammad saw”. “Barangsiapa menyebutkan bahwa kenabian bisa diusahakan dan tidak terhenti atau mengatakan bahwa wali lebih afdhal dari Nabi maka ia zindiq yang wajib dibunuh”.<sup>18</sup>
4. Imam Qurṭuby menguraikan, “Cuma *ashim* saja yang membaca “*Khatam An-Nabiyyin*” yang artinya bahwa para Nabi ditutup dengan kenabian Muhammad saw. Sehingga sudah tertutup. Sementara ahli *qira’at* membacanya *Khatim An-Nabiyyin* yang artinya Nabi yang datang paling akhir. Ada pula yang mengatakan bahwa kata *Al-Khatim* dan *Al-Khatam* adalah dua bahasa yang berbeda”. (Tafsir Qurṭuby).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut ulama Ahli Bahasa Arab, yaitu Ibnu Manzur Al-Ifriqiy Al-Miṣry tentang pendapat beliau yang dijelaskan secara rinci dalam lafaz “*Al-Khatam*”. Beliau menguraikan, “*Khatam*” segala sesuatu artinya ialah penutupnya dan akibat dari sesuatu ialah akhirnya, lafaz aku meng*khatam*kan sesuatu merupakan lawan kata dari aku membukanya, “*Khatimatussurah*” artinya adalah akhir surat. *Khatamul Qaum* adalah yang menutup kaum tersebut dan *khatam*

---

<sup>16</sup> Ihsan Ilahi Dzahir, *Ahmadiyah Qodianiyyah Sebuah Kajian Analisis*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Diklat, 2008), h. 203

<sup>17</sup> Sirajuddin Abbad, *I’tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, Cet. 8, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), h. 396. Lihat tafsir Ibnu KaṢir, pada jilid III, pagina 493 dan Lihat Juga, Tafsir Shawi jilid III pagina 263.

<sup>18</sup> Ihsan Ilahi Žahir, *Ahmadiyah Qodianiyyah*, h. 205, lihat juga, Tafsir Al-Bahr Al-Muhith, karya Abu Hayyan, juz 7, h. 236.



suatu kaum adalah yang terakhir dari suatu kaum. Dari Al-Lihyani ia menjelaskan, "Muhammad itu ialah penutup para Nabi" dan dari At-TahZib, *Al-Khatim* dan *Al-Khatam* ialah bagian dari nama-nama Nabi Muhammad saw. Terdapat didalam Alquran dijelaskan yang artinya: "Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang lelaki diantara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan *Khatam Nabiiyyin* yaitu Nabi terakhir".<sup>20</sup> Kalau diteliti dari ayat di atas paling kuat dan jelas pengertiannya, tidak memerlukan pentakwilan dan penjelasan lebih lanjut, serta dapat difahami oleh orang yang mengerti sedikit saja tentang bahasa Arab, bahwasanya tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad Saw. Apabila pemilihan arti "yang terakhir" ialah bertentangan dengan kaidah bahasa Arab dan juga pendapat para tafsir, ijma yaitu kesepakatan umat, serta nash-nash dari Alquran dan al-Hadis.

Perbedaan lainnya adalah penafsiran hadits Nabi Saw tentang nabi terakhir. Teologi kenabian Mirza Gulam Ahmad ini bermula dari doktrin kewahyuaannya. Hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang diyakini kelompok Syiah. Bedanya, Syiah Itsna Asyariyyah didorong oleh motif politis, sedangkan gerakan Mirza Gulam Ahmadiyah dan pengikutnya Ahmadiyah, ditandai oleh motif pembaharuannya. Kalau Syiah bermuara pada masalah keimanan, Ahmadiyah bermuara pada masalah kemahdian atau kemasihan. Pun keduanya beranggapan bahkan berkeyakinan untuk membimbing umat manusia saat ini masih diperlukan wahyu Allah. Term wahyu yang dimaksud oleh kedua golongan itu, bukanlah wahyu seperti yang dalam Alquran, tetapi wahyu yang lain. Di kalangan Syiah dikema *wahyu ta'lim*, sedangkan di kalangan Ahmadiyah dikenal dengan *wahyu walayah*, *wahyu tajdid* atau *wahyu muhaddas*. Baik kaum Syiah maupun Ahmadiyah, keduanya memiliki tokoh-tokoh utamanya yang dikenal sebagai al-Mahdi yang merupakan tokoh legendaris yang dapat berhubungan dengan Tuhan, untuk menerima firman-firman-Nya<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, *Da'watul Amir*, terj. Sayyid Syah Muhammad Al-Jaelani & R.Ahmad Anwar, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2007), h. 340. Muslih Fa'oni, *Paham Mahdi Syiah Dan Ahmadiyah Dalam Perspektif*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 124-129.



## Gerakan Ahmadiyah di Indonesia

Berdasarkan Hadits sahih bahwa Allah SWT pada tiap-tiap permulaan abad membangkitkan seorang *Mujaddid* atau orang yang memperbaharui agama di dalam Islam. Pembaharuan mereka itulah yang disebut gerakan pembaharuan di dalam Islam.

Ahmadiyah berjuang hanya untuk membela dan menyiarkan Islam melalui lima cabang kegiatan dakwah Islam yang telah digariskan oleh *Mujaddid* dalam kitab *Fathi Islam* (1893), yaitu: 1) Menyusun karangan-karangan atau buku-buku dan menerbitkannya, 2). Menyiarkan brosur-brosur dan maklumat-maklumat yang dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi, 3) Komunikasi langsung dengan kunjung-mengunjungi, mengadakan ceramah-ceramah dan majelis taklim, 4) Korespondensi dengan mereka yang mencari atau menolak kebenaran Islam, dan 5) Bai'at.

Beberapa pokok yang menjadi kekuatan Ahmadiyah dalam gerakannya adalah:

- 1) adanya kesatuan Islam, siapa saja yang menjunjung syahadat tetap Muslim, bukan kafir,
- 2) Pemahaman Islam amat luas, Islam mengakui bahwa semua agama itu pokok aslinya dari Allah,
- 3) Islam itu sempurna, semua bentuk agama yang tak sempurna pasti akan menyingkir,
- 4) Memudahkan Qur'an, semua orang Islam dapat memahami dan menerangkannya,
- 5) Qur'an itu genap dan lengkap, tak ada dan tak akan ada ayatnya yang mansukh (dihapus),
- 6) Ruh Qur'an Suci itu amat kuasa, kuasa ruh Qur'an Suci dapat dan selalu dapat menaklukkan dunia, tanpa membutuhkan pertolongan pedang,
- 7) Nabi Muhammad saw. adalah Nabi terakhir, sesudah beliau tak ada dan tak akan datang Nabi lagi, baik Nabi lama atau Nabi baru,
- 8) Kesempurnaan Kenabian ada pada diri Nabi Muhammad saw., oleh sebab itu para pengikutnya mendapat rahmat Ilahi yang lebih tinggi daripada umat sebelumnya,
- 9) Membersihkan semua kesalahan yang masuk dalam umat Islam, teristimewa Kependetaan (Kerahiban),



- 10) Mendatangkan perintah Islam yang maha besar kepada sekalian umat di dunia. Menyiarkan pengertian yang benar tentang Qur'an Suci.

Pemikiran tajdid Mirza Gulam Ahmad terus berkembang di Indonesia dengan beberapa pokok tajdid yang mengalami perubahan dari yang aslinya. Beberapa pokok aqidah dari Ahmadiyah yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan percaya semua perkara agama yang telah disetujui oleh para Ulama Salaf dan Ahli Sunnah wal Jama'ah. Dan yakin bahwa Nabi Muhammad saw. adalah Nabi yang terakhir.
2. Nabi Muhammad saw. adalah *khatamun nabiyyin*. Sesudah beliau tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru.
3. Sesudah Nabi Muhammad saw. Malaikat Jibril tidak akan membawa *wahyu nubuwwat* kepada siapa pun.
4. Apabila Malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: "*Walaakin rasuulullaahi wa khaataman-nabiyyiin*" (Qur'an Suci 33:40), dan berarti membuka *khatamun nubuwwat*.
5. Sesudah Nabi Muhammad saw. silsilah wahyu Nubuwwat telah tertutup, akan tetapi silsilah wahyu Walayat tetap terbuka, agar iman dan akhlaq umat tetap segar.
6. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa di dalam umat ini tetap akan datang Auliya Allah, para Mujaddid, dan para Muhaddats, akan tetapi tidak akan datang nabi.
7. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Mujaddid abad 19 H. Dan menurut Hadits, mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan nabi, hanya berkedudukan sebagai mujaddid.
8. Percaya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan bagian dari Rukun Islam dan Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir.
9. Seorang muslim, apabila mengucapkan *kalimah thayyibah*, dia tidak boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir.



10. Kami berpendapat bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai pelayan dan misi Nabi Muhammad saw.

### Diskusi

Teologi kenabian Ahmadiyah merupakan perkembangan dari pemahaman penafsiran ayat Al-Qur'an terkait *khatamu nabiyyin*. Penafsiran yang luas bahwa adanya penerus Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai nabi pembantu serta adanya wahyu walayat kepada nabi pembantu dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah menjadi perdebatan yang serius. Karena dianggap bertentangan dengan Aqidah Islamiyah. Berbeda pandangan dengan *ahlussunnah* yang menafsirkan bahwa *khatamu nabiyyin* adalah tidak ada lagi nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an adalah wahyu terakhir, sementara Ahmadiyah memandang masih dibukanya pintu kenabian setelah Muhammad yang berperan sebagai nabi pembantu untuk memperkuat ajaran Muhammad SAW dan mengembalikan ummat ke jalan yang benar. *Khatamu nabiyyin* dipahami sebagai pelabelan dan gelar untuk para ulama yang mendapatkan wahyu walayat dan menjalankan tugas dakwah Islam.

Menurut hemat penulis, *tajdid* dan *ijtihad* dalam pemahaman Islam yang begitu luas tentunya ada rambu-rambu dan batasan-batasan yang telah digarisbesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika upaya *tajdid* dan *ijtihad* tersebut melampaui batasannya maka akan menimbulkan perdebatan yang tidak jarang juga mengakibatkan konflik sosial di masyarakat. Ketika terjadi konflik sosial terhadap komunitas minor inilah yang menyebabkan timbulnya perlakuan diskriminatif. Sikap radikal dari komunitas minor merupakan respon alami manusia ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Kritik fenomenologis terhadap Teologi Ahmadiyah mengungkap fakta sosial masyarakat beragama dan para penganut Ahmadiyah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas.

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat adanya pergeseran dalam paham gerakan Ahmadiyah di Indonesia yang semakin meluas dan berkamufase dalam ajaran *ahlussunnah*. Radikalisme para pengikutnya dalam menyebarkan ajaran Ahmadiyah semakin terbuka dan melebur dalam pemahaman *ahlussunnah*. Adanya



langkah tajdid dalam tubuh Ahmadiyah sendiri merupakan bentuk dari salah satu deredikalisasi teologi.

Upaya ini disenarai sebagai salah satu upaya mengatasi konflik sosial yang ada di masyarakat pasca penetapan MUI bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat di Indonesia. Akan tetapi tetap saja meski isinya diganti namun tampilan depannya tetap sama maka, masyarakat luas tetap akan berkesimpulan *al-ashlu baqa' maa kaana 'ala maa kaana* (segala sesuatu tetap sesuai dengan aslinya meskipun secara lahiriyah ia berubah-ubah). Ibarat sudah terlanjur di cap sesat, maka masyarakat luas berkesimpulan selalu sesat meskipun sudah ada tajdid dalam tubuh Ahmadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Fajar Kurniawan, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*, Cet. 1, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2006.
- A.R.Dard, *Life of Ahmad: The Founder Of Ahmadiya Movement*, Lahore: Tabshir Publication, 1948.
- A.Yogaswara, *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiya Tidak Langsung Dibubarkan?*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Da'watul Amir*, terj. Sayyid Syah Muhammad Al-Jaelani & R.Ahmad Anwar, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2007.
- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Gulam Ahmad*, Bogor: Jamaah Ahmadiyah, t.t.
- Ahmad, Mirza Gulam, *Itmāmūl Hujjah `Alal Laẓī Lajja wa Zāgha `Anil Maḥjjah*, Lahore: Maṭba` Kalzar Muḥammadī, 1311 H.
- Ahmad, Mirza Gulam, *Kemenangan Islam*, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1959.
- Ahmad, Mirza Gulam, *Masih Hindustan Me*, terj. Ibnu Ilyas RIS, "Al-Masih di Hindustan", Cet. 2, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1998.
- Ahmad, Mirza Gulam, *Tauhid Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Djamaluddin, Amin. *Ahmadiyah dan Pembajakan Alquran*, Jakarta: LPPI, 2005. Burhanuddin, Asep. *Gulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LkiS, 2005.



- Basit, Abdul. *Wahyu Ilahi*, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008.
- Fadlan Kamali Batubara, *Dinamika Perkembangan Ahmadiyah Di Kota Medan*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat, 2015.
- Fathoni, Muslih, *Paham Mahdi Syi`ah Dan Ahmadiyah Dalam Perspektif*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, Jakarta: UI Press, 1978.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Harun Nasution, *Teologi Islam: Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. 5, Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Ibnu Manzur Al-Ifriqy Al-Miṣry, *Lafaz Al-Khatam*, juz 12, Beirut, t.p, t.t.
- Ihsan Ilahi Zahir, *Ahmadiyah Qodaniyah Sebuah Kajian Analisis*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Diklat, 2008.
- Iskandar Zulkarnaen, *Ahmadiyah di Indonesia: Sebuah Titik Yang Dilupa*, Jakarta: Pustaka Zaman, 2001.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Mengenai Kenabian*, Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Artikel, 1999.
- Majelis Ulama Indonesia, *Mengenai Dalil Kenabian*, Bogor: Artikel, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Ahmadiyah*, Bogor: Artikel, 2006.
- Nurdi, Ahmad. *Masalah Kenabian*, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1987.
- Wahid, Ramli Abdul, *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah*, Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Siradj, Said Aqil, *Adakah Nabi Pasca Muhammad SAW*, Cet. 1, Jakarta: Lembaga Bahtusul Masail Nahdlatul Ulama, 2010.
- Saleh A.Nahdi, *Sejumptut Riwayat Dan Mukjizat Pendiri Ahmadiyah*, Jakarta: Raja Pena, 2001. Sirajuddin Abbad, *I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, Cet. 8, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.
- Spencer Lavan, *The Ahmadiyah Movement: A History and Perpective*, New Delhi: Manohar Book Service, 1973.
- Syafi R.Batuah, *Ahmadiyah Apa dan Mengapa*, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1985



## PROBLEMATIKA PEMAHAMAN ISLAM TANPA SANAD

IWAN KURNIAWAN. ZP

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan memahami tentang problematika pemahaman Islam tanpa *sanad*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan kajian pustaka dengan cara menganalisis paparan dari beberapa atrikel dan konteks kekinian yang bertemakan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika memahami Islam tanpa adanya landasan yang kuat. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa munculnya pengaruh ideologi yang salah dalam konteks keagamaan, khususnya Islam saat ini telah banyak menumbuhkan pemahaman dan sekte yang bervariasi. Terlebih lagi, pemahaman tersebut dapat menyebar dengan cepat, dan memunculkan golongan yang menganggap dirinya paling benar. Diantara penyebab munculnya kelompok tersebut adalah karena pemahaman tentang Islam yang diterima secara *instant*, yang tidak memiliki landasan yang kuat, dan bahkan tidak ber-*sanad*. Tidak dapat dipungkiri, hal ini telah merasuki dunia akademisi. Karena, ilmu Agama juga mengandung relativitas di dalamnya seperti halnya ilmu sosial. Meski kebenaran Agama bersifat mutlak dan transendental di luar jangkauan akal manusia, tapi ketika dikaji, ia mengikuti prosedur nalar yang juga relatif.

**Kata kunci:** Pemahaman Islam, Tanpa *Sanad*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, Kita dihadapkan pada kondisi dimana banyaknya pemaham baru dalam ber-Islam. Sebenarnya pemahaman baru dalam ber-Islam sudah ada sejak lama, namun akhir-akhir ini kondisi itu semakin mengkhawatirkan, dimana pelakunya tidak hanya dari kalangan awam, bahkan sudah masuk pada ranah kalangan akademisi. Hal tersebut diperparah dengan adanya sikap fanatisme terhadap golongan tertentu, yang mengakibatkan ummat semakin tersekat-sekat didalam Islam yang secara otomatis akan merusak *Al-Ukhuwwah Al-Islamiyyah* yang telah diajarkan Nabi sejak lama. Lebih



jauh, beberapa sekte didalam Islam justru menganggap saudara muslimnya menjadi kafir dikarenakan sesuatu yang masih dalam lingkup ranah *Khilafiyah*, dan tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW., yang mana ketika membahas Islam maka akan ada tiga tema utama yang muncul, yakni Akidah, Syari'ah, dan Akhlak, dan kesemua itu saling berkaitan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah apa itu *sanad*?, mengapa *sanad* penting?, dan apa pengaruhnya jika memahami Islam tanpa *sanad*?. Adapun tujuannya adalah menjelaskan tentang *sanad*, urgensi dari adanya *sanad*, dan mengetahui pengaruh jika memahami Islam tanpa *sanad*.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan kajian pustaka dengan cara menganalisis paparan dari beberapa artikel dan melihat dari konteks kekinian bertemakan pengaruh dari munculnya pemahaman terhadap Agama Islam dengan tanpa adanya landasan yang kuat. Seperti yang Kita ketahui, bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, serta melakukan analisa terhadap laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka lainnya yang memuat tentang teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan bagian penting dari keseluruhan metode sebuah penelitian. Selanjutnya Cooper dalam Creswell mengatakan bahwa kajian pustaka mempunyai beberapa tujuan yaitu; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan inilah sebabnya peneliti melihat bahwa kajian pustaka menjadi metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian kali ini.

## HASIL

Kata "*Sanad*" menurut bahasa adalah "sandaran" atau sesuatu yang Kita jadikan sandaran. Istilah *Sanad* biasa digunakan dalam Hadits. Namun tidak menutup kemungkinan ia juga bisa digunakan dalam bidang ilmu lainnya. Munculnya pengaruh ideologi yang salah



dalam konteks keagamaan, khususnya Islam saat ini telah banyak menumbuhkan pemahaman dan sekte yang bervariasi. Terlebih lagi, pemahaman tersebut dapat menyebar dengan cepat, dan memunculkan golongan yang menganggap dirinya paling benar. Diantara penyebab munculnya kelompok tersebut adalah karena pemahaman tentang Islam yang diterima secara *instant*, yang tidak memiliki landasan yang kuat, dan bahkan tidak ber-*sanad*. Tidak dapat dipungkiri, hal ini telah merasuki dunia akademisi. Karena, ilmu Agama juga mengandung relativitas di dalamnya seperti halnya ilmu sosial. Meski kebenaran Agama bersifat mutlak dan transendental di luar jangkauan akal manusia, tapi ketika dikaji, ia mengikuti prosedur nalar yang juga relatif.

## PEMBAHASAN

Pada konteks kekinian, tidak jarang Kita jumpai beberapa fenomena dalam beragama yang dipengaruhi pola pikir yang salah dalam memahaminya, sehingga memunculkan pengaruh pada tatanan sosial masyarakat, serta menumbuhkan bibit sekte-sekte yang ekstrim, dan mengedepankan sifat fanatisme. Diantara penyebab munculnya kelompok tersebut adalah karena pemahaman tentang Islam yang diterima secara *instant*, yang tidak memiliki landasan yang kuat, dan bahkan tidak ber-*sanad*. Tidak dapat dipungkiri, hal ini telah merasuki dunia akademisi, yang mana mereka seharusnya menjadi contoh, dan menjadi filter terhadap pemahaman keilmuan yang salah, dan menemukan kebenaran dalam proses pendidikannya, namun kondisinya justru terbalik di beberapa tempat. Sehingga perlunya eksistensi *Sanad* agar diposisikan utama dalam setiap pembelajaran, khususnya dalam konsentrasi bidang Agama Islam.

Kata "*Sanad*" menurut bahasa adalah "sandaran" atau sesuatu yang Kita jadikan sandaran. Istilah *Sanad* biasa digunakan dalam Hadits. Namun tidak menutup kemungkinan ia juga bisa digunakan dalam bidang ilmu lainnya. Ibnu Mubaarok berkata:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ



Artinya:

*"Isnad adalah bagian dari Agama, kalau bukan karena isnad maka setiap orang yang berkeinginan akan mengucapkan apa yang ia kehendaki"*

Dalam bidang keilmuan kontemporer, kemajuan teknologi mengambil perannya tersendiri dalam sumbangsih memajukan dunia kependidikan, dimana setiap orang dapat mengambil ilmu yang diambilnya menggunakan perantaraan teknologi, tak memandang apapun latar belakang yang dimilikinya. Tentu hal ini menjadi nilai positif bagi mereka yang mampu, dan menguasai teknologi, serta bisa melakukan penyesuaian diri terhadap kemajuan zaman. Tetapi tidak sedikit pula mereka yang justru tergelincir dengan adanya teknologi tersebut. Jika dikaji lebih dalam, maka peran sandaran keilmuan menjadi penting guna terhubungnya ilmu pengetahuan tersebut dengan sumbernya yang otentik, karena jika tanpa ada sumber yang jelas dari informasi yang didapatkan, maka bisa saja ilmu tersebut menyesatkan, bukan mencerahkan.

Ilmu Agama pun demikian, ia mengandung relativitas di dalamnya seperti halnya ilmu sosial. Meski kebenaran Agama bersifat mutlak dan transendental di luar jangkauan akal manusia, tapi ketika dikaji, ia mengikuti prosedur nalar yang juga relatif. Dalam Al-Quran disebutkan "Kebenaran (*Al-Haq*) adalah dari Tuhanmu maka janganlah kamu ragu". Larangan meragukan kebenaran yang datang dari Tuhan menunjukkan kebenaran mutlak ajaran Agama. Masalahnya, mereka yang meyakini ternyata beragama. Di dalam Islam ada banyak paham dan aliran dan bahkan pada doktrin *Tauhid* yang paling fundamental ternyata pandangan tentang sifat Tuhan tidaklah sama. Perbedaan itu terjadi lantaran perbedaan sudut pandang dan jangkauan nalar dalam menafsirkan teks terkait sifat Tuhan. Jadilah di sini, kebenaran Agama yang mutlak menjadi relatif pada tataran keilmuan. Sementara kemutlakan kebenarannya berada pada tataran keyakinan atau keimanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Murtafi Haris, "Mengapa Ekstremisme Bisa Muncul dari Akademisi Sains?", <https://www.nu.or.id/post/read/112395/mengapa-ekstremisme-bisa-muncul-dari-akademisi-sains->, (diakses pada 8 Juni 2020, pukul 00.04 AM).



Paham Radikalisme yang terjadi di masyarakat saat ini semakin terbuka, bahkan sudah semakin mudah tersebar. Terlebih lagi dengan adanya kasus Negara Islam Irak dan Syam/Syiria (ISIS) yang pahamnya juga mulai tersebar ke negara ASEAN. Mudah-mudahan paham radikalisme tersebut menyebar rupanya bukan hanya karena adanya faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Namun juga karena pengaruh dari perkembangan dunia internet, paham tersebut semakin mudah tersebar di dunia, termasuk ke negara-negara ASEAN. Paham Radikalisme yang menyebar dengan mudah hingga ke negara-negara ASEAN tersebut pun tak menutup kemungkinan akan mempengaruhi masa depan negara-negara ASEAN.<sup>2</sup>

Lingkungan keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman yang baik untuk generasi penerusnya, agar tidak salah dalam memilih langkah untuk mencari pemahamannya secara lebih luas dan bebas dan mandiri. Perlu adanya koridor-koridor yang dibangun dalam membentengi diri sebelum menerima dan mencerna informasi yang diterimanya, terkhusus dari hal yang diterimanya dengan perantaraan teknologi, karena setiap orang bisa saja menyampaikan informasi melalui media tersebut tanpa ada landasan yang benar, dan disinilah peran akal sehat yang dibangun lama untuk memfilter ilmu yang salah, agar generasi penerus bangsa dapat berkemajuan tidak hanya dalam urusan dunia, namun juga dalam urusan Agama.

## **KESIMPULAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi, maka tak bisa dipungkiri akan terjadinya arus globalisasi yang akan menyentuh berbagai macam kalangan masyarakat, dan aspek lini kehidupan. Termasuk didalamnya tentang munculnya

---

<sup>2</sup> BHP UMY, "[Paham Radikalisme Mudah Tersebar Karena Pengaruh Internet](https://www.omy.ac.id/paham-radikalisme-mudah-tersebar-karena-pengaruh-internet.html)", <https://www.omy.ac.id/paham-radikalisme-mudah-tersebar-karena-pengaruh-internet.html>, (diakses pada 8 Juni 2020, pukul 00.33 AM).



pengaruh ideologi yang salah dalam konteks keagamaan, khususnya Islam. Sehingga saat ini banyak bermunculan pemahaman dan sekte yang bervariasi dalam memahami Islam itu sendiri, dan parahnya lagi, pemahaman tersebut dapat menyebar dengan cepat, dan memunculkan golongan yang menganggap dirinya paling benar.

Diantara penyebab munculnya kelompok tersebut adalah karena pemahaman tentang Islam yang diterima secara *instant*, yang tidak memiliki landasan yang kuat, dan bahkan tidak ber-*sanad*. Tidak dapat dipungkiri, hal ini telah merasuki dunia akademisi. Karena, ilmu Agama pun demikian, ia mengandung relativitas di dalamnya seperti halnya ilmu sosial. Meski kebenaran Agama bersifat mutlak dan transendental di luar jangkauan akal manusia, tapi ketika dikaji, ia mengikuti prosedur nalar yang juga relatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Murtafi Haris, "Mengapa Ekstremisme Bisa Muncul dari Akademisi Sains?", <https://www.nu.or.id/post/read/112395/mengapa-ekstremisme-bisa-muncul-dari-akademisi-sains->, (diakses pada 8 Juni 2020, pukul 00.04 AM).
- BHP UMY, "[Paham Radikalisme Mudah Tersebar Karena Pengaruh Internet](https://www.omy.ac.id/paham-radikalisme-mudah-tersebar-karena-pengaruh-internet.html)", <https://www.omy.ac.id/paham-radikalisme-mudah-tersebar-karena-pengaruh-internet.html>, (diakses pada 8 Juni 2020, pukul 00.33 AM)



## **INDIKASI EKS-HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) PADA AKTIVIS KEGIATAN TARBIYAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN)**

**KURNIAWAN**

### **Abstrak**

Dalam perkembangannya di Indonesia, HTI dinilai menjadi gerakan politik yang berusaha mempengaruhi opini publik untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsep Khilafah. Pemerintah Republik Indonesia mewacanakan untuk membubarkan: Pertama; sebagai ormas berbadan hukum. Kedua; kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga; aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat. Fakta hukum telah memutuskan sejak 19 Juli 2017 status badan hukum HTI telah dicabut. Wacana keagamaan di kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini sebagian besar dikuasai oleh kelompok tarbiyah dan eks anggota organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertransformasi menjadi aktivis gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah sendiri adalah gerakan dakwah yang kerap dijumpai di kampus-kampus di Indonesia.

**Kata kunci:** Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tarbiyah

### **PENDAHULUAN**

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang 'Ulama berkebangsaan Palestina. HT Internasional berdiri pada tahun 1953 di Yordania.<sup>1</sup> Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki izin sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum Nomor : AHU-0028.60.10.2014., tentang pengesahan pendirian badan hukum

---

<sup>1</sup> Afadhal. dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI PRESS, 2005), h. 265.



perkumpulan HTI. Dalam perkembangannya di Indonesia, HTI dinilai menjadi gerakan politik yang berusaha mempengaruhi opini publik untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsep Khilafah.

Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia mewacanakan untuk membubarkan: **Pertama;** sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. **Kedua;** kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. **Ketiga;** aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dan keutuhan NKRI.<sup>2</sup>

Berbagai gerakan Islam yang giat memperjuangkan penegakan syariah Islam di Indonesia marak kembali pada era reformasi, setelah hampir 30 tahun mengalami mati suri akibat represi rezim ORBA. Perjuangan memberlakukan syariah Islam di Indonesia bukan barang baru lagi karena telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan pada sidang BPUPKI dan awal pemerintahan Sukarno di konstituante. Tuntutan semacam ini masih lantang disuarakan oleh sebagian umat Islam di awal pemerintahan Soeharto meskipun akhirnya harus tenggelam karena kebijakan Soeharto yang sangat represif dan militeristik terhadap umat Islam.

Era reformasi, yang ditandai dengan euphoria politik dan terbukanya kran-kran kebebasan berekspresi dimanfaatkan oleh berbagai gerakan Islam yang menuntut kembali penegakan syariah Islam. Aktor gerakan yang muncul pada masa ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Wasliyyah dan lainnya. Gerakan mereka berada di luar kerangka mainstream proses politik, maupun wacana dalam kelompok Islam dominan. Kelompok-kelompok HTI, MMI, FPI, dan Lasykar Jihad merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan

---

<sup>2</sup> Uus Uswatussholihah, Sangidun, *Interaksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesi Pasca Pembubaran*, (Jurnal Yinyang IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2018)



kelompok-kelompok Islam lama. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif. Hizbut Tahrir Indonesia, selanjutnya disingkat HTI adalah yang paling solid dan memiliki jaringan paling luas (internasional) di antara gerakan-gerakan baru yang giat menegakkan syariah Islam tersebut. Bahkan, HTI juga yang paling radikal, dalam arti, HTI tidak hanya bercita-cita menegakkan syariah Islam tapi juga mendirikan Khilafah Islam. Menurut HTI penegakan syariah Islam secara total (kaffah) hanya dapat diwujudkan dalam kerangka negara khilafah Islam, bukan dalam sistem kerajaan, parlementer, federal, imperium ataupun NKRI.<sup>3</sup>

Cita-cita HTI untuk mewujudkan tegaknya syariah Islam, bukanlah masalah sederhana dan mudah untuk diwujudkan. Di kalangan umat Islam sendiri terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariah dan cara mewujudkannya. Syariah tidak bisa hanya disederhanakan sebagai nash al-Qur'an dan Sunnah karena keduanya multi interpretative dan oleh karenanya melahirkan berbagai mazhab yang sangat bervariasi, terutama mazhab hukum yang akan menjadi pedoman penegakan syariah Islam. Aliran-aliran politik dan teologi dalam Islam seperti ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Syi'ah, Khawarij dan mu'tazilah, masing-masing mengembangkan mazhab hukum yang juga bervariasi. Sebagai contoh, ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah terbagi ke dalam empat mazhab hukum yang terkenal yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Belum lagi ditambah oleh satu cita-cita yang tidak kalah beratnya dibanding dengan penegakan syariah Islam yaitu penegakan khilafah Islam. Penegakan negara khilafah di tengah-tengah kondisi sosial politik dunia yang saat ini terkotak-kotak dalam entitas negara bangsa (nation state).

## **PEMBAHASAN**

Fakta hukum telah memutuskan sejak 19 Juli 2017 status badan hukum HTI telah dicabut. Sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan. HTI tidak membahas asas, ciri dan ciri

---

<sup>3</sup> Ilyya Muhsin, Gerakan Penegakan Syari'ah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di Yogyakarta, (Jurnal Ijtihad IAIN Salatiga; Salatiga, 2012)



ormas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Pembubaran ormas ini sebagai hukuman efektif bagi ormas yang menentang Pancasila, yang dianggap sebagai tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia. Sesuai putusan hakim dalam pembubaran HTI, kemenangan itu HTI terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah.

Sikap HTI ini memutuskan menarik benturan di masyarakat yang dapat melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi NKRI. Setelah HTI resmi dibubarkan apakah gerakan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia berhenti? HTI legal sudah dibubarkan di Indonesia, namun penyebaran ideologi khilafah yang ditentang dengan Pancasila masih kuat dilakukan oleh eks HTI. Setelah dibubarkan, lambang-lambang yang mengubah HTI dan seruan untuk menegakkan khilafah muncul dalam berbagai momentum di Indonesia termasuk pada Pemilu 2019, dan berbagai unjuk rasa terkait lainnya yang dilakukan oleh masing-masing yang ditunjuk pemerintah.

Eks HTI nampak menunjukkan eksistensinya bersama dengan kelompok yang meminta pemerintah termasuk yang memanfaatkan dan memanfaatkan peluang dengan menawarkan ideologi khilafah saat ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Cara-cara dengan menumpang acara politik atau momentum lain ini dilakukan dengan menggunakan kedok sebagai aksi agama, sehingga pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap aksi eks-HTI akan langsung memberikan stigma terhadap agama.

Manuver-manuver oleh HTI selain dilakukan secara terbuka juga menumpang aktivitas politik termasuk unjuk rasa yang disetujui pemerintah, perbaikan juga dilakukan dengan “tanah bawah” termasuk dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Eks HTI ini menawarkan ideologi khilafah yang diserukan sebagai jalan baru untuk mencapai tujuan, yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tentu saja aksi “bawah tanah” ini juga berlindung dibalik kedok agama. Untuk menghindari eks HTI terus melakukan manuver dan gerakan menuju gunung es yang terus membesar maka pemerintah perlu dikonfirmasi dalam menyikapi aksi tersebut. Pemerintah harus memiliki instrumen yang menegaskan



untuk mendukung Undang-Undang tentang Ormas sehingga orang-orang yang menentang Undang-Undang tersebut dapat dikenai sanksi hukum.

Selain itu, HTI yang telah dibubarkan juga harus menerima tuntutan hukum, pihak hukum pihak lain yang masih beraktivitas menyuarakan tujuan HTI atau menggunakan atribut HTI. Tanpa sanksi hukum yang kuat maka eks HTI dengan bebas tetap melakukan propaganda untuk mendirikan negara khilafah. HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun eks anggotanya tetap melakukan aktivitas persetujuan ideologi khilafah. Gerakan tanpa organisasi resmi menentang lebih karena menjeratnya terkendala aturan hukum yang belum mendukung. Ketegasan pemerintah diperlukan dalam mencegah manuver eks HTI.

Kampus, sebagai tempat orang berpikir terbuka, jujur dan rasional, tidak luput dari serangan kelompok HTI yang tujuannya meracuni otak generasi penerus bangsa dengan dogma-dogma politisasi agama yang menyesatkan. Tidak bisa membedakan antara substansi ajaran agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural ini, menjadi berkesan Indonesia ini negara agama. Istilah-istilah sarkastik diumbar di ruang publik yang tujuannya mendiskriminasi kelompok minoritas.

Rumah-rumah ibadah mayoritas berjumlah banyak di kampus, sedang rumah ibadah minoritas tidak satupun ada. Tidak ada satupun orang yang punya hak melarang orang lain beribadah. Ini dilindungi konstitusi negara. Rumah-rumah ibadah yang mestinya difungsikan sebagai tempat beribadah, berubah menjadi simbol hegemoni politik menang-menangan. Negara harus hadir dalam menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah warga bangsanya.

Menurut Bagas Pujilaksana Widyakanigara bahwa Kampus masih dikuasai politik HTI. Indikasinya adalah sebagai berikut: <sup>4</sup>

1. Kebijakan pemimpin universitas pro politik HTI yaitu politik diskriminatif. jargon-jargon Pancasila dan NKRI hanya semu dan basa-basi sekadar menenuhi SOP sebagai pejabat publik yang sebenarnya pro politik khilafah.

---

<sup>4</sup> Bagas Pujilaksana Widyakanigara adalah Akademisi Universitas Gadjah Mada/tagar.id



2. Secara sistematis, masif, dan sistemik menyingkirkan kelompok nasionalis marhaenis dari kehidupan kampus sebagai kelompok manusia berdosa. Berdosa mana dengan orang HTI yang telah mengkhianati Pancasila dan NKRI?

Riset Setara Institute ini di 10 PTN yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM).

Riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair) pada Februari hingga April 2019. Ada tiga wacana dominan yang dikembangkan oleh kelompok Islam eksklusif di kalangan mahasiswa beberapa PTN, khususnya UI, ITB, IPB, dan UIN Syarif Hidayatullah.

Pertama, terkait kewajiban umat Islam untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Narasi yang dikembangkan adalah cara pandang bahwa keselamatan masyarakat hanya dapat dicapai selama masyarakat taat menjalankan perintah Tuhan yang sudah disampaikan melalui Alquran dan hadits. Wacana kedua terkait ancaman terhadap Islam yang datang dari musuh-musuh Islam. Narasi yang direproduksi adalah perlunya umat Islam bersatu melawan penindasan terhadap Islam yang terus berkembang secara berkelanjutan oleh kaum kafir atau musuh-musuh Islam.

Kaum kafir dan para musuh itu merupakan kombinasi dari kelompok Kristen, Zionisme, imperialisme dan kapitalisme Barat, serta kalangan liberal dan sekuler. Dalam wacana ini, Kejahatan global atas Palestina merupakan amsal yang direproduksi secara konstan.

Wacana ketiga menyampaikan bahwa era sekarang adalah perang pemikiran (*ghazwul fikr*). Narasi yang mendapat penekanan bahwa Islam ditaklukkan oleh Barat karena penguasaan pemikiran dan kebudayaan. "Kombinasi dari ketiga narasi tersebut adalah terbangunnya sebuah komunitas solid yang eksklusif, bersikap hati-hati, mencurigai, memusuhi, dan menutup diri dari kalangan lain,". Dia menyampaikan pihaknya juga menemukan temuan kunci lain bahwa gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa di berbagai PTN



hampir seluruhnya didominasi oleh gerakan tarbiyah. Gerakan ini mendominasi dengan cara menguasai organisasi kemahasiswaan intra kampus, masjid besar kampus, musala fakultas, hingga asrama mahasiswa. Menurut dia, hal itu menyebabkan dinamika politik mahasiswa di kampus cenderung eksklusif, antipemimpin dari kalangan nonmuslim atau bahkan muslim di luar kelompoknya. Di berbagai organisasi dan kelembagaan mahasiswa, lanjutnya, berkembang sikap bahwa mahasiswa nonmuslim tidak boleh memimpin satu organisasi atau kelembagaan mahasiswa intrakampus. "Mereka tidak menyetujui pemimpin nonmuslim dalam beragam dimensi kehidupan kemahasiswaan di kampus. Hal ini tentu saja merupakan buah dari indoktrinasi keagamaan eksklusif mengenai pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan skripturalistik,"

Kemudian, Halili berpendapat pula bahwa penguasaan organisasi intrakampus oleh gerakan keagamaan eksklusif di beberapa kampus dilakukan dengan aneka strategi politik, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Halili menyebut salah satunya, seperti merekayasa aturan panitia penyelenggara pemilu mahasiswa sehingga calon ketua badan eksekutif mahasiswa yang tampil hanya satu sosok saja yakni dari kelompok mereka. Dia berkata kelompok gerakan keagamaan eksklusif juga mempolitisasi aturan mengenai syarat dukungan yang sulit dipenuhi bakal calon dari kelompok lain.

"Mereka membayangkan kontestasi politik mahasiswa seperti *daarul harb* (wilayah peperangan), sehingga kebohongan, rekayasa, dan strategi curang-manipulatif menjadi 'halal' untuk digunakan,". HTI juga melakukan reproduksi wacana dan gerakan keislaman eksklusif dilakukan dengan menguasai masjid. Terdapat tiga pola umum penguasaan yang dilakukan oleh kelompok keislaman eksklusif yaitu menjadikan masjid besar kampus sebagai markas utama kaderisasi dan penguasaan jaringan strategis yang dibutuhkan.

Kemudian menguasai sepenuhnya masjid besar kampus dan musala fakultas-fakultas dan asrama mahasiswa. Pola terakhir menjadikan masjid besar di kampus sebagai 'central hub' yang menghubungkan jaringan dengan masjid-masjid 'tetangga' di sekitar kampus. Menurut dia, beberapa medium penyebaran wacana islamisme oleh kelompok Islam eksklusif disebarkan melalui



berbagai kajian, khotbah jum'at, liqo', daurah, halaqoh dan pengkaderan anggota secara rutin. Selain itu, diseminasi wacana keagamaan mereka juga dilakukan melalui berbagai bacaan buku, majalah dan buletin Jum'at. Kelompok Salafi Wahabi mempunyai Buletin Al Hujjah, HTI punya Kaffah yang disebar ribuan eksemplar setiap hari Jumat pagi. "Buletin itu biasanya diletakkan di beranda masjid.

## **PENUTUP**

Wacana keagamaan di kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini sebagian besar dikuasai oleh kelompok tarbiyah dan eks anggota organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertransformasi menjadi aktivis gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah sendiri adalah gerakan dakwah yang kerap dijumpai di kampus-kampus di Indonesia.

Dalam satu riset ditemukan kunci bahwa gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa di berbagai PTN hampir seluruhnya didominasi oleh gerakan tarbiyah. Gerakan ini mendominasi dengan cara menguasai organisasi kemahasiswaan intra kampus, masjid besar kampus, musala fakultas, hingga asrama mahasiswa. Hal itu menyebabkan dinamika politik mahasiswa di kampus cenderung eksklusif, antipemimpin dari kalangan nonmuslim atau bahkan muslim di luar kelompoknya. Di berbagai organisasi dan kelembagaan mahasiswa juga berkembang sikap bahwa mahasiswa nonmuslim tidak boleh memimpin satu organisasi atau kelembagaan mahasiswa intrakampus. Mereka tidak menyetujui pemimpin nonmuslim dalam beragam dimensi kehidupan kemahasiswaan di kampus. Hal ini tentu saja merupakan buah dari indoktrinasi keagamaan eksklusif mengenai pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan skripturalistik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afadhal. dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI PRESS, 2005.



Bagas Pujilaksana Widyakanigara adalah Akademisi Universitas Gadjah Mada/tagar.id

Halili, Hasil Riset yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institut (Halili;Direktur)

Ilyya Muhsin, Gerakan Penegakan Syari'ah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di Yogyakarta, Jurnal Ijtihad IAIN Salatiga; Salatiga, 2012

Uus Uswatussholihah, Sangidun, *Interaksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesi Pasca Pembubaran*, Jurnal Yinyang IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2018

*Indikasi Eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pada Aktivis Kegiatan  
Tarbiyah Pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)*  
**Kurniawan**





## HIZBUL TAHRIR (ORGANISASI SEMPALAN DAN KIPRAHNYA DI INDONESIA)

### MARAH HALIM

Hizbut Tahrir secara resmi didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al Nabhani di al-Quds pada tahun 1953. Al-Nabhāni mengirim surat kepada pemerintah setempat tentang pendirian partainya ini. Namun mereka menolak dengan tegas kehadiran Hizbut Tahrir, sebaliknya masyarakat memberi dukungan. Dengan cepat Hizbut Tahrir menyebar keseluruh Palestina.

Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berideologi Islam. Artinya, Hizbut Tahrir menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Sehingga dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, Hizbut Tahrir hanya berlandaskan pada Islam. Sebagai organisasi politik, Hizbut Tahrir tidak bisa lepas dan dilepaskan dengan aktivitas politik. Bahkan gerakan ini menandakan bahwa umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.

Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu system kekuasaan politik yang disebut *Khilafah*.<sup>1</sup>

Namun bagi Hizbut Tahrir, politik bukanlah seperti yang dipahami banyak orang sebagai aktifitas dalam pemerintahan. Hizbut Tahrir memandang politik adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan syari'at Islam. Itulah sebabnya, dalam aksi faktualnya, Hizbut Tahrir lebih banyak berdiri sebagai pihak yang konfrontatif dengan pemerintahan

---

<sup>1</sup>Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Syakhshīyah Islām (Kepribadian Islam)*, terj. Zakia Ahmad. Bogor: Pustaka Thariqul „Izzah, , 1994.



sekuler. Tidak terlibat dalam politik praktis, tapi aktif dalam mengkampanyekan ide-ide Islam pada khalayak. Hizbut Tahrir lebih banyak bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama menjadikan Islam sebagai pedoman dalam seluruh lini kehidupan, serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem khilafah.<sup>2</sup>

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hizbut Tahrir berkembang dilebih dari 40 negara termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Pengikut Hizbut Tahrir memiliki kekhasan yang berbeda dengan pengikut gerakan Islam lainnya. Salah satu prinsip dasar perjuangan Hizbut Tahrir adalah senantiasa mengambil jarak dengan penguasa, berbeda dengan gerakan Ikhwanal-Muslimin yang akomodatif terhadap penguasa di beberapa negara, Yordania salah satu contohnya. Dimana pun Hizbut Tahrir berada, ia senantiasa bersikap non-kooperatif dengan pemerintah setempat. Hal inilah yang menjadikan Hizbut Tahrir semakin populer di tengah masyarakat dan dianggap sebagai gerakan Islam alternatif ketika gerakan-gerakan Islam lainnya.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut Hizbut Tahrir menerapkan langkah-langkah dakwahnya dalam tiga tahap: *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tafa'ul* (interaksi) dengan umat, dan *istilām al-hukmi* (menerima kekuasaan) dari umat. Di Indonesia Hizbut Tahrir mendeklarasikan diri dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Masuk pertama kali pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Abdul Rahman al-Baghdadi. Adapun aktivitasnya yang menonjol di Indonesia adalah mengorganisir demonstrasi, menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, publikasi melalui media, serta silaturahmi ke berbagai ormas Islam dan pemegang kekuasaan. Dalam perjalanannya HTI sering kali berhadapan dan kerap ditentang oleh gerakan Islam pribumi, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

---

<sup>2</sup>Wamy, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah Fial Adyan Waal Mazahibal-Mu'asirah*, terj. A. Najiyullah, Jakarta: al-I'tisam Cahaya Umat, 2003.

<sup>3</sup>Al-Amin, Ainar Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2012.



Hizbut Tahrir dianggap sempalan karena mengusung ideologi dan wacana menyimpang yang meresahkan umat Islam, antara lain :<sup>4</sup>

1. Mengadopsi ideologi Mu'tazilah

Hizbut Tahrir memiliki pandangan yang sama dengan Mu'tazilah terutama dalam pengingkaran terhadap *qadha'* dan *qadar*. Semua perbuatan *ikhtiyārī* manusia ini, tidak ada hubungannya dengan *qadha'*. Begitu juga sebaliknya, karena manusia lah yang melakukan semuanya dengan kemauan dan pilihannya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat *ikhtiyārīyah* ini tidak termasuk dalam kategori *qadha'*. Disamping itu, bila dikaitkannya pemberian pahala dengan petunjuk dan siksa dengan kesesatan menunjukkan bahwa *hidayah* (petunjuk) dan *dhalāl* (kesesatan) keduanya berasal dari perbuatan manusia, bukan dari Allah. Dengan demikian perbuatan *ikhtiyārī* manusia terlepas dari kendali *qadha'* dan *qadar*. Hidayah dan kesesatan bukan dari Allah, tapi merupakan perbuatan manusia sendiri.

2. Pengingkaran terhadap *ta'wil* oleh ulama Salaf

Hizbut Tahrir telah menafikan adanya *ta'wil* oleh ulama salaf. *Ta'wil* (terhadap ayat-ayat *mutasyābihāt*) untuk pertama kalinya dimunculkan oleh kaum *theolog*. Jadi *ta'wil* itu merupakan salah satu unsur dan hal yang paling membedakan antar kaum *theolog* dengan ulama salaf.

3. Qadar dan Ilmu Allah

Ideologi lain dari Hizbut Tahrir yang dianggap menyimpang dari *ahl al-sunnah wal al-jamā'ah* adalah tentang qadar dan Ilmu Allah. Keimanan terhadap qadar ada dalam hadits Jibril, menurut sebagian riwayat. Dimana Nabi Muhammad SAW bersabda: "Dan kamu percaya terhadap *qada'* dan *qadar*: baik dan buruknya. Hanya saja, hadits ini tergolong hadits *ahad*. Di samping itu, yang dimaksud qadar dalam hadits ini adalah ilmu Allah, bukan *qada'* dan *qadar* yang menjadi titik perselisihan dalam memahaminya. Pernyataan al-Nabhani ini melahirkan kesimpulan bahwa :*pertama*, keimanan terhadap qadar Allah hanya terdapat dalam hadits jibril menurut sebagian riwayat.

---

<sup>4</sup>Jamhari & Jajang Jahroni (Penyunting). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.



*Kedua*, hadits tentang qadar tergolong hadits *ahad* yang tidak meyakinkan. *Ketiga*, yang dimaksud dengan qadar dalam hadits Jibril di atas adalah ilmu Allah, bukan qada" dan qadar yang menjadi pembahasan kaum muslimin.

4. Kema'shunan paraNabi

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, semua Nabi dan Rasul Allah adalah *ma'shūm* (terjaga dari kesalahan) saat mereka menjadi nabi. Tapi sebelum itu, mereka adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Selama belum mendapat mandat kenabian atau kerasulan, mereka tidaklah *ma'shūm*.

5. Melecehkan UmatIslam

Salah satu ideologi HT yang dianggap berbedadengan *ahl al-sunnah* adalah pelecehannya terhadap umat Islam. Pernyataan al-Nabhani yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pendapat *ahl al-sunnah* dan pendapat Jabariyah adalah satu. Mereka (*ahl al-sunnah*) adalah Jabariyah. Mereka telah benar-benar gagal dalam masalah *kasb* (perbuatan makhluk), sehingga masalah tersebut tidak sesuai dengan akal rasio, karena sama sekali tidak didasarkan pada argument akal (*aqli*) maupun dalil-dalil syariah (*naqli*). Masalah *kasb* tersebut merupakan upaya gagal untuk menggabungkan antara pendapat Mu"tazilah dan Jabariyah. Dua pernyataan ini dianggap melecehkan umat Islam karena: *pertama*, al-Nabhani telah menyamakan pendapat *Ahl al-Sunnah* dengan Jabariyah dalam masalah perbuatan manusia. Padahal antar keduanya jelas berbeda. *Kedua*, al-Nabhani telah berasumsi bahwa seluruh kaum muslimin sejak lama telah berpaling dari al-Qur"an dan Hadits.

Pada dasarnya, pernyataan bahwa kaum muslimin telah berpaling dari al-Qur"an dan Hadits secara totalitas, tentu tidak bisa dibenarkan. Karena faktanya, semua kaum muslimin pasti masih beriman dan mempercayai al-Qur"an dan Hadits sebagai pedoman dalam kehidupannya.

6. Peningkaran siksa kubur

Adanya perbedaan ideologi antara Hizbut Tahrir dengan mayoritas kaum muslimin, yaitu tentang penerimaan mereka terhadap siksa kubur. Hizbut Tahrir telah mengingkari adanya siksa kubur bagi manusia yang meninggal.



## 7. Mengkafirkan kaum muslimin

Pernyataan al- Nabhani yang dijadikan landasan yang mengkafirkan kaum muslimin yang menyebutkan bahwa eksistensi Islam dalam kancah kehidupan tergantung pada adanya khalifah. Inilah yang kemudian dijadikan justifikasi untuk memberikan vonis bahwa al-Nabhani telah mengkafirkan kaum muslimin. Hizbut Tahrir telah mengkafirkan kaum muslimin, ketika mereka tidak mendukung visi dan misi Hizbut Tahrir dalam usaha menegakkan khilafah. Mengkafirkan orang Islam, tentu sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, bahkan hal itu merupakan dosa besar dan berakibat *takfir* pada dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda: *man kaffara akhāhu al-muslima faqad kafara*, “Barang siapa yang mengkafirkan saudara sesama Islam, maka ia telah menjadi kafir”.

Selain berkaitan dengan ideologi, ada beberapa hal lainnya yang dianggap sempalan dan berbeda dengan pandangan umum masyarakat. Bagi sebagian umat Islam, retorika Hizbut Tahrir tentang mengembalikan kejayaan Islam melalui sistem kepemimpinan khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari dan didalami lebih lanjut, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius.

Berikut sejumlah pemikiran sistem khilafah yang dikembangkan Hizbut Tahrir Indonesia yang menyimpang dan dianggap sebagai organisasi sempalan dan dilarang keberadaannya di Indonesia adalah :<sup>5</sup>

1. Hizbut Tahrir memutlakkan konsep khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, Hizbut Tahrir tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. Hizbut Tahrir percaya bahwa kaum muslim Indonesia harus tunduk pada pemerintahan khilafah dunia Islam di bawah seorang khalifah yang mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi atau di Irak atau di tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada khalifah itu.

---

<sup>5</sup>Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2011.



2. Sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, Hizbut Tahrir tidak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari khilafah Islam. Indonesia adalah semacam 'negara bagian' dari khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan khalifah, pemimpin di Indonesia bisa diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak setelah ada ancaman sanksi oleh khalifah, Indonesia bisa diperangi.<sup>6</sup>
3. Hizbut Tahrir tidak percaya pada Pancasila, pada UUD 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. Hizbut Tahrir tidak percaya pada demokrasi, tidak percaya pada pemilu. Bila saat ini Hizbut Tahrir menerimanya, itu hanya untuk sementara. Dalam bayangan Hizbut Tahrir, suatu saat nanti Indonesia harus diubah menjadi menjadi bagian dari Khilafah Islam.
4. Hizbut Tahrir menomorduakan warga non-Islam. Dengan kata lain, Hizbut Tahrir diskriminatif. Dalam konsep Khilafah Islam yang dibayangkan Hizbut Tahrir, kaum non-Islam adalah warga kelas dua. Melalui jargon *izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan orang-orang Islam), Hizbut Tahrir menganakemaskan kelompok Muslim seraya menganaktirikan kelompok yang lain. Ini tidak berarti warga non-Islam tidak mendapat pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kaum non-muslim tidak memiliki hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin.<sup>7</sup>
5. Dalam khilafah yang dibayangkan Hizbut Tahrir, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam.
6. Pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini setiap negara yang menjadi bagian dari khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Iraq dan seterusnya) akan

---

<sup>6</sup> Ramli, Muhammad Idrus. *Hizbut Tahrir dalam Sorotan*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2011.

<sup>7</sup> Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundaentalis Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. Malang: UMM, 2010.



- mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat khilafah.
7. Hizbut Tahrir tidak percaya pada parlemen yang mengendalikan khalifah dan pemerintah. Dalam konsep HT, begitu seorang pemimpin terpilih dan dibaiat (disumpah), maka seluruh rakyat dalam khilafah harus tunduk dan percaya padanya. Si pemimpin kemudian harus menjalankan kepemimpinan dengan senantiasa merujuk pada Syariah. Ia lah yang menunjuk para pembantunya, termasuk menunjuk pemimpin di setiap daerah yang menjadi bagian dari khilafah.
  8. Dalam konsep ini seorang khalifah tidak memiliki batas waktu kepemimpinan. Dia baru diganti kalau wafat, tidak lagi melandaskan kepemimpinannya pada syariah atau memimpin dengan cara yang zhalim. Bila ia melanggar syariah, ia boleh ditumbangkan dengan kekerasan.
  9. Selama ia masih memimpin berdasarkan syariah, keputusan khalifah tidak boleh tidak dituruti. Rakyat dan para alim ulama, kaum cerdas pandai, bisa saja memberi masukan, namun keputusan terakhir ada di tangan khalifah. Mereka yang berani tidak taat akan dianggap sebagai melakukan pembangkangan. Dan mereka yang membangkang bisa dihukum mati.
  10. Hizbut Tahrir anti-keragaman hukum. Hizbut Tahrir menganggap tidak perlu ada undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat. Hizbut Tahrir percaya syariah saja sudah cukup. Namun bila memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan peraturan, Khalifah dan pembantu-pembantunya dapat saja membuat peraturan yang mengikat seluruh warga.

Setelah kita menyimak beberapa ide dan wacana yang diusung Hizbut Tahrir telah memberikan alasan kenapa gerakan organisasi ini perlu dilarang dan selalu diwaspadai eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Yahya. "Hizbut Tahrir Menjawab Tuduhan Miring", dalam Majalah *al Wa'ie*, Maret 2005.



- Al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Syakhshīyah Islām (Kepribadian Islam)*, terj. Zakia Ahmad. Bogor: Pustaka Thariqul „Izzah, , 1994.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundaentalis Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. Malang: UMM, 2010.
- Jamhari&JajangJahroni(Penyunting). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindoPersada 2004.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2011.
- Ramli, Muhammad Idrus. *Hizbut Tahrir dalam Sorotan*. Surabaya: Bina ASWAJA, 2011.
- Wamy, Al-Mausu' ahal-Muyassarah Fial-Adyan Waal-Mazahibal-Mu'asirah, terj. A. Najiyullah, Jakarta: al-I'tisam cahaya Umat), 2003



## **KELOMPOK SEMPALAN DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI SOSIO-HISTORIS)**

### **MIRIN AJIB**

#### **PENDAHULUAN**

Kemunculan dan perkembangan kelompok “sempalan” yang cenderung eksklusif, ekstrim, dan radikal dalam Islam memiliki sejarah yang panjang dengan akar historis yang amat kompleks. Karena itu, kajian tentang kelompok “sempalan” yang eksklusif dan radikal di kalangan kaum Muslim, lebih khusus lagi mahasiswa, harus melibatkan pendekatan multi dimensional: doktrinal, sosial, politis, ekonomis, dan sebagainya. Pendekatan yang melihat hanya dari satu sisi saja tidak hanya akan menimbulkan pemahaman yang tidak tepat, tetapi juga akan menciptakan mispersepsi dan distorsi terhadap citra Islam itu sendiri.

Aktivitas dan kegiatan beragama dan keagamaan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena di khawatirkan dapat menjurus menjadi radikalisme agama. Artinya kegiatan dan kehidupan keagamaan yang eksklusif dapat saja merupakan akar dari radikalisme agama, sebagaimana merokok dapat saja merupakan akar atau tangga pertama dari narkoba. Sementara radikalisme agama, dengan merujuk kepada kamus Al-Maurid, adalah kemauan untuk mengadakan perubahan-perubahan secara ekstrem, drastis bahkan dengan cara kekerasan dalam pemikiran-pemikiran dan tradisi-tradisi yang umum berlaku, atau dalam situasi dan institusi-intituti yang eksis.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruhnya di lingkungan kampus dalam membentuk corak pemikiran agama dalam organisasi-organisasi keagamaan, baik intra kampus semacam Rohis, LDK dan lain-lain, maupun ekstra kampus, semacam HMI, PMII, IMM, KAMMI, HTI dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini jauh lebih intens berkomunikasi dalam mengarahkan dan mengembangkan corak pemikiran keagamaan, ketimbang pembina resmi kehidupan agama di kampus.

Kelompok eksklusif ini merupakan kelompok mahasiswa muslim yang lebih berorientasi kepada pengamalan Islam secara menyeluruh, kaffah. Kelompok-kelompok mahasiswa ini, apakah



karena pengaruh gerakan internasional Islam Ikhwanul Muslimin (Mesir), Jamaat Islami (Pakistan) dan organisasi-organisasi internasional lainnya, atau hasil kreasi lokal para mahasiswa Islam Indonesia, mereka mengadakan pengkajian-pengkajian Islam secara intensif, dalam bentuk *Usrah-Usrah* atau *Liqo'*. Kelompok mahasiswa Islam ini pula yang kemudian mendirikan kegiatan mentoring atau tutorial di kampus-kampus, khususnya di PTU, bahkan kegiatan tersebut sekarang sudah mendapatkan legitimasi ilmiah melalui UKM Rohis di kampus-kampus.

Menurut Muhibbuddin, para aktifis Islam kampus yang "baru" mengenal Islam tersebut, kemudian seolah-olah sudah menjadi orang yang paling Islam, sudah merasa menjadi orang yang paling paham tentang Islam, sehingga mudah mengkafirkan dan membida'ah-bida'ahkan para ulama dan cendekiawan yang sudah menekuni keislaman selama berpuluh-puluh tahun. Sesungguhnya pengetahuan dan keilmuan mereka masih keropos, dengan bekal pengetahuan yang cenderung literal dan tekstual, kemudian mulai memakai jubah, cadar, berjenggot dan pola komunikasi yang kearab-araban, *Ya Akhi, Ya Ukhti, bagaimana kabar Antum? Anadi sini, Ilalliqo'dan* lain-lain, kemudian merasa sebagai satu-satunya representasi Islam dan yang paling tinggi Islamnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat, bahwa responden yang aktif di organisasi ekstra KAMMI dan HTI lebih dominan pada corak berpikir eksklusif. Fenomena eksklusivisme keagamaan di kampus PTU memang merupakan fenomena umum dewasa ini. Dalam beberapa kali pertemuan Nasional Dosen PAI di PTU, sinyalemen tersebut semakin kuat dan diakui oleh utusan-utusan PTU dari seluruh Indonesia. Tetapi semua mereka hampir masih memiliki pemikiran yang sama, menghentikan aktivitas mereka sama saja dengan mematikan kegiatan atau aktivitas agama. Selain itu kegiatan mereka juga sangat membantu dalam suasana kehidupan keagamaan di kampus. Sedangkan membiarkan mereka sama saja dengan membiarkan menguatnya corak pemikiran keagamaan yang eksklusif.

Keberadaan beberapa organisasi yang disinyalir sebagai cikal bakal terjadinya eksklusivisme dan radikalisme tersebut juga didukung oleh beberapa temuan, bahkan Peneliti Lembaga Ilmu



Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas mengatakan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi. Proses itu dilakukan secara tertutup dan menurutnya, berpotensi memecah belah bangsa. "Radikalisme ideologi jika tidak dicegah dari sekarang bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang porak poranda dan dipecah karena perbedaan ideologis," kata Anas saat diskusi Membedah Pola Gerakan Radikal, di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (18/2).

Di kampus, lanjut Anas, kelompok ini lebih banyak melakukan radikalisasi ideologi dengan cita-cita mendirikan negara Islam versi mereka sendiri. Jika hal ini tidak dicegah secepatnya, menurut Anas, kemungkinan besar Indonesia akan terjadi perang saudara di masa yang akan datang.

Di dalam Islam, menurut Tholhah Hasan, radikalisme adalah kegiatan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam sepanjang masa, dengan motivasi agama dan ideologi, sosial, politik atau lainnya, yang sebenarnya sudah ada sejak masa awal Islam. Para pengamat dan sejarawan menganggap gerakan "*Khawarij*" merupakan gerakan radikal pertama yang membawa-bawa nama Islam pada abad pertama Hijriyah, yang memandang siapapun yang tidak menyetujui pendapatnya dicap sebagai kafir atau musyrik, yang hala untuk dibunuh atau dipenjara.

Sikap-sikap golongan radikal yang literalis dengan interpretasi yang eksklusif, yang menganggap orang lain semua salah. Menurut Zahroh, mereka memiliki kebenaran yang absolut, atau dalam Istilah Abu Zahroh "*La yaqbalu al-khatha' min nafsih wa la yaqbalu al-shawab minal-ghoyr*" (tidak mau menerimakesalahannyadantidak mau menerima kebenaran orang lain). Hal-hal yang menjadi karakteristik atau dapat memicu radikalisme saat ini adalah; (a) pemahaman dan penghayatan agama yang ekstrim, (b) kekagumanterhadap superioritas diri atau kelompok, (c) fanatisme golongan/madzhab/faham yang berlebihan, (d) merasa benar sendiri, orang lain yang tidak sama dengannya dipandang pasti salah, (e) sistem pendidikan agamayang tidakbenar,baikmateri maupun metodologinya, dan (f) karena ada desain rekayasa dari kelompok kepentingan tertentu.

Radikalisme sebenarnya bukanlah isu baru, bahkan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, hanya berbeda istilah dan bentuknya.



Seiring berkembangnya globalisasi, kegiatan radikalisme berkembang biak dan hal tersebut semakin aktual ketika peristiwa WTC di New York tanggal 11 September 2001. Sehingga belakangan ini, radikalisme agama menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme dan tindak kekerasan atas nama agama yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Kekerasan dengan mengatasnamakan agama sering terjadi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme, kekerasan apalagi terorisme, karena Islam hadir di dunia ini menjadi rahmatan lil 'alamin.

Radikalisme agama dapat tumbuh dan berkembang terhadap orang-orang atau kelompok yang mempelajari agama dalam suatu lingkungan yang tertutup dan memberi pendidikan dan pembelajaran agama yang salah. Pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang diterima oleh individu maupun kelompok yang kemudian menjadi radikal, kebanyakan didapat dari lingkungan yang bersifat tertutup, mendakwahkan radikalisme dengan pandangan pribadi, bukan pandangan agama yang sudah disepakati oleh para 'ulama dan ahli-ahli agama.

Banyak cara yang harus dilakukan secara kreatif terkait dengan upaya menghentikan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Secara teoritis cara-cara tersebut disesuaikan dengan akar masalahnya. Tentunya cara memutus rantai radikalisme tidak dapat disamaratakan, karena kegiatan tersebut antara satu kasus dengan kasus yang lain mempunyai perbedaan sifat, latar belakang serta dampak yang ditimbulkan walaupun terdapat persamaan. Cara-cara tersebut dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal seperti; (1) penegakan hukum, (2) pencegahan, (3) deradikalisasi, dan (4) *disengagement*.

Sementara menurut Bakti, untuk melakukan deradikalisasi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan, (2) meningkatkan peran keluarga sebagai elemen-elemen penting dalam masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat yang berkarakter, karena menurut Mbai (2014) keyakinan agama radikal banyak didorong juga oleh warisan orang tua terhadap anak-anaknya, (3) mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, mulai



dari tingkat regional, nasional maupun internasional, (4) menanamkan kesadaran melalui pendidikan, bagaimana harusnya bersikap dalam menghadapi dan menyikapi kemajemukan dan pluralitas agama, sosial, budaya, suku, ras dan pemahaman yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, dan (5) deradikalisasi yang tidak mengedepankan tekanan, apalagi cara-cara inteligen dan militer, namun lebih menggunakan cara-cara islami dan rahmatan lil 'alamin dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, psikologi, sosial dan budaya, sehingga terwujud pula masyarakat atau umat yang rahmatan lil 'alamin pula.

Pentingnya mengantisipasi radikalisme, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan beragama, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kegiatan-kegiatan yang bernuansa atau mengarah kepada radikalisme harus mendapat perhatian dari semua pihak. Dalam menghadapi bahaya radikalisme itu juga harus dipupuk rasa persaudaraan, kebersamaan dan keterbukaan atau inklusivisme dalam beragama. Sehingga hal-hal yang mengarah kepada eksklusivisme harus dikurangi atau dihindari dengan mencari solusi, strategi dan kebijakan yang baik dan dapat diterapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah " Bagaimana Kelompok Sempalan di Kalangan Mahasiswa (Studi Sosio-Historis)". Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah "Untuk mengetahui Bagaimanakah Kelompok Sempalan di Kalangan Mahasiswa (Studi Sosio-Historis)". Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diterapkan di universitas dan mampu membuat pembelajaran mahasiswa di universitas menjadi lebih baik.

## PEMBAHASAN

Corak berpikir keagamaan mahasiswa, perspektif Azra (2002: 224) secara umum dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, yang merupakan mayoritas adalah kelompok "common" Muslim, yakni paramahasiswa Muslim yang



mengamalkan ajaran Islam seadanya serta cenderung tradisional dan konvensional. Sebagian mereka bahkan tidak begitu concern terhadap agama. Mereka yang peduli pun, seperti dapat disaksikan, hanya melaksanakan ajaran agama seadanya sebagaimana mereka terima dari orang tuadan lingkungan sosial-keagamaan yang biasa. Mereka memang mengamalkan ritual-ritual Islam yang pokok, seperti shalat dan puasa, tapi tidak begitu bersemangat terhadap agama. Kedua, adalah para mahasiswa yang berlatar belakang keagamaan sangat kuat dan mereka yang merasa perlu mengembangkan dirinya, yang dalam konteks keagamaan adalah untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang Islam, dan dalam konteks akademis adalah untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi dan ketrampilan ilmiah. Di masa lalu, kelompok mahasiswa demikian cenderung memilih dan bergabung dengan organisasi kemahasiswaan Islam, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Keberhasilan para senior mereka menduduki jabatan-jabatan publik dan politik semakin memperkuat mahasiswa Muslim memasuki organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam.

Harus diakui, belum ada kajian komprehensif yang memberikan peta yang relatif akurat dan sahih tentang kecenderungan perkembangan kelompok eksklusif Islam di kalangan mahasiswa perguruan tinggi umum di Indonesia. Sementara ini baru terdapat kajian-kajian terbatas, yang memberikan sedikit gambaran tentang hal tersebut. Oleh karena itu, agaknya perlu kajian mendalam sebelum kita mengambil kesimpulan dan rekomendasi berkenaan dengan hal itu.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, berdasarkan pengamatan selintas terhadap kehidupan keagamaan di kalangan mahasiswa, agaknya perlu dilakukan pembedaan, distingsi, atau tipologi mengenai kecenderungan gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa pada umumnya. Distingsi ini diperlukan tidak sekedar untuk "memetakan" kecenderungan dari gerakan-gerakan yang ada, tetapi lebih penting lagi, untuk memahami dan, selanjutnya, mengantisipasi arah gerakan-gerakan tersebut.

Sebagian besar mahasiswa, dapat dipastikan, mengikuti mainstream keagamaan masyarakat Muslim Mayoritas kelompok



besar ini, juga dapat dipastikan, memahami dan melaksanakan agama secara “tradisional” dan “konvensional”. Sebagian mereka bahkan tidak terlalu peduli dengan atau *concern* terhadap agama. Mereka yang peduli, seperti dapat disaksikan, melaksanakan ajaran-ajaran agama selayaknya dan seadanya, sebagaimana mereka terima dari orang tua dan lingkungan sosialisasi keagamaan yang biasa. Mereka ini dapat disebut sebagai ‘*common*’ Muslim, yaitu Muslim yang melaksanakan ajaran agama, tetapi tidak terlalu bersemangat.

Kelompok kedua adalah mahasiswa yang merasa perlu mengembangkan diri, dalam konteks keagamaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Islam, dan dalam konteks akademis, untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan keterampilan ilmiah. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan ini memilih untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa Islam, seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dorongan untuk memasuki organisasi mahasiswa Islam itu, menjadi lebih kuat, ketika mahasiswa menyatakan bahwa terdapat cukup banyak anggota atau mantan anggota mereka yang kemudian menonjol dan cukup terkemuka, baik dalam lingkungan kampus maupun setelah mereka keluar atau tamat dari perguruan tinggi. Dengan demikian, organisasi mahasiswa Islam tersebut “menjanjikan” tidak hanya peningkatan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, tetapi juga mobilitas akademis dan mobilitas sosial politik kelak.

Namun demikian, organisasi-organisasi mahasiswa Islam ini setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir mengalami kemerosotan, khususnya dalam keanggotaan. Kemerosotan itu tidak hanya disebabkan perubahan politik pada tingkat nasional terhadap kehidupan mahasiswa seperti Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang merupakan “depolitisasi” mahasiswa menjelang akhir 1980; tetapi juga karena perubahan dalam sistem pendidikan tinggi sendiri, seperti: pengenalan Sistem Kredit Semester, yang menggiring mahasiswa untuk lebih berkonsentrasi pada perkuliahan dan tugas-tugas akademis lainnya, ketimbang keterlibatan dalam organisasi mahasiswa (Islam) yang cenderung menghabiskan banyak waktu (*time consuming*).



Semua perkembangan ini pada gilirannya memunculkan kelompok ketiga, yang menjadi inti pembahasan kita. Yakni kemunculan kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih berorientasi kepada Islam, yang dalam masa aksi-aksi mahasiswa di tengah krisis ekonomi Indonesia sekarang ini, sering disebut sebagai “kelompok hijau”. Kemunculan mereka dalam tahap pertama ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang pada paragon pertama dasawarsa 1980-an dulu populer di Indonesia sebagai *usrah*.

Meskipun secara harfiah, istilah ini sederhananya berarti “keluarga”, secara konseptual dan aktual “usrah”, merupakan unit terkecil dari sebuah gerakan lebih luas. Sistem “usrah” itu sendiri sebenarnya tidak baru dalam nomenklatur gerakan Islam kontemporer. Ia sudah digunakan secara luas di kawasan-kawasan Dunia Muslim lainnya, khususnya di Timur Tengah dan Anak Benua India. Sistem “Usrah” bahkan merupakan tulang punggung dari program kaderisasi organisasi semacam al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir atau bagian-bagian Timur Tengah lainnya, atau organisasi Jama’ati Islami di Pakistan.

### 1. Kompleksitas Kontemporer

Perkembangan kelompok-kelompok sempalan yang ekstrim dan radikal di antara kaum Muslimin di masa modern dan kontemporer sangat kompleks. Kompleksitas itu pada dasarnya bukan terletak pada doktrin; karena secara doktrinal kelompok sempalan, khususnya yang ekstrim dan radikal tersebut umumnya mengikuti pola dan paradigma teologis kaum Khawarij seperti akan dikemukakan dibawah yang disana sini disesuaikan dengan tantangan pemikiran modern dan kontemporer. Oleh karena itu, kompleksitas itu terutama terletak pada akar-akar: sosio-historis dan politis, atau *social origins* kelompok ekstrim tersebut.

Salah satu penyebab kompleksitas yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan kelompok ekstrim dan radikal Muslim dan bahkan gerakan Islam pada umumnya di masa modern dan kontemporer itu adalah faktor Eropa atau Barat pada umumnya. Bagi banyak kaum Muslim, Eropa atau Barat merupakan salah satu faktor pendorong penting bagi upaya-upaya pembaruan di kalangan kaum Muslimin, yang pada gilirannya muncul dalam bentuk “modernisme” atau “reformisme”. Bagi mereka, untuk



mengangkat kaum Muslimin dari kemunduran dan keterbelakangan, dalam segi-segi tertentu, perlu dilakukan adopsi pemikiran dan kelembagaan Barat.

Tetapi sebaliknya, bagi kelompok ekstrim dan radikal umumnya, Barat merupakan salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslimin. Dalam pandangan mereka, Barat tidak hanya telah menjajah wilayah kaum Muslimin (dar al-Islam), tetapi juga bahkan merusak dan menghancurkan sistem nilai, budaya, sosial, ekonomi, intelektual Islam, serta sekaligus merusak dan menenyapkan lembaga-lembaga Islam, seperti lembaga pendidikan, politik, hukum, dan sebagainya. Padahal, dalam saat yang sama, Barat itu sendiri, menurut kelompok ekstrim dan radikal ini, dipenuhi kebobrokan, terutama dari segi moral dan keimanan. Oleh karena itu, Barat harus dilawan. Di sinilah dapat dilihat salah satu ciri paling menonjol dari kelompok ekstrim dan radikal Muslim, yaitu sikap anti Barat (anti *Western*)-nya.

Sikap anti Barat ini semakin mengental di kalangan kelompok ekstrim Muslim, ketika melihat kenyataan bahwa Barat mendukung kebanyakan rejim pemerintahan Muslim pasca Perang Dunia Kedua yang merupakan rejim-rejim sekuler yang, tentu saja, menganut ideologi sekuler yang bukan hanya tidak cocok, tetapi bahkan bertentangan dengan atau anti Islam. Ini terlihat khususnya dalam ideologi yang subur pada negara-negara Islam di Timur Tengah umumnya, seperti sosialisme, komunisme, dan kemudian kapitalisme liberal. Celakanya lagi, rejim-rejim sekuler, dengan bantuan Barat bertindak sangat opresif dan, karena itu, sering melakukan terorisme negara kepada setiap kelompok yang mereka pandang dapat mengancam status quo kekuasaan dan ideologi sekuler mereka.

Kenyataan inilah yang pada gilirannya menciptakan semacam *vicious circle*, lingkaran setan, antara radikalisme kelompok-kelompok ekstrim Muslim, yang justru menemukan *raison d'etre* eksistensi mereka dalam tindakan-tindakan opresif dengan terorisme negara. Pada satu pihak, di kalangan kelompok ekstrim Muslim, atas nama Islam atau kebangkitan Islam, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berkeinginan menegakkan apa yang mereka sebut sebagai "tatanan politik Islam" (al-nizham al-Islam) secara menyeluruh dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan ini, mereka pada umumnya



menggunakan pendekatan politik, tegasnya dengan menumbangkan rejim sekuler dan menghapuskan ideologi sekuler. Dengan menggunakan pendekatan politik ini, sebagai konsekuensi logisnya kelompok-kelompok radikal Muslim tersebut berhadapan *head-to-head*, laga kambing, dengan rejim yang berkuasa. Pada pihak lain, penguasa-penguasa sekuler yang mempertahankan status *quo*, melakukan apa saja untuk menindas dan melenyapkan kelompok-kelompok ekstrim Muslim, termasuk terorisme negara.

Dengan demikian, kelompok-kelompok radikal Muslim berhadapan dengan tiga *front* yang kuat. Pertama, dengan pihak Barat yang menurut mereka merupakan *roots of all evils*. Kedua, dengan rejim-rejim penguasa Muslim sekuler yang memegang ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ketiga, dengan *mainstream* kaum Muslimin yang menolak ekstrimisme dan radikalisme dalam aktivisme politik mereka, serta literalisme mereka dalam memahami doktrin Islam.

## 2. Akar Histonis dan Doktrinal

Kemunculan kelompok-kelompok sempalan yang ekstrim dan radikal dalam kalangan Muslimin berakar justru bukan dari doktrin agama Islam itu sendiri, melainkan dari konflik politik di antara kaum Muslim tidak lama setelah Nabi Muhammad Saw. wafat. Sebagaimana diketahui, dalam masa pemerintahan Utsman ibn Affan, khalifah ketiga al-Khulafa' al-Rasyidun (memerintah tahun 24-36 H./644-656 M.), terjadi konflik di antara kaum Muslimin. Terdapat pihak-pihak yang memprotes Utsman, yang dianggap telah melakukan politik nepotisme, karena beberapa anggota kabilahnya muncul menempati posisi penting dalam pemerintahan. Utsman akhirnya mengalami nasib tragis, terbunuh di tangan kelompok yang memprotes dan memberontak terhadap pemerintahannya.

Tewasnya khalifah Utsman ibn Affan tidak mengakhiri persoalan. Bahkan peristiwa tersebut menandai permulaan skisma di antara kaum Muslimin. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang agama, khususnya teologi (kalam). Pada satu pihak tewasnya Utsman mendorong sebagian Muslimin untuk mengangkat Ali ibn Abi Thalib sebagai al-khulafa' al-rasyidun keempat (memerintah tahun 36-41 H./656-661 M.). Tetapi keluarga dan kabilah Utsman, di bawah pimpinan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan memprotes,



dan menuntut agar persoalan pembunuhan Utsman diselesaikan lebih dahulu sebelum memilih atau mengangkat khalifah penggantinya. Konflik ini pada akhirnya berpuncak pada pecahnya Perang Siffein di antara para pendukung Ali melawan barisan Mu'awiyah. Perang berkepanjangan yang terjadi tahun 656-661 itu juga terkenal sebagai al-fithnat al-akbar, perang sipil terbesar pertama di antara kaum Muslimin. Perang itu hampir dimenangkan oleh barisan Ali ibn Abi Thalib, tetapi pasukan Mu'awiyah mengusulkan perdamaian, yang kemudian diterima oleh Ali.

Penerimaan perdamaian ini merupakan asal-usul dari kemunculan kelompok ekstrim dan radikal pertama di antara kaum Muslimin. Kelompok ini dikenal sebagai kaum "Khariji" atau "Khawarij", yang secara harfiah berarti "orang-orang yang keluar" (dari barisan Ali ibn Abi Thalib). Sebaliknya, mereka yang tetap mendukungnya kemudian dikenal sebagai "Syiah", yang secara harfiah berarti "partai" atau "kelompok" (Ali ibn Abi Thalib).

Kelompok Khawarij, dengan demikian keluar dari mainstream kaum Muslimin, dan, melakukan kegiatan-kegiatan subversif di bawah tanah untuk menumbangkan para khalifah dan para penguasa Muslim lainnya, yang mereka pandang telah "kafir" dan "berhukum dengan hukum-hukum selain hukum yang diturunkan Allah". Karena ekstrimitas dan radikalismenya, kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa kelompok lebih ekstrim seperti kelompok al-Muhakkimah, al-Azariqah, al-Najdah, al-Sufriyah, dan al-Ibadiyah. Dalam masa kontemporer, hanya kelompok al-Ibadiyah yang bertahan di beberapa tempat, yaitu di Afrika Utara dan Oman.

Menurut Syamsuddin (201-205: 2002) perbedaan pendapat dalam Islam memiliki akar sejarah dalam Islam, karena Islam sendiri sangat potensial bagimunculnya perbedaan dan penafsiran. Hanya saja perbedaan itu bisa menjadi rahmat dan bisa juga menjadi bencana. Perdebatan di antara para Ulama dalam bentuk tulisan merupakan bentuk perbedaan yang mengandung rahmat. Tapi adakalanya juga perbedaan itu malah membawa bencana ketika suatu kebenaran penafsiran dipandang sebagai kebenaran mutlak. Sejarah mencatat cukup banyak terjadinya perbedaan pendapat yang malah membawa pada malapetaka pembunuhan, seperti kasus pembunuhan Al-Hallaj dan Sukhrawardi. Lewat berpikir positif, khusus dzan dan positive thinking, kaum beriman



memilih perbedaan pendapat yang membawarahmat. Oleh karena itu silaturahmi ide adalah fardhu dan perlu, dalam rangkamengembangkan suatu wacana pemikiran Islam yang positif, konstruktif, dan substantive.

### **3. Relevansi dengan Politik Indonesia**

Tidak seluruh kelompok "sempalan" di atas merupakan kelompok sempalan dalam pengertian "menyimpang" dari doktrin Islam. Sebaliknya, penyebutan mereka sebagai kelompok sempalan lebih karena sikap politik dan kultural mereka, yang cenderung berlawanan dengan penguasa Muslim, dan bahkan dengan mainstream kaum Muslimin. Namun demikian, pertanyaan yang tetap menggayut adalah: Apakah ada relevansi antara kelompok sempalan yang ekstrim dan radikal, yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah tadi dengan yang berkembang di Indonesia? Kalau ada, bagaimana dampaknya?

Terlepas dari eksistensi kelompok sempalan seperti itu, dalam pandangan saya, mereka tidak terlalu relevan dengan kaum Muslimin Indonesia. Kenyataan ini disebabkan setidaknya oleh lima faktor pokok sebagai berikut ini.

Pertama, Islam di Indonesia sepanjang sejarahnya tidak pernah mengalami ekstrimisasi sebagaimana yang dialami kaum Muslimin Timur Tengah. Sebaliknya, yang terjadi adalah perkembangan Islam yang pada umumnya berlangsung secara damai. Memang kaum Muslimin, khususnya kalangan tarikat pernah mengalami semacam radikalisasi, khususnya ketika Belanda semakin mengkonsolidasikan kekuasaannya terutama sejak abad 18. Tetapi radikalisasi itu tidak pernah mengejawantah dalam ekstrimisme politik pada level yang tinggi. Doktrin jihad memang pernah dikembangkan oleh beberapa ulama Indonesia tertentu pada zaman penjajahan Belanda, seperti Abd al-Samad al-Palimbani, tetapi tidak pernah terwujud dalam skala besar dan dalam waktu yang lama.

Kedua, berkenaan dengan faktor pertama tadi, kaum Muslimin Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang akomodatif, kalau tidak dapat dikatakan cenderung sinkretik. Oleh karena itu, ekstrimisme dan radikalisme tidak pernah populer di Indonesia. Memang pernah terjadi gerakan ekstrim semacam Gerakan



Padri di Minangkabau pada abad 19. Tetapi gerakan ini adalah satu-satunya gerakan ekstrim yang berusia pendek; untuk selanjutnya mengalami domestifikasi ketika harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan politik yang kompleks.

Ketiga, Pancasila yang diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional sejak kemerdekaan, secara esensial tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sebaliknya, hampir seluruh tokoh, ulama dan pemimpin Muslim Indonesiaberpandangan bahwa Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kalaupun pernah ada usaha dari kalangan tertentu Muslimin Indonesia untuk menggantidasar negara dari Pancasila menjadi Islam, maka hal tersebut adalah usaha-usaha bersifat sporadis, yang justru ditentang oleh mayoritas Muslimin Indonesia. Dari sudut esensi dan watak ideologi Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama (Islam) itu, maka tidak ada *raison d'etre* yang kuat bagi kemunculan kelompok ekstrim yang solid untuk mengubah dasar dan ideologi nasional tersebut dengan Islam.

Keempat, pemerintahan Indonesia pada dasarnya adalah pemerintah yang dapat dikategorisasikan sebagai *soft regime*, yang lebih toleran, dan jauh tidak represif terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menjadi ekstrim dan radikal, apabila dibandingkan dengan rejim-rejim di Timur Tengah. Kenyataan ini mengakibatkan tidak terjadinya radikalisasi kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menjadi ekstrim. Kekerasan dan terorisme negara hanya akan mendorong kelompok-kelompok seperti itu untuk menjadi lebih radikal dan ekstrim.

Kelima, perubahan politik pemerintah yang sejak kebangkitan Orde Baru sampai menjelang akhir 1980-an cenderung *hostile* kepada gerakan Islam. Kelompok-kelompok usrah yang cenderung eksklusif dan radikal seolah-olah menemukan *ground* dengan kebijakan ini. Tetapi mereka kehilangan momentum, ketika sejak awal 1990-an pemerintah mengubah kebijakannya dengan melakukan *rapprochement* yang bahkan sering disebut sebagai *honeymoon* kepada gerakan Islam dan kaum Muslimin umumnya.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam era globalisasi sekarang ini, sulit dihindari gagasan atau kelompok ekstrim, sebagaimana dikemukakan di atas, juga dapat masuk ke Indonesia. Bahkan, dalam waktu belakangan, terdapat kecenderungan bahwa paham dan aliran ekstrim seperti ini juga mulai merambah ke Indonesia, dan merasuki sedikit kalangan kaum Muslimin, khususnya generasi muda dan mahasiswa.

Kelompok-kelompok seperti ini jauh dari populer, apalagi untuk dapat melakukan gerakan yang secara keagamaan dan politik signifikan. Bahkan sebaliknya, kelompok-kelompok tersebut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan domestifikasi terhadap pandangan-pandangan dan aktivitas-aktivitas, jika mereka ingin *survive*. Sebagaimana terlihat dari kelima faktor yang dikemukakan di atas, tidak ada *raison d'être* yang solid bagi kemunculan kelompok-kelompok seperti itu. Dan, menurut hemat saya, keempat faktor itu harus senantiasa dikembangkan apabila kita tetap menginginkan untuk mempertahankan kehidupan keagamaan dan politik yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi.

### **Saran**

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini dapat disusun menjadi lebih baik dan sempurna.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Zahroh, Muhammad. Tarikh al-madzahib al-Islamiyah I. Kairo : Dar al-Fikr al-'Araby.tt.
- Azyumardi Azra (2002), "Kelompok 'Sempalan' di Kalangan Mahasiswa PTU:Anatomi Sosio-Historis", dalam Fuaduddin & Cik Hasan Bisri, Editor (2002), Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi,Ciputat: Logos.
- Din Syamsuddin, M. (2002),Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani,Ciputat: Logos.
- Muhammad Muhibbuddin. Terapi Hati, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012



## **UPAYA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENANGKAL RADIKALISME**

**MURNI**

### **Abstract**

This paper aims to reveal and explain the factors of entry and development of radicalism in Islamic educational institutions. Then explain about the antiradikalisme Islam education in preventing and tackling radicalism in Islamic educational institutions. Islamic educational institutions in this contemporary era need to get more attention from academics and education practitioners, because Islamic educational institutions are vulnerable to the entry of radical ideas. These ideas are spread by various groups who simultaneously embrace radicalism in Indonesia. On the other hand, Islamic educational institutions are not yet fully prepared and pay attention to the symptoms of radicalism that seek to enter into it. The Islamic educational institution is still focused on its internal, and has not fully responded to the symptoms of radicalism in Indonesia. This paper is focused on Islamic educational institutions, because the concrete form of the implementation of Islamic education is in the institution. Islamic educational institutions have a strong potential to ward off radicalism so as not to freely enter and poison educators and learners. Islamic education institutions in this case need to respond seriously, namely by growing awareness about the existence of radicalism. This awareness will lead to massive movements. Departing from awareness, Islamic education institutions should implement and optimize the management of Islamic education continuously, then apply Islamic education with multicultural, tolerant, and moderate. With this, all educators and learners in educational institutions can have a broad and respectful view, and avoid radicalism.

**Keyword:** Islamic Educational Institutions, Radicalism, Multikultural



### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap serta menjelaskan faktor-faktor masuk dan berkembangnya radikalisme di lembaga pendidikan Islam. Kemudian menjelaskan mengenai pendidikan Islam anti radikalisme dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme di lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam di era kontemporer ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari para akademisi dan praktisi pendidikan, karena lembaga pendidikan Islam rentan dimasuki oleh paham-paham radikal. Paham-paham ini disebarkan oleh berbagai golongan yang secara bersama-sama menganut paham radikal di Indonesia. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya siap dan memperhatikan adanya gejala radikalisme yang berusaha masuk ke dalamnya. Lembaga pendidikan Islam masih fokus terhadap internalnya, dan belum sepenuhnya merespon gejala-gejala radikalisme di Indonesia. Tulisan ini difokuskan pada lembaga pendidikan Islam, karena wujud konkret dari pelaksanaan pendidikan Islam ada pada lembaganya. Lembaga pendidikan Islam memiliki potensi yang kuat untuk menangkal radikalisme agar tidak secara luas masuk dan meracuni pendidik dan peserta didik. Lembaga pendidikan Islam dalam hal ini perlu untuk merespon dengan serius, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran mengenai adanya radikalisme. Kesadaran ini akan membuahkan gerakan-gerakan yang masif. Berangkat dari kesadaran, lembaga pendidikan Islam harus menerapkan dan mengoptimalkan manajemen pendidikan Islam secara kontinyu, kemudian menerapkan pendidikan Islam berwawasan multikultural, toleran, dan moderat. Dengan hal tersebut, seluruh pendidik dan peserta didik di lembaga pendidikan dapat berpandangan yang luas dan selalu menghargai, serta terhindar dari paham-paham radikal.

**Kata Kunci:** Lembaga Pendidikan Islam, Radikalisme, Multikultural

### **PENDAHULUAN**

Dunia pendidikan formal di Indonesia, kini sangat rawan disusupi oleh radikalisme.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi perhatian yang serius dalam seminar di Yogyakarta. Ahmad Syafii Maarif yang hadir sebagai

---

<sup>1</sup>[http://news.metrotvnews.com/peristiwa/4\\_KZEoWpk-dunia-pendidikan-dinilai-rawandisusupi-paham-radikalisme](http://news.metrotvnews.com/peristiwa/4_KZEoWpk-dunia-pendidikan-dinilai-rawandisusupi-paham-radikalisme)



pembicara menyinggubahwa radikalisme telah masuk padalembaga pendidikan, dengan indikatorpara dosen dan gurunya ada yangmengajarkan radikalisme.<sup>2</sup> Sifat pendidikan yang terbuka dan demokratis, memberikan ruang bagi gerakan radikal untuk menyusupkan pemahamannya. Bahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam tertentu, infiltrasi radikalisme sudah semakinnyata, hingga lembaga ini rela mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mengekspresikan dari pemahaman radikal. Lembaga pendidikan Islam tersebut tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh gerakan radikal untuk menyebarkan pemahamannya kepada para peserta didik. Lambat laun, pemahaman radikal bisa tumbuh subur di lembaga pendidikan Islam, tanpa ada yang menyadari tentang bahayanya pemahaman ini bagi guru dan peserta didik.<sup>3</sup>

Keterbukaan lembaga pendidikanIslam ini sejatinya sudah tepat, namun kekurangannya ialah belum ada kontrol yang kuat dari pengelola lembaga pendidikan. Kontrol ideologi dan kontrol teori yang seharusnya menjadi fokus, pada kenyataannya masih ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kecolongan. Terbukanya ruang yang lebar dalam lembaga pendidikan Islam tanpa diiringi dengan kontrol yang kuat, akan sangat membahayakan bagi masadepan lembaga pendidikan. Lemahnyakontrol ini, bukan saja membahayakan lembaga pendidikan Islam, tetapi jugamasyarakat sekitar, terutama para wali peserta didik. Mereka yang semula amandan tidak terpengaruh radikalisme, dikhawatirkan menjadi kelompok yang radikal.

Hal yang sangat menghawatirkan adalah ketika lembaga pendidikan Islam digadang-gadang menjadi agen dalam menangkal radikalisme, justru bisa berpotensi menjadi lembaga yang melestarikan ajaran radikal. Hal ini bisa terjadi jika pendidikan agama yang dijadikan sebagai sumber nilai yang moderat belum mewarnai atmosfer akademik di lembaga pendidikan Islam.

---

<sup>2</sup>Seminar bertema "Bisikan dari Jogja: Refleksi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" pada 21-22 Oktober 2017. <https://nasional.tempo.co/read/1026907/3-tahunjokowi-jk-akademikus-soroti-menguatnya-radikalisme>

<sup>3</sup>Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 46



Begitu juga dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, jika tidak mewarnai secara akademis dan praktis, gempuran radikalisme di lembaga pendidikan Islam akan terus menjangkar dan berpotensi mengakar. Potensi berkembangnya radikalisme dalam lembaga pendidikan, diungkapkan oleh Suhardi Alius sebagai kepala BNPT, ia menjelaskan bahwa kini tidak ada sesuatu yang benar-benar suci dari radikalisme, termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan saat ini sungguh menghawatirkan, karena sudah terinfiltrasi radikalisme, baik radikal kanan maupun radikal kiri. Adanya infiltrasi ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berpaham radikal rata-rata orang yang mampu dalam hal finansial, berpendidikan tinggi, dan bahkan ada yang sudah bergelar doktor.<sup>4</sup>

Di sisi lain, gerakan radikal yang sangat intens, akan memanfaatkan ruang yang terbuka dan kurangnya kontrol tersebut untuk menebarkan pemahamannya dengan berbagai macam cara. Menurut Irfan Amalee sebagai Direktur Peace Generation, indoktrinasi paham radikal dilakukan melalui beberapa narasi, yaitu pertama narasi politik yang ditampilkan dalam bingkai ketidakadilan, dan memprovokasi untuk melakukan jihad dalam artian perang. Kedua, narasi historis, pendidikan sejarah yang sejatinya dijadikan untuk menumbuhkan wisdom, justru menumbuhkan dendam. Ketiga, narasi psikologis, dengan menjadikan tokoh-tokoh kekerasan sebagai pahlawan yang harus diteladani. Keempat, kekerasan dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan problem ketidakadilan, ketimpangan, dan lain sebagainya. Kelima, narasi keagamaan dengan mengeksploitasi ayat-ayat al-Qur'an dan ditafsirkan secara eksklusif.<sup>5</sup>

Radikalisasi tersebut dapat diimplementasikan melalui guru sendiri, kurikulum, buku ajar, atmosfer lingkungan pendidikan, dan pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, dunia pendidikan Islam saat ini harus responsif terhadap gejala-gejala radikalisasi di dunia pendidikan Islam. Responsif di sini diartikan bahwa lembaga pendidikan harus secepatnya menyadari sekaligus mencegah dan

---

<sup>4</sup>[http://news.metrotvnews.com/hukum/Dk\\_q62EeK-bnpt-riset-radikalisme-di-duniapendidikan](http://news.metrotvnews.com/hukum/Dk_q62EeK-bnpt-riset-radikalisme-di-duniapendidikan)

<sup>5</sup>[//nasional.kompas.com/read/2017/05/02/15444221/radikalisme.menyus-up.ke.dunia.pe.ndidikan.ini.lima.modusnya](http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/15444221/radikalisme.menyus-up.ke.dunia.pe.ndidikan.ini.lima.modusnya).



menanggulangi radikalisasi di dunia pendidikan Islam. Kesadaran lembaga pendidikan mengenai bahayanya radikalisme agama, akan memunculkan gerakan-gerakan yang menolak perkembangan radikalisme di lembaga pendidikan Islam, baik PAUD, MI, MTs, MA, MAK, hingga perguruan tinggi. Pencegahan radikalisme di lembaga pendidikan Islam ini perlu perhatian yang khusus, karena mencegah radikalisme memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, agama, dan gerakan. Menurut Mukhammad Ilyasin sebagai rektor IAIN Samarinda menyatakan bahwa untuk mencegah gerakan radikalisme ada tiga cara, yaitu selektif dalam merekrut tenaga pendidik, kurikulum berwawasan multikultural, penguatan organisasi kemahasiswaan, dan kesadaran berbasis keteladanan.<sup>6</sup>

Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam lainnya, yang juga membutuhkan perhatian dan redesign serta reaktualisasi. Pendidikan Islam yang dijadikan sebagai sarana pewarisan tradisi para pendahulu kepada generasi di zaman sekarang, masih sangat penting dan relevan untuk diteliti mengenai bagaimana konsep dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme di lembaga.

Pendidikan Islam dalam perspektif sejarah, mencegah radikalisme dengan menerapkan pembelajaran yang inklusif dan toleran. Jika terdapat perbedaan antar sahabat, maka hal tersebut tidak lantas membuat para sahabat saling bermusuhan dan bertindak radikal. Dalam perkembangannya, imam madzhab yang notabene masih memiliki ikatan guru dan murid, mereka berbeda pendapat dan tetap saling menghormati. Melalui tulisan ini, pendidikan Islam berusaha penulis jelaskan dengan komprehensif mengenai sifat-sifat pendidikan Islam yang moderat, toleran, dan terbuka dalam mencegah radikalisme. Ciri khas pendidikan Islam tersebut saat ini perlu dikembangkan dalam konteks yang lebih luas dalam berbagai komponen pendidikan Islam, dengan tujuan untuk memperkaya kemoderatan pendidikan Islam di Indonesia.

Rumusan Masalah

- a. Mengapa radikalisme berpotensi berkembang di lembaga pendidikan Islam?

---

<sup>6</sup><http://www.iainsamarinda.ac.id/index.php/2017/09/15/rektoriain-samarinda-paparkan-pola-pendidikan-antiradikalisme-di-seminar-internasional/>



- b. Bagaimana gerakan lembaga pendidikan Islam dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme?

#### Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menjelaskan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang memberikan peluang bagi berkembangnya radikalisme di lembaga pendidikan Islam.
- b. Gerakan lembaga pendidikan Islam dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoretis dapat berkontribusi dalam mengembangkan dan menebarkan gagasan-gagasan pencegahan radikalisme di dunia pendidikan Islam.
- b. Manfaat secara praktis dapat melaksanakan gagasan pendidikan Islam anti radikalisme di lembaga lembaga pendidikan Islam.

### **RADIKALISME DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan adanya perubahan, pergantian, dan perbaikan dalam sistem sosial yang telah ada di masyarakat sampai akarnya. Paham radikal sangat menghendaki adanya perubahan secara total, diganti dengan sistem yang menurutnya ideal, jauh lebih baik serta memberikan keadilan dan kemaslahatan. Cara-cara yang digunakan dalam merubah sistem seringkali menghalalkan kekerasan, hingga banyak yang menjadi korban dari misi kelompok radikal, sekalipun orang-orang yang tidak bersalah.<sup>7</sup>

Paham yang demikian disebarkan melalui berbagai macam media dan lembaga, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Sasaran radikalisasi mereka adalah para remaja dan pemuda yang masih berada di bangku sekolah. Analisis psikologis yang mereka lakukan menganggap bahwa remaja dan pemuda masih dalam kondisi labil dan mudah diprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Tidak hanya itu, pendidikan Islam secara sistem juga menjadi sasaran radikalisasi, karena hal ini lebih menjanjikan untuk indoktrinasi pemahaman mereka. Oleh karena itu, para pengelola perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme menginfiltrasi lembaga

---

<sup>7</sup>Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 116



pendidikan Islam. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah:

1. Faktor Internal Pendidikan Islam

Faktor internal ini merupakan penyebab yang muncul dari dalam lembaga pendidikan Islam sendiri, yang berupa sifat dan sikap. Lembaga pendidikan Islam yang menjadi titik pusat proses pembelajaran, dilaksanakan dengan menjalankan semua komponen pendidikan Islam secara serasi, mulai dari dasar pendidikan Islam, tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, lingkungan, sarana-prasarana, dan pembiayaan. Namun ketika satu di antara komponen-komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka stabilitas pendidikan Islam menjadi terganggu. Faktor-faktor internal yang memberikan ruang masuknya radikalisme .

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Belum Maksimal

Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini ialah pendidik pada lembaga pendidikan Islam. Pendidik pada lembaga pendidikan Islam tidak semua benar-benar memahami agama Islam dan ilmu pendidikan Islam secara mendalam. Pendidik tersebut hanya fokus terhadap konsentrasi yang ditekuninya sejak berada di bangku kuliah, dan cenderung belum merelevansikan antara ajaran Islam dengan bidang yang ditekuninya.

Bahkan, hal-hal prinsip yang seharusnya dipahami oleh pendidik, pada kenyataannya masih banyak yang belum menyentuhnya. Selain itu, pendidik di lembaga pendidikan Islam masih belum maksimal dalam memahami dan mempraktikkan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pokok yang seharusnya dikuasai oleh pendidik tersebut pada kenyataannya masih belum banyak menyentuhnya. Sekalipun ada yang mempelajarinya di bangku perkuliahan, tidak semua pendidik jurusan pendidikan ini menyenangi bidangnya. Ilmu pendidikan Islam dianggap tidak terlalu urgen dalam dunia pendidikan, baik secara teori maupun praktik.

Secara teori, pemahaman pendidik mengenai ilmu pendidikan Islam masih minim, maka tidak heran dalam menjalankan proses pendidikan masih belum maksimal. Ilmu pendidikan Islam seolah hanya diwajibkan bagi mereka para pendidik yang mengambil jurusan pendidikan, sedangkan bagi



yang lain seolah tidak ada kaitannya. Maka tidak heran jika pendidik tidak terlalu memahami peluang dan tantangan lembaga pendidikan di masa sekarang dan masa depan. Bahkan, tantangan radikalisme yang dipandang bahaya, ternyata masih belum terlalu diperhatikan.

Oleh karena itu, kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pendidik, kini perlu dikembangkan kembali dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yeni Wahid yang mengatakan bahwa "Banyak guru agama yang kualitasnya belum memenuhi standar, sehingga tidak dapat membendung masuknya paham radikal". Hal tersebut bukan saja khusus bagi pendidik agama Islam, tetapi juga sebenarnya persoalan kualitas dan beban dalam membendung masuknya paham radikal berada di pundak pendidik lain. Membendung masuknya radikalisme merupakan tanggung jawab bersama seluruh sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan Islam.<sup>8</sup>

### 3. Kurangnya Motivasi Mengembangkan Kompetensi

Perlunya mengupgrade ilmu pengetahuan bagi pendidik merupakan rutinitas yang harus dilakukan di setiap waktu. Namun pada kenyataannya, banyak pendidik-pendidik yang belum mengupgrade dan mengembangkan pemahamannya mengenai bidang yang ditekuninya. Ilmu yang dulu di dapatkan, tidak lagi dikembangkan. Maka reorientasi pendidikan dan pembelajaran, hanya menjadi wacana yang tidak membumi, sehingga lembaga pendidikan Islam menjadi belum responsif terhadap isu-isu terbaru dalam dunia pendidikan Islam. Pendidik hanya disibukkan dengan urusan administrasi dan pribadi yang banyak mengurus waktu dan tenaga. Urusan pengembangan diri dan inovasi pembelajaran menjadi sektor yang tidak terlalu dinormasikan dalam kesehariannya. Kemampuan diri dianggapnya sudah final, karena sudah mendapatkan posisi yang bagus dan bisa mengangkat strata sosial. Derajat sosial yang sudah terangkat juga mempengaruhi ketidakminatan pendidik dalam pengembangan pengetahuannya di masa kini. Merasa

---

<sup>8</sup><https://nasional.tempo.co/read/847299/wahid-foundation-lebih-60-persen-aktivis-rohissiap-jihad>

ahid-foundation-lebih-60-



nyaman dengan posisinya, membuatnya tidak lagi merasakan ancaman dan tantangan yang dapat menurunkan strata sosialnya.

#### 4. Kontrol yang Belum Maksimal

Kedua hal di atas bisa terjadi karena aktivitas pendidik kurang dikontrol oleh pendidik lainnya, terutama oleh kepala sekolah dan pengawas. Kontrol adalah salah satu dari fungsi manajemen pendidikan untuk mengendalikan arah pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya kontrol dapat membahayakan pendidik, pasalnya dengan keterbatasan pemahaman agama Islam dan ilmu pendidikan Islam, ia dapat terpengaruh dengan paham-paham radikal yang didapatkannya melalui media sosial maupun buku-buku yang ketat. Kemudian tanpa menelusuri sumber dan membandingkan dengan buku-buku keislaman lainnya, pemahaman parsial tersebut disampaikan dalam pembelajaran di kelas pada peserta didik.

Selain itu, ada pendidik dalam melaksanakan tugasnya terkesan mengabaikan aktivitas peserta didik di lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan. Mengabaikan artinya tidak mengontrol setiap aktivitas peserta didik, sehingga apapun aktivitas peserta didik tidak diketahui oleh pendidik. Hal ini ditunjukkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, pendidik hampir tidak menanyakan aktivitas peserta didik di sekolah dan di luar sekolah. Kebanyakan pendidik ketika memasuki kelas ataupun di luar kelas hanya membahasmata pembelajaran yang telah lalu maupun yang akan datang, tanpa diiringi identifikasi peserta didik.

Implikasi dari kurangnya kontrol ini, memberikan jalan bagi buku-buku yang ketat dan disisipi paham radikal untuk masuk ke lembaga pendidikan Islam. Ironisnya, buku-buku tersebut tidak ditelaah terlebih dulu, sehingga secara mudah dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran. Buku-buku yang masuk ke lembaga pendidikan Islam tidak terlebih dulu dibedah dan didiskusikan kontennya oleh seluruh pendidik. Pendidik menerima jadi dan membacanya tatkala hendak mengajar, bahkan membacanya belum sampai hatam. Ini artinya filter di beberapa lembaga



pendidikan Islam masih belum bagus, dah perlu untuk ditingkatkan lagi.<sup>9</sup>

#### 5. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi salah satu faktor masuknya paham radikal pada peserta didik. Ekstrakurikuler ini berupa kegiatan Rohis di lembaga pendidikan Islam, yang sangat membantu para peserta didik lain dalam memahami agama Islam. Anggota Rohis tidak semua mendalami agama Islam dengan merujuk pada sumber-sumber yang valid, tetapi banyak juga yang mengandalkan internet. Belajar melalui berbagai sumber memang bagus, tetapi yang menghawatirkan ialah jika situs-situs yang dikunjunginya berupa situs dari kelompok radikal yang berisi kebencian, kecurigaan, dan kekerasan. Tanpa sadar mereka terprovokasi oleh berbagai narasi yang dituliskan di situs-situs kelompok radikal. Diskusi dengan para kiai, ustadz, dan guru pun belum intens dalam membahas sebuah persoalan. Wahid Foundation menyatakan bahwa radikalisme dapat tumbuh dari kegiatan Kerohanian Islam.

Dari survei yang dilakukan Wahid Foundation pada 1.626 responden menyatakan bahwa 60% aktivis rohisi siap melaksanakan jihad di wilayah yang saat ini konflik dan 68% siap jihad di masa mendatang. Kemudian dari jumlah responden juga didapatkan hasil 37% sangat menyetujui dan 41% setuju bahwa Indonesia menjadi negara Islam, dengan membentuk sistem khalifah. Dari hasil tersebut, maka aktivis rohisi ini dapat pula menjadi faktor menguatnya radikalisme di lembaga pendidikan Islam.

#### 6. Faktor Eksternal

Dalam sejarahnya, kelompok khawarij menjadi percontohan gerakan radikalisme yang ingin menerapkan sistem sesuai keyakinannya pada masyarakat. Mereka tidak menerima keputusan arbitrase dalam menyelesaikan peperangan antara kelompok Alibin Abi Thalib dan Muawiyah dengan cara keluar dari barisan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian membuat kelompok sendiri. Dengan kelompok ini, mereka melakukan

---

<sup>9</sup><https://nasional.tempo.co/read/847299/w-persen-aktivis-rohisiap-jihad>

ahid-foundation-lebih-60-



berbagai gerakan untuk memerangi orang-orang yang dianggapnya salah, dengan mengafirkan dan mengklaim murtad muslim lainnya. Kaum ini memandang bahwa orang lain yang tidak mau menerima pandangannya dianggap sebagai musyrik.<sup>10</sup>

Mereka menginginkan penerapan konsep yang disusunnya berdasarkan visinya mengenai masyarakat kharismatik yang secara ketat berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Ketatnya penafsiran dan fanatisme dalam berpendapat, membuat mereka mengakui kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua pandangan mereka harus diikuti oleh muslim lainnya. Pada tahap selanjutnya, kaum khawarij jauh berada di pinggiran atau berada di luar ortodoksi Islam, baik secara politik ataupun keagamaan, hingga pada akhirnya menjadi gerakan yang radikal.<sup>11</sup>

Sedangkan di Indonesia, gerakan protes yang dilakukan pada zaman dulu meliputi enam gerakan, yaitu gerakan jagoan, gerakan anti Cina, gerakan anti tuan tanah, gerakan mistik, gerakan mesianistik, dan gerakan Islam abangan. Gerakan protes ini banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, khususnya petani, kemudian gerakan nasional pada abad 20 sudah pindah ke kota dan berubah bentuk menjadi voluntary association.<sup>12</sup>

Gerakan-gerakan protes tersebut merupakan ungkapan kekecewaan terhadap orang-orang yang memiliki power kuat, yang kemudian berbagai tindakannya banyak merugikan orang lain. Di era kontemporer ini, gerakan anti terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan negara mulai menguat, dengan munculnya kelompok-kelompok yang mengusung ide radikalisme, dalam hal ini pengusung ide tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama upaya menegakkan syariat Islam terdiri dari Jamaah Salafi, Front Pembela Islam, Front Pemuda Islam Surakarta, Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam. Kedua upaya mendirikan negara dan kekhalifahan Islam,

---

<sup>10</sup>John L. Esposito, *Unholy War*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 52

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 5

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *Muslim tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.57



yaitu Majelis Mujahidin Indonesia, Darul Islam, dan Hizbut Tahrir Indonesia.<sup>13</sup>

Selain itu, gerakan lainnya terakomodir dalam oraganisasi Hizbullah, Barisan Bismillah, dan Gerakan Pemuda Ka'bah.<sup>14</sup> Kelompok-kelompok tersebut ada dan mengusung radikalisme bukan secara tiba-tiba, tetapi ada faktor-faktor yang mendorongnya. Di antaranya ialah persoalan kemaksiatan yang tidak terlalu diperhatikan pemerintah, peminggiran umat Islam, dan anggapan bahwa rendahnya aktualisasi ajaran Islam bagi masyarakat. Gerakan-gerakan ini sangat mempengaruhi proses pendidikan di lembaga pendidikan Islam, karena mulai banyak pendidik dan peserta didik yang mendukung berbagai gerakan ini. Lembaga pendidikan dalam hal ini kurang menanggapi adanya pengaruh gerakan-gerakan tersebut, sehingga diskusi ataupun obrolan-obrolan untuk menyikapi hal tersebut belum terlaksana secara merata.

Dengan demikian, maka tidak heran jika radikalisme rentan masuk dalam lembaga pendidikan Islam secara mudah.

#### 7. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Pembelajaran sejak zaman dulu hingga saat ini banyak mengalami perubahan, terutama pasca berkembangnya teknologi dan Informasi. Siapapun bisa belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui internet yang serba mudah dan serba ada. Adanya internet ini kemudian banyak yang merubah sistem pembelajaran, dari tatap muka menjadi pembelajaran berbasis IT. Media pembelajarannya, teknik, dan metode semua berbasis IT, tanpa meninggalkan pembelajaran konvensional. Hal ini banyak membantu para pendidik dan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Namun maraknya berita hoax dan situs-situs radikal, sedikit banyaknya mengarahkan siapapun pada jurang nestapa. Banyak orang-orang yang menerima informasi dari internet tanpa disaring terlebih dahulu, tetapi langsung mempercayainya bahkan langsung disebar ke berbagai media sosial.

---

<sup>13</sup>Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 12

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 186



Hal inilah yang banyak membuat masyarakat Indonesia mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan kelompok radikal. Benih-benih radikalisme tersebar luas di internet dan berbagai media sosial, maka tidak heran jika banyak dari kalangan muda yang terpengaruh. Padahal seharusnya dalam membaca informasi harus dari situs-situs yang valid dan terpercaya. Jika membaca informasi dari situs lain, maka hal yang harus dilakukan adalah cerdas untuk menyeleksi informasi, dengan cara meneliti dulu background dari situs tersebut. Kemudian meneliti tulisan-tulisannya diambil dari sumber-sumber terpercaya atau bahkan memuat ujaran kebencian atau tidak. Pada intinya, penelitian situs ini bisa merujuk pada metode penelitian yang telah diterapkan oleh ulama hadis. Adapun landasan untuk menyeleksi ialah surat Al-Hujarat:

*artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al Hujarat: 49).*

## **GERAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM KONTRA RADIKALISME**

Pengertian pendidikan dalam Islam menurut Hasan Langgulung dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi individu dan dari segi masyarakat. Dari segi individu, pengertian pendidikan Islam adalah proses menemukan potensi (bakat dan minat) yang kuat dalam diri peserta didik dan mengembangkan potensipotensi yang ada di dalam diri manusia.<sup>15</sup> Sedangkan dari sudut masyarakat, pendidikan Islam adalah usaha untuk mewariskan budaya atau menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan agama ke dalam diri peserta didik.<sup>16</sup>

Pendidikan Islam dalam hal ini sangat memperhatikan dua hal yang saling berkaitan, yaitu potensi individu dan lingkungan tempat individu tersebut hidup. Hasan Langgulung menilai bahwa proses mewariskan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi muda - dalam memelihara identitas masyarakat - adalah hal yang saat ini

---

<sup>15</sup>Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad 21*, (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 69

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 75



harus digalakkan. Pertimbangannya ialah bahwa jika umat terdahulu sangat menekankan kejujuran dalam berkata-kata dan bertindak, maka umat di era kontemporer ini juga sangat membutuhkan kejujuran.<sup>17</sup>

Jika umat terdahulu sangat menekankan berpikiran dan perbuatan yang moderat, toleran, multikultur, dan tidak fanatik, maka umat Islam di zaman sekarang juga demikian. Oleh karena itu nilai-nilai kejujuran, moderat, toleransi, dan multikultur yang ditekankan dalam agama dan dilakukan umat terdahulu perlu untuk diwariskan kepada generasi muda di era kontemporer ini. Gagasan pendidikan Islam anti radikalisme ini penting, karena pendidikan Islam memiliki dua peluang, yaitu penyebar benih radikalisme dan penangkal radikalisme. Berbagai penelitian mengenai radikalisme menunjukkan bahwa ada lembaga-lembaga pendidikan tertentu tertentu yang mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme pada peserta didik.<sup>18</sup>

Jika yang dikuatkan adalah peluang yang pertama, maka lembaga pendidikan Islam menjadi alat mewariskan benih-benih radikalisme. Dalam hal ini, peluang kedua yang harus diperkuat oleh seluruh lembaga pendidikan Islam. Memperkuat lembaga pendidikan Islam dalam menangkal radikalisme, harus dilakukan melalui dua hal, yaitu memperkuat internal lembaga pendidikan Islam dan memperkuat faktor eksternal. Faktor internal menjadi faktor inti dari ketahanan lembaga pendidikan Islam, sedangkan faktor eksternal harus mendukung penuh lembaga pendidikan Islam. Internal lembaga pendidikan Islam masih banyak yang perlu dibenahi dan diperkuat, baik dalam segi manajemen, kebijakan, dan kerjasama dengan eksternal lembaga.

#### 1. Internal Lembaga Pendidikan Islam Membangun Kesadaran

Kini pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan radikalisme, yang ingin mengendalikan lembaga pendidikan Islam dan digunakan mewariskan doktrin-doktrinnya. Para akademisi dan praktisi pendidikan yang notebene memiliki daya

---

<sup>17</sup>Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 354

<sup>18</sup>Andik Wahyu Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi", *Jurnal Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. II, No. 1 Juni 2013), hlm. 133



pikir kritis, harus secara bersama berjuang untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal pertama yang harus dikuatkan adalah kesadaran individu dan kesadaran bersama.

Dalam menggagas pendidikan Islam yang anti radikalisme, para praktisi dan akademisi harus memiliki tiga kesadaran, yaitu kesadaran teologis yang berupa niat, kesadaran strategis sebagai motivasi agar selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan konsisten dalam jangka panjang, dan kesadaran operasional dalam arti ikhlas. Kesadaran memiliki posisi yang suci dalam pendidikan Islam, yaitu sebagai kunci dalam mewariskan nilai-nilai agama dan budaya sekaligus merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Kesadaran akan melahirkan ekspresi-ekspresi bervariasi dari individu maupun kelompok untuk memperbarui konsep pendidikan Islam. Kesadaran teologis dapat diartikan bahwa agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil' alamin, ini harus diyakini sebagai kebenaran yang abadi dan akan selalu membawa kemaslahatan bagi manusia. Agama yang rahmatan lil' alamin, bukanlah hal kosong tanpa makna, tetapi di dalamnya mengandung iman, ilmu, dan amal. Kemudian kesadaran strategis berusaha untuk bekerja bersungguh-sungguh berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Lalu nilai-nilai rahmatan lil' alamin direpresentasikan dalam pembaruan pendidikan Islam.<sup>19</sup>

Berangkat dari kesadaran teologis, strategis, dan operasional berbasis Islam rahmatan lil' alamin tersebut, maka ada dua gagasan mengenai pendidikan Islam, yaitu pertama mempertahankan konsep pendidikan Islam yang selama ini telah terlaksana, dan diperkaya dengan berbagai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Gagasan ini hanya menginfiltrasi nilai-nilai luhur bangsa dan agama dengan tanpa menghentikan penerapan konsep pendidikan Islam. Kedua, merekonstruksi konsep pendidikan Islam yang merepresentasikan nilai-nilai rahmatan lil' alamin dan memiliki ciri khas anti radikalisme. Gagasan kedua ini menyusun kembali konsep pendidikan Islam agar memiliki ciri khas tersendiri yang dapat intens menangkal radikalisme.

## 2. Mengoptimalkan Manajemen Pendidikan Islam

---

<sup>19</sup>Kuntowijoyo, *Muslim tanpa Masjid...*, hlm. 45



Di antara faktor yang membuat radikalisme masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam ialah kurangnya kontrol dari kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik kepada siapapun yang ada di lembaga pendidikan. Itu artinya manajemen pendidikan Islam yang diterapkan belum maksimal, baik perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrolnya, atau hanya sebagian saja yang tidak berjalan normal. Fungsi berbeda dijelaskan dalam literatur lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol.

Penerapan yang tidak maksimal dari keempat fungsi tersebut, tidak akan membawa hasil yang maksimal atau bahkan membuat lembaga pendidikan Islam terpuruk dalam kancah pendidikan nasional. Manajemen pendidikan Islam dalam membendung radikalisme, harus direvitalisasi, dioptimalkan, dan diaktualisasikan sesuai dengan teori yang sudah dipelajari dari berbagai ahli. Optimalisasi manajemen ini harus dilakukan dalam beberapa hal, yaitu dalam organisasi lembaga pendidikan, kurikulum, pembelajaran, pendidik, peserta didik, pembiayaan, dan lingkungan lembaga pendidikan. Aktor utama dalam mengoptimalkan manajemen pendidikan ini ialah kepala sekolah dan kepala madrasah dengan didukung oleh anggota organisasi lembaga pendidikan. Kerjasama yang saling mendukung ini harus dilakukan secara kontinyu, ibaratkan dalam pertarungan di babak final. Ketika mengoptimalkan manajemen pendidikan Islam, maka harus ada sifat pendidikan yang menjadi ciri dari pengoptimalan tersebut. Hasil dari pengoptimalan manajemen pendidikan Islam akan muncul sifat-sifat lembaga pendidikan yang berupa

- a) setiap program yang disusun berprinsip pada panduan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor memakai landasan akhlak yang terpuji.
- b) diversifikasi program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas, yang mengorientasikan pada penampilan, tingkah laku peserta didik agar memiliki rasa bertanggung jawab terhadap Allah, keluarga, bangsa, dan lingkungannya.



- c) membangun kerjasama dengan institusi lain, sehingga akan muncul solidaritas antar institusi.<sup>20</sup>

3. Memperkuat Pemahaman Agama dan Pancasila

Ketika manajemen pendidikan Islam sudah dipotimalkan, maka hal yang perlu dilakukan dalam membendung radikalisme ialah memperkuat pemahaman Agama dan ideologi Pancasila. Agama dan Pancasila bukanlah hal yang bertentangan, karena Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal Indonesia. Pemahaman agama dipercaya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kebhinnekaan di Indonesia. Agama menjadi dasar kehidupan umat Islam di Indonesia yang sudah paten dan tidak bisa ditawar lagi. Maka di lembaga pendidikan Islam sangat ditekankan kedalaman pemahaman agama, sebagai bekal beribadah dan bersosial. Memperkuat pemahaman agama ini sebagai respon terhadap kelompok radikal yang bercirikan lemah dalam memahami hakikat agama Islam. Pengetahuan yang setengah-setengah dapat membuat seseorang merasa berpengetahuan sempurna, padahal masih banyak hal-hal yang belum diketahunya.<sup>21</sup>

Pemahaman yang sepotong-sepotong ini menimbulkan pemahaman yang parsial, karena keterkaitan ayat satu dengan yang lainnya tidak diperhatikan. Kemudian hal tersebut akan menggerus esensi dari ajaran agama sendiri. Merasa sudah tahu dan sudah benar mengarahkan mereka berani bertindak dengan radikal. Hal inilah yang seringkali ditemukan dalam kasus-kasus kelompok radikal di mancanegara. Selain itu, pemaknaan terhadap Pancasila juga perlu dikuatkan dan diarahkan pada hal yang positif, jangan sampai klaim kafir terhadap Pancasila merebak di Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan manifestasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal Indonesia. Sebagai intisari dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur, maka kedudukan Pancasila di Indonesia ialah sebagai

- a. pandangan hidup bangsa,
- b. dasar negara,

---

<sup>20</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm.373-374

<sup>21</sup>Yusuf Qhardhawi, *Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm.53



c. ideologi bangsa dan negara.

Ketiga kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang urgen di Indonesia, maka semua masyarakat Indonesia harus memahami makna dari Pancasila ini dengan benar. Oleh karenanya, parapendidik dan orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan, perlu mengembangkan kompetensinya untuk memperkuat pemahaman tentang agama Islam dan Pancasila. Bagi pendidik, memperdalam pemahaman agama melalui pengajian, dialog, dan membaca buku-buku agama yang berciri khas moderat. Pemahaman agama bagi peserta didik di lembaga pendidikan Islam bisa diperkuat melalui pelajaran pendidikan agama Islam dan dibantu oleh para pendidik lainnya agar setiap pelajaran dikaitkan dengan ajaran Islam yang hakiki. Kemudian Pancasila juga harus diperkuat melalui akulturasi nilai-nilai Pancasila pada setiap mata pelajaran yang ada. Dengan pemahaman yang kukuh, maka pendidik dan peserta didik dapat menghadapi dan meminimalisir gempuran gerakan radikalisme yang berusaha menyusup di lembaga pendidikan Islam.<sup>22</sup>

#### 4. Mengimplementasikan Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural

Pengoptimalan manajemen pendidikan Islam akan mempersempit ruang gerak kelompok radikal menyusup ke lembaga pendidikan Islam. Fungsi yang sudah dioptimalkan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau kontrol akan memperkokoh lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya lembaga pendidikan tidak perlu bersikap eksklusif, bahkan sebaliknya harus bersifat terbuka terhadap berbagai usul, saran, dan perbedaan dalam lingkup pendidikan ataupun yang lebih luas.<sup>23</sup>

Dalam membendung radikalisme, perlu landasan multikultural dalam lembaga pendidikan Islam untuk membangun kesadaran akan perbedaan dan penghormatan. Prinsip-prinsip dari pendidikan Islam berwawasan multikultural

---

<sup>22</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 107-122

<sup>23</sup>24Irwan Masduqi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. II, No. 1, Juni 2013, hlm.8



terdiri dari beberapa hal, yaitu: pertama, kesadaran mengenai perbedaan kultur, agama, ras, dan golongan. Kedua, perbedaan adalah rahmat yang dapat memperkaya dan mendinamiskan kebudayaan Islam. Ketiga, ketika mengetahui adanya perbedaan dalam khazanah Islam, maka umat muslim perlu memilih pendapat yang moderat dari berbagai pendapat yang ekstrem. Keempat, perlu menjauhi klaim kebenaran diri sendiri. Kelima, tolong-menolong terhadap persoalan yang telah disepakati banyak golongan. Keenam, menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai persoalan yang diperselisihkan oleh ulama. Ketujuh, menghormati terhadap pendapat orang lain dengan asas kesadaran bahwa mungkin kebenaran bisa muncul dari manapun dan dari siapapun.

Multikulturalisme dalam pendidikan Islam dapat memunculkan sikap saling menghargai dan menghormati. Dari prinsip-prinsip mengenai multikultural di atas, maka benih-benih radikalisme akan dapat dibendung dan digantikan dengan pemikiran yang multikultural. Ada tiga hal dalam memposisikan pendidikan Islam berwawasan multikultural di lembaga pendidikan Islam, yaitu pendidikan berwawasan multikultural sebagai filsafat pendidikan, sebagai mata pelajaran atau kajian khusus, dan sebagai pendekatan dalam proses pendidikan. Dari ketiga hal ini, yang paling memungkinkan untuk diterapkan ialah multikultural sebagai pendekatan dalam pendidikan dan kajian. Sedangkan jika diimplementasikan sebagai filsafat pendidikan, maka itu akan lebih baik, karena pelaksanaan pendidikan sebagai pengembangan konsep multikultural.<sup>24</sup>

5. Mengimplementasikan Pendidikan Islam yang Moderat dan Toleran Moderat

Islam merupakan jalan tengah dalam berbagai hal, baik dalam hal konsep, perilaku, akidah, ibadah, dan hubungan sesama manusia. Sikap moderat merupakan salah satu ciri khas Islam dan merupakan salah satu tegaknya Islam di dunia.<sup>25</sup> Sikap moderat artinya berada di tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak

---

<sup>24</sup>Tatang M. Amirin, "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 6-7

<sup>25</sup>Yusuf Qhardhawi, *Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya...*, hlm.16-17



ekstrem kiri, sehingga dengan sikap yang moderat ini akan dengan mudah untuk mengenali kelompok-kelompok yang ekstrem. Sikap moderat dalam Islam merujuk pada surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya:

*Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

Ummatan wasathan adalah kata kunci yang perlu diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam. Moderat di lembaga pendidikan Islam bisa diimplementasikan dalam beberapa hal, yaitu 1) moderat dalam menentukan kebijakan, 2) moderat dalam menerapkan manajemen pendidikan Islam, 3) moderat dalam pembelajaran, 4) moderat dalam kurikulum pendidikan, 5) moderat dalam pembiayaan, dan 6) mendesain lingkungan yang moderat. Moderasi dalam beberapa hal ini perlu dilaksanakan sebagai upaya menimbulkan kebiasaan yang moderat dalam berbagai hal. Harapannya ialah lembaga pendidikan tidak serta-merta menerima atau mengikuti pemahaman-pemahaman yang radikal.<sup>26</sup>

#### 6. Toleran

Pengertian toleransi dijelaskan dalam deklarasi UNESCO saat konferensi di Paris pada 25 Oktober-16 November 1996, bahwa toleransi adalah: "Rasa hormat penerimaan, dan apresiasi terhadap keragaman budaya dan ekspresi kita. Toleransi dapat terwujud jika didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, hati nurani, kebebasan berfikir, dan kebebasan keyakinan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan. Toleransi adalah sikap aktif yang mengakui hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental orang lain".

Pendidikan Islam yang toleran dapat diimplementasikan pada sesama muslim dan non muslim, yang bertujuan untuk mendorong peserta didik agar bersedia menerima dan menghormati perbedaan pendapat dari luar pemahamannya. Pendidikan ini menekankan pada kontrol emosi diri dalam perbedaan, nilai-nilai kebijaksanaan dan mewujudkan cinta kasih terhadap sesama manusia dalam bingkai Bhinneka

---

<sup>26</sup>Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*, (Bandung, Mizan, 2011), hlm. 15



Tunggal Ika. Bangsa Indonesia sangat menekankan implementasi toleransi dalam pendidikan Islam, pasalnya keragaman tanpa adanya toleransi akan membuahkan malapetaka yang hebat.

Sekalipun toleran, namun pendidikan Islam tidak menghendaki peserta didik dan mahasiswa menjadi apatis dan mentolerir berbagai problem sosial. Toleransi dalam pendidikan Islam perlu dibangun di atas kebudayaan yang kritis, sehingga peserta didik dan mahasiswa dapat memberikan kiritik dan saran bagi siapapun yang melanggar kode etik sosial. Toleransi bukan semata-mata acuh terhadap berbagai macam problem sosial, namun harus tetap bertanggung jawab dalam mengontrol sosial. Mengormati, mengakui, serta dibarengi kontrol sosial terhadap perbedaan, dapat memberikan kestabilan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat mempersempit ruang masuknya radikalisme.

## **EKSTERNAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

### **Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pemerintah di sini berperan mengatur pengelolaan lembaga pendidikan mengenai kurikulum, pedagogi, penilaian, pengembangan kompetensi pendidik, dan pemeliharaan sarana-prasarana. Pengaturan ini dilakukan melalui penerbitan kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran. Adapun fungsi kebijakan ini ialah 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas dalam menukur dan mengontrol kinerja peserta didik dan pendidik.<sup>27</sup> Pemerintah dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk lembaga pendidikan dalam menangkal radikalisme. Kebijakan ini mutlak diperlukan untuk membangun dan memperkuat ketahanan lembaga pendidikan, sehingga radikalisme dapat dicegah secara sistematis. Adanya kebijakan anti radikalisme dari pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani radikalisme di lembaga pendidikan. Keseriusan ini juga harus ditanggapi oleh lembaga pendidikan dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan secara

---

<sup>27</sup>Irwan Masduqi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. II, No. 1, Juni 2013, hlm. 11-13



kontinyu dan sistematis. Peran masyarakat dalam menangkal radikalisme akan terwujud secara sempurna dari masyarakat yang saleh. Masyarakat saleh ialah masyarakat yang percaya bahwa mereka memiliki risalah yang harus disampaikan kepada umat manusia dan dilestarikan bersamanya. Risalah tersebut ialah keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang harus selalu diterapkan di sepanjangmasa tanpa terpengaruh perubahan zaman. Masyarakat saleh bertugas sekuat tenaga dalam menyampaikanrisalahnya kepada manusia lainnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa batasan waktu dan tempat.<sup>28</sup>

Masyarakat dan lembaga pendidikan Islam memiliki relasi yang kuat, keduanya saling membutuhkan dan saling mendukung. Masyarakat juga bertanggung jawab jika terjadi dekadensi moral, pengelolaan tidak maksimal, dan terjadinya radikalisme di lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, masyarakat perlu meyakini peran dan tanggung jawabnya terhadap perkembangan dan ketahanan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer ini. Masyarakat harus peduli dan mengulurkan tangan terhadap berbagai persoalan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan akan menjadi lembaga yang tahan banting apabila sokongan masyarakatnya juga kuat, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini peran masyarakat salehialah sebagai agen, yangselalu menebarkan pemahaman keagamaan dan kebangsaan mengenai keadilan, kebenaran, dan kebaikan, baik di lingkungan masyarakat sendiri maupun di lembaga pendidikan Islam. Masyarakat saleh akan menolong dan membina anggota masyarakat dan lembaga pendidikan Islam untuk membina hubungan-hubungan yang baik dan sesuai, kerjasama, besahabat, setia kawan, interdependen dan seimbang.

Pembinaan terhadap relasi sosial dengan pihak-pihak lain, merupakan upaya untuk memperkuat kerjasama dan hubungan baik antar sesama lembaga pendidikan. Di samping itu, kontrol antar berbagai lembaga terhadap berbagai peserta didik juga dapat maksimal melalui relasi ini. Partisipasi aktif masyarakat secara resmi bisa melalui komite sekolah/madrasah, sedangkan di luar itu masyarakat dapat mengoptimalkan perannya melalui organisasi

---

<sup>28</sup>Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 132



masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama' ataupun organisasi dan komunitas-komunitas lainnya. Wadah dalam bentuk organisasi dan komunitas tersebut dapat membangun relasi dan dengan mudah melakukan gerakan pengawasan dan penguatan pada lembaga pendidikan Islam secara intens. Baik itu melalui pengajian-pengajian di masjid, mushola, TPQ maupun seminar-seminar dengan mengajarkan materi-materi agama Islam dan nilai-nilai luhur bangsa.<sup>29</sup>

Ormas-ormas yang sudah memiliki lembaga pendidikan formal sendiri, juga harus merangkul dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengokohkan lembaga pendidikan Islam. Ormas juga perlu mengorganisir para wali murid khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan lembaga pendidikan Islam. Persoalan utama ialah membangun kepedulian terhadap persoalan radikalisme, masyarakat harus bergerak dalam sterilisasi dan membendung ancaman-ancaman yang datang dari gerakan radikalisme.

## **PENUTUP**

Lembaga pendidikan Islam sangat rentan dimasuki oleh radikalisme, pasalnya perhatian lembaga pendidikan terhadap pengaruh gerakan-gerakan ini masih minim. Tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan Islam tertentu yang belum memiliki ketahanan secara sistematis dalam menghadapi masifnya gerakan radikal ini. Radikalisme seolah tidak dianggap berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam, keduanya seolah memiliki jalan sendiri yang tidak saling bersinggungan.

Oleh karena itu, para pendidik minim kesadaran dan kurang mengembangkan kompetensinya. Kemudian kurang mengontrol peserta didik dan siapapun yang ada di lembaga pendidikan. Merebaknya berita-berita hoax dan situs-situs radikal banyak membuat siapapun di lembaga pendidikan terpengaruh. Gerakan radikal memanfaatkan internet untuk merekrut anggota-anggota baru melalui internet. Kemudian mereka sangat ingin menguasai lembaga pendidikan tertentu untuk menanamkan paham-pahamnya pada para peserta didik. Masifnya gerakan radikal ini seharusnya

---

<sup>29</sup>Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad 21...*, hlm. 17



ditanggapi dengan serius oleh kepala sekolah dan pendidik-pendidiknya, agar radikalisme tidak secara mudah masuk ke lembaga pendidikan. Ketika pendidikan anti radikalisme diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam, maka lembaga pendidikan Islam dapat membendung paham-paham yang bersifat radikal.

Dalam hal ini, sesuatu yang harus dilakukan adalah menyadari akan masifnya gerakan radikal di Indonesia, menerapkan dan mengoptimalkan manajemen pendidikan Islam, mengimplementasikan pendidikan Islam berwawasan multikultural, toleran, dan moderat. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka lembaga pendidikan Islam bisa membendung gerakan radikalisme agar tidak leluasa masuk di lembaga pendidikan Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Esposito, John L., *Unholy War*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kuntowijoyo, *Muslim tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- Langgung, Hasan, *Pendidikan Islam dalam Abad 21*, Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004).
- Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran*, Bandung, Mizan, 2011.
- \_\_\_\_\_, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. II, No. 1, Juni 2013.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, "Membangun Kesadaran Inklusif Multikultural untuk Deradikalisasi", *Jurnal Pendidikan*



- Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. II, No. 1 Juni 2013.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Qhardhawi, Yusuf, *Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya*, Bandung: Mizan, 1989.
- Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.

**Internet**

- <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/4KZEoWpk-dunia-pendidikan-dinilairawan-disusupi-paham-radikalisme>
- <https://nasional.tempo.co/read/1026907/3-tahun-jokowi-jk-akademikus-sorotimenguatnya-radikalisme>
- <http://news.metrotvnews.com/hukum/Dkq62EeK-bnpt-riset-radikalisme-di-duniapendidikan>
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/15444221/radikalisme.menyusup.ke.dunia.pendidikan.ini.lima.modusnya>
- <http://www.iain-samarinda.ac.id/index.php/2017/09/15/rektor-iain-samarinda-paparkan-polapendidikan-anti-radikalisme-di-seminarinternasional/>
- <https://nasional.tempo.co/read/847299/wahid-foundation-lebih-60-persen-aktivisrohis-siap-jihad>
- <https://jalandamai.org/cerdasmenyeleksi-informasi.html>





## ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

SAFUDIN ZUHRI

### Abstract

Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan Islam transnasional yang bergerak dalam dakwah dan politik. Didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Tujuan utamanya adalah melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, serta mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara islami dalam naungan *khilafah Islamiyah ala minhaj al-nubuwwah*. Untuk mencapai tujuan tersebut HT menerapkan langkah-langkah dakwahnya dalam tiga tahap: *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tafa''ul* (interaksi) dengan umat, dan *istilam al-hukmi* (menerima kekuasaan) dari umat. Di Indonesia HT mendeklarasikan diri dengan nama HizbutTahrir Indonesia (HTI). Masuk pertama kali pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Abd. Rahman al-Baghdadi. Adapun aktivitasnya yang menonjol di Indonesia saat ini adalah mengorganisir demonstrasi, menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, publikasi melalui media, serta silaturahmi ke berbagai ormas Islam dan pemegang kekuasaan. Dalam perjalanannya HTI sering kali berhadapan dan kerap ditentang oleh gerakan Islam pribumi, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU).

**Kata kunci:** *Hizbut Tahrir, Islam, khilafah*

### PENDAHULUAN

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah Islamiyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani(1909-1977M), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953. Sejak di dirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina, doktor lulusan Universitas Al- Azhar,



Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina.<sup>1</sup>

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordaniapadatahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.<sup>2</sup>

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah *ghazwal-fikr* (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil *thariqah* (metode) dakwah Rasulullah SAW. Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

*Pertama*, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

*Kedua*, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al- ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut

---

<sup>1</sup>Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm 4.

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 5-6.



memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambil alihan kekuasaan (*marhalahistilamal-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.<sup>3</sup>

Pada tahap awal, gerakan dakwa HT dipusatkan pada upaya membangun dan memantapkan kerangka HT, memperbanyak pendukung dan pengikut, sekaligus membina para pengikutnya dalam *halaqah-halaqah* dengan (pemikiran) Islam yang diadopsi oleh HT, secara terarah dan intensif. Halaqah-halaqah ini sangat penting bagi HT sebagai ruang kajian untuk mereka yang sudah mulai tertarik dengan ide-ide keislaman yang dikembagakan HT. Pada awalnya mereka bisa mengikuti halaqah umum, yaitu halaqah yang diperuntukkan bagi mereka yang masih awal dan dapat diikuti secara umum. Selanjutnya, setelah beberapa bulan atau sesuai pengamatan *musyrif* (pembimbing/pembina), peserta dari halaqah umum tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi *darisin* dan berhak mengikuti halaqah secara intensif di bawah bimbingan seorang *musyrif*.<sup>4</sup> Di sinilah terjadinya tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan) sebagai tahap awal aktivitas dakwah HT.

Adapun pada tahap kedua, gerakan dakwah dan politik HT terarah pada hal-hal berikut:<sup>5</sup>

1. Pembinaan intensif dan terarah (*tatsqif murakkazah*). Hal ini dilakukan di halaqah halaqah yang diadakan untuk setiap individu pengikut HT dalam rangka membangun kerangka HT,

---

<sup>3</sup>Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 57-73.

<sup>4</sup>Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 23.

<sup>5</sup>Mohamad Rafiuddin, *Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU) dalam Islamuna* Volume 2 Nomor 1 Juni 2015



memperbanyak pendukung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan pengikutnya. Harapannya adalah mereka mampu mengemban dakwah Islam serta terjun dalam aktivitas pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.

2. Pembinaan umum (*tatsqif jama'iyah*). Hal ini dilakukan dengan cara membina umat Islam secara umum dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh HT. Semua ini dilaksanakan melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, balai-balai pertemuan, dan gedung-gedung. Selain itu, ada juga yang melalui media massa, buku-buku, selebaran-selebaran dan lain-lain. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran umum sekaligus berinteraksi dengan umat.
3. Pergolakan pemikiran (*al-syira' al-fikr*). Hal ini dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan, ideologi, aturan dan pemikiran yang keliru, sesat, dan bertentangan dengan Islam. Caranya dengan mengungkap kekeliruan, kesesatan dan penyimpangannya, serta membersihkan umat dari pengaruh pemikiran dan sistem kufur tersebut.
4. Perjuangan politik (*al-kifah al-siyasi*). Hal ini dilakukan dengan cara:
  - a. Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, membebaskan umat dari segala bentuk penjajahan, membongkar berbagai konspirasi negara-negara kafir terhadap kaum muslim.
  - b. Berjuang menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan Islam lainnya dengan cara membongkar kejahatan mereka sekaligus menyampaikan nasihat atau kritik terhadap mereka.
5. Mengadopsi kemaslahatan umat (*tabanni mashalih al-ummah*). Hal ini dilakukan dengan cara memilih sekaligus menetapkan sejumlah kemaslahatan umat demi melayani seluruh urusan mereka sesuai dengan syariat Islam.

Tahap ketiga adalah *istilam al-hukm* (menerima kekuasaan). Pada tahap ini Islam, menurut HT dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*). Tahapan ini dipahami oleh HT sebagai tahapan terpenting dalam sejarah perjuangan Rasulullah Saw yaitu ketika beliau berhasil mendirikan negara Islam yang memiliki piagan yang



sangat terkenal, *PiagamMadinah*. Dalam daulah khilafah Islam inilah syariat Islam menurut HT apat diterapkan. Dalam pandangan HT penerapan syariat Islam harus secara total dan komprehensif, bukan gradual dan parsial.<sup>6</sup>

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah*. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam *daulah Islam*, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.

### **Keanggotaan Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka.

Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizb; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizb. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqâfah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari dari akidah ini. Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di

---

<sup>6</sup>Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis Pengalaman*

*Hizb al-Tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010), 161.



dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah dari halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita itu sendiri.<sup>7</sup>

### **Hizbut Tahrir Indonesia(HTI)**

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Paratokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan *sivitas academica* IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah adalah alumni dan dosen IPB. Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.<sup>8</sup>

Hizbut Tahrir maupun HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini karena menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam sendiri.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti

---

7. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir), diunduh Kamis, 11 Juni 2020

8. <http://ejournal.iainmadura.ac.id>, diunduh Kamis, 11 Juni 2020



Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>9</sup>Pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Organisasi radikal HTI dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru.<sup>10</sup> Atas dasar itulah, pemerintah membubarkan HTI.

### **Konsep *Khilafah* Menurut HizbutTahrir**

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Khilafah jugamengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.<sup>11</sup>

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem khilafah sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan monarchi, republik, kekaisaran ataupun federas

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhilafahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena itu, kelompok ini mengusung ide perlunya

---

9. Ibid

10. Ibid

11. Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000 hlm. 18.



mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* atau kekhalifahan Islam. Kekhalifahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khalifah Usmaniyyah, dan diganti oleh sistem Republik oleh Kemal Atatürk, seorang nasionalis sekuler Turki.

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya.

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* jugamengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.<sup>12</sup> *Khilafah* merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'.

### **Konsep Dar al-Kufr dengan Daral-Islam**

Menurut Hizbut Tahrir, Daral-Islam berbeda dengan Dar al-Kufr. Dar al-Islam adalah daulah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang menerapkan hukum syara'. Dar al-Islam adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin, meskipun mayoritas penduduknya non muslim. Sedangkan Dar al-Kufr adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur

---

<sup>12</sup>.Ibid.



dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan ditangan kaum muslimin, sekalipun seluruh penduduknya adalah muslim.<sup>13</sup> Suatu daerah digolongkan ke dalam Dar al-Islam atau Dar al-Kufr, berdasarkan sistem hukum yang diterapkan didalam daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukanlah menjadi ukuran.

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin dewasa ini tidak ada satupun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam masalah pemerintahan. Apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim termasuk kategori Daral-Kufr. Kenyataan ini mengharuskan kaum muslimin seluruhnya untuk berusaha merubah negeri-negeri mereka dari Dar al-Kufr menjadi Daral- Islam dengan cara mendirikan *Daulah Islam* yang berbentuk Khilafah Mengangkat dan membai'at khalifah untuk menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu menerapkan Islam diseluruh negeri tempat berdirinya Khilafah. Kemudian bersama dengan negara Khilafah berusaha menggabungkan negeri-negeri Islam lainnya. Dengan cara ini, negeri-negeri kaum muslimin akan berubah menjadi Dar al-Islam. Selanjutnya mereka diwajibkan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.<sup>14</sup>

### **Konsep Kesatuan Wilayah Khilafah**

Sistem pemerintahan khilafah adalah berbentuk kesatuan, bagi satu negara, bukan sistem serikat atau federasi. Kaum muslimin di seluruh dunia tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu Daulah Islam.<sup>15</sup> Mereka tidak diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu khalifah yang menerapkan atas mereka syari'at Islam. Sebab dalil syar'i telah menentukan kesatuan Daulah Islam dan mengharamkan memiliki lebih dari satu pemimpin. Jika seorang ingin mengambil alih kekuasaan

---

<sup>13</sup>Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, op.cit., hlm. 3.

<sup>14</sup><http://ejournal.iainmadura.ac.id>, diunduh Kamis, 11 Juni 2020

<sup>15</sup>Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, op.cit., hlm.76.



khalifah dengan maksud memecah belah negara dia sendiri ingin menjadi Khalifah, maka orang tersebut wajib diperangi.

Khilafah merupakan kepemimpinan tunggal, yang mengharuskan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak membolehkan dalam satu bidang tersebut ada pemimpin lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kepemimpinan kolektif (kelompok). Kepemimpinan yang ada dalam Islam adalah tunggal. Kemudian praktek membentuk kepemimpinan kolektif yang mentradisi di sebagian negeri muslim, atas nama majelis, komite, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, atau sejenisnya yang memiliki wewenang kepemimpinan, maka semuanya itu tidak dibenarkan.

## SIMPULAN

Dari deskripsi singkat ini dapat disimpulkan bahwa HT/HTI merupakan organisasi transnasional yang lahir dengan tujuan membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang parah; membebaskan mereka dari cengkraman ide, sistem, perundang-undangan, dan hukum sekuler, untuk kemudian bersama-sama membangun kembali Daulah Islamiyah di muka bumi dalam naungan *Khilafah Islamiyah 'ala Minhajal-Nubuwwah* untuk mempraktikkan hukum-hukum dan syari'at Islam berdasar wahyu Allah SWT. Dilihat dari tujuan ini tentu siapapun harus setuju dan mendukung cita-cita yang demikian. Karena sebagai umat Islam tentu seharusnya rindu dengan penerapan syari'atnya dalam kehidupan kesehariannya.

Namun dari deskripsi tersebut juga dapat dibaca bahwa di dalam gerakan HT/HTI masih terdapat beberapa ideologi yang tidak sejalan dengan pemahaman mayoritas kaum muslimin dalam konteks Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah dan ormas pribumi lainnya. Inilah yang menyebabkan beberapa ormas pribumi tersebut mengambil jarak dengan gerakan HT/HTI. Bahkan tak jarang dari mereka yang sampai antipati yang bukan hanya dalam kungkungan ide dan visi tapi sudah mengarah dalam tataran aksi. Sehingga diperlukan media untuk saling mengenal (*ta'aruf*) saling memahami (*tafahum*), dan toleransi (*tasamuh*). Jika kepada orang non muslim saja



kita bisa hidup damai, kenapa kepada orang sesama Islam harus bertikai?

Akhirnya, marilah kita pahami dan sadari, bahwa pada dasarnya semua gerakan dakwah tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Fakta ini meniscayakan adanya kerukunan dan saling membutuhkan satu sama lain. Bukan sebaliknya, masing-masing merasa paling sempurna sehingga saling klaim kebenaran dan tuduhan sesat pada gerakan di luar kelompoknya. Bagi yang berada di luar HT/HTI---baik di NU, Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya--yang selama ini tidak bisa bersatu, mungkin kehadiran HT bisa memberi solusi untuk bersatunya semua umat Islam dalam naungan khilafah Islam. Bagaimanapun baiknya ide yang diusung, cara-cara kekerasan apalagi pemberontakan harus dihindari dalam penyebaran ide. Termasuk di dalamnya adalah pemaksaan paham yang bersifat *furu''iyah-ijtihadiyah*. Tantangan dan rintangan dalam dakwah tentu pasti ada. Karena di situlah titik inti nilai dan ukuran komitmen dalam upaya merasakan nikmatnya dakwah

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 23
- Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 57-73.
- Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm 4.
- Mohamad Rafiuddin, *Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU) dalam Islamuna* Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
- Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundaentalis Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010), 161.



Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000 hlm. 18.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir)



## TEOLOGI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

TISON HARYANTO

### Abstrak

Keberadaan komunitas LDII telah menampilkan strategi kebudayaan dalam mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan gerakannya. Komunitas LDII pun melakukan transformasi dari komunitas yang tertutup menjadi yang terbuka. Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana latar belakang timbulnya aliran LDII ini dan apa saja sumber hukum pemikiran aliran LDII ini. LDII merupakan aliran atau kelompok islam di indonesia, pendirinya adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir, pada awalnya organisasi ini bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI) pada tahun 1972, lalu berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), lalu berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hingga sekarang. Banyak sekali kontroversi terhadap aliran ini sebagaimana yang sudah dipaparkan didalam makalah dan bahkan banyak juga yang menyatakan bahwa aliran LDII ini sesat, hal ini disebabkan karna kesalah pahaman disertai dengan minimnya informasi masyarakat tentang LDII, masyarakat hanya mengetahui isu-isu terkait doktrin-doktrin LDII yang dianggap sesat, tanpa mencari tahu kebenarannya. Dan pada pihak LDII pun membantah isu-isu yang menyebar luas di masyarakat tersebut, salah satunya adalah melalui situs resmi yang mereka buat.

**Kata Kunci :** LDII, Isu-isu

### PENDAHULUAN

#### Latar belakang Masalah

Islam adalah agama dakwah<sup>1</sup> artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya, karena itu Al Quran dalam menyebut kegiatan dakwah dengan istilah *Ahsanu Qaula*. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia



dalam kemajuan agama Islam. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, dimanaberbagai arus informasi masuk begitu cepat dan instan tidak terbandung, kegiatan dakwah sangat dibutuhkan oleh Umat Islam. Dakwah Islam memberikan filter untuk memilah dan menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berbicara aktifitas dakwah di Indonesia belum menunjukkan hubungan yang sinergis dan fungsional antara kajian yang bersifat akademis dengan realitas dakwah yang ada di masyarakat. Kesenjangan antara dunia akademis dan realitas sosial dakwah Islam masih terjadi. Masing-masing berjalan sendiri. Kajian akademik masih asyik di menara gadingnya, sementara praktik dakwah di masyarakat masih berkuat pada model-model dakwah konvensional (ceramah) yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti.<sup>1</sup>

Keberadaan komunitas LDII telah menampilkan strategi kebudayaan dalam mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan gerakannya. Beberapa kali komunitas ini mendapatkan serangan dari lembaga keagamaan lain karena tidak bisa lepas dari doktrin Islam Jamaah/Darul Hadits yang ditolak oleh umat Islam di Indonesia, khususnya MUI yang mengeluarkan fatwa mengenai sesatnya LDII dan masyarakat yang menganggapnya sebagai sempalan. Implikasi sosiologis yang harus ditanggung oleh para pengikut LDII adalah mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di berbagai daerah. Namun, LDII tetap survive sampai saat ini, bahkan semakin kokoh dan solid di tengah berbagai terpaan di sepanjang kurun zaman yang dilaluinya.

Komunitas LDII pun melakukan transformasi dari komunitas yang tertutup menjadi yang terbuka. Oleh karena itu, disertasi ini memperlihatkan strategi komunitas LDII untuk tetap *survive* sembari tetap menjadi komunitas atau organisasi yang memiliki paham keagamaan dengan kekhasannya sendiri di tengah beragam kelompok keagamaan. Hingga kini komunitas LDII mampu mempertahankan doktrin dan identitas keagamaan serta jati diri organisasinya. Simbol-simbol LDII semakin mudah ditemui, misalnya

---

<sup>1</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, (UIN Walisongo Semarang Juli-Desember 2015), h. 211



pada rambu-rambu jalan yang menunjukkan keberadaan komunitas LDII. Selain itu, persebaran kader-kader LDII telah pula merambah berbagai tempat. Ketahanan LDII pun terlihat dari keberadaan kantor pusatnya di kawasan elit di bilangan Jakarta Selatan. Identitas dan simbol di atas meyakinkan LDII untuk tetap eksis dengan kekhasannya sebagai bentuk ekspresi keyakinan yang telah mendorong pemahaman masyarakat dan negara untuk menghormati keyakinan yang berbeda, serta mendukung kehidupan yang tenang dan bersahabat dalam suatu masyarakat yang plural.<sup>2</sup>

Umat Muslim Indonesia amnya dan khasnya Provinsi Jambi mempunyai pandangan yang berbeza-beza mengenai kewujudan pertubuhan LDII diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Suparman dalam tumubual berikut: "LDII merupakan pertubuhan Islam yang mempunyai faham, apabila bersentuhan kulit dengan orang diluaran LDII mereka anggap najis dan bekas dari najis itu harus dibasuh agar najisnya hilang.

Kemudian ada yang berpendapat bahawa LDII merupakan pertubuhan Islam seperti pertubuhan Islam lainnya tetapi ada berbagai faham membuat LDII terkesan ekstrim dan eksklusif. Kenyataan ini diungkapkan oleh Muhammad Isra'i bahawa LDII merupakan pertubuhan yang berpandangan keras atau ekstrim dan terkesan eksklusif, kerana kurang bercampur dengan masyarakat dan mereka lebih sibuk dengan aktiviti pengajian dan aktiviti lainnya.<sup>3</sup>

Pada kesempatan kali ini pemakalah mencoba memaparkan salah satu aliran atau kelompok keagamaan di Indonesia yang bernama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yang menurut isu-isu yang beredar menyatakan bahwa kelompok ini melakukan takfir (mengkafirkan) terhadap kelompok-kelompok diluar kelompok mereka.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang timbulnya aliran LDII ini ?

---

<sup>2</sup>Hilmi M, *Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kediri Jawa Timur*, Desertasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana Depok, ( Universitas Indonesia, 2012), h. 3.

<sup>3</sup>Aditya, *Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) : Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya Di Kabupaten Kerinci*, Jurnal Islamika, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016, h. 61.



2. Apa saja sumber hukum pemikiran aliran LDDI ini ?

### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sejarah aliran LDII.
2. Untuk mengetahui pemikiran-pemikiran LDII.
3. Untuk mengetahui perkembangan aliran tersebut di Indonesia.
4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

#### **Latar Belakang Berdirinya LDII**

Organisasi LDII pertama kali berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya berganti menjadi lembaga karyawan Indonesia (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990 sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim lembaga Karate-Do Indonesia diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Namun dari nama asal tersebut ada yang menyebut sejarah LDII asalnya Darul Hadits kemudian berubah menjadi LEMKARI dan berubah lagi menjadi LDII hingga saat ini.<sup>4</sup>

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU no.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi peraturan pemerintah (PP) no 18 tahun 1986. LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa (kelurahan). Keberadaan LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen Dalam Negeri. LDII bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial (Islam) yang berkantor pusat di Jl. Arteri Tentara Pelajar no 28 Patal, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Organisasi ini mempunyai keanggotaan secara total sebanyak 15 juta (tahun 2005) dengan ketua umumnya Prof. Dr. Ir . K.H. Abdullah Syam, M.Sc. Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 6, LDII

---

<sup>4</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, (UIN Walisongo Semarang Juli-Desember 2015), h. 211.



bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai organisasi keagamaan LDII senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah anggota, sekaligus sebagai bentuk pengkaderan dan regenerasi organisasi. LDII tidak memberikan batasan dalam rekrutmen anggota baru. Setiap saat anggota masyarakat dapat secara terbuka bergabung dengan ketentuan yang telah di atur oleh Anggaran Dasar Organisasi. Syarat untuk menjadi anggota LDII berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 14. Yaitu yang terpenting anggota LDII adalah warga Negara Indonesia. Pertama, Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII. Keempat, menerima, menyetujui, dan sanggup taat terhadap AD dan ART LDII, serta seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta peraturan organisasi, dan kelima bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja organisasi.<sup>5</sup>

Idealnya dalam satu pengurus cabang ditingkat kecamatan mempunyai minimal tiga anak cabang yang terdapat di setiap kelurahan. Bahkan dalam satu pengurus anak cabang bisa mencapai 3-10 pengurus anak cabang. Dibandingkan dengan pengurus cabang di kecamatan yang lain, pengurus cabang LDII di Kecamatan Tuguyang paling sedikit anggota dan fasilitasnya. Dalam menjalankan aktifitas keberagamaannya, paraanggota atau jamaah tidak harusterpaku dengan tempat tinggalnya. Tetapi para anggota LDII di Kecamatan Tugu dapat mengikuti kajian di masjid LDII di tempat lain seperti di Puncak Sari Ngalian, Sapta Marga Krapyak, Jrasah atau pun Karanganyar. Sebelumnya LDII mendapatkan label negatif, sebagai organisasi yang bersebrangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Akan tetapi, LDII sekarang telah menganut paradigma baru. LDII bukanlah penerus/ kelanjutan dari Islam Jamaah serta

---

<sup>5</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Dakwah..., h. 212.



tidak mengajarkan ajaran Islam Jamaah. LDII tidak menggunakan ataupun sistem keamiran. LDII tidak menganggap umat Islam di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis. LDII bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI. Paradigma baru LDII belum secara 100 % diaplikasikan secara keseluruhan karena LDII masih menggunakan produk lama seperti buku khotbah. Buku khotbah yang digunakan masih menggunakan buku khotbah lama yang isinya masih menggunakan kata-kata jamaah. Selain itu LDII masih menjaga keekklusifannya dengan cara tidak mau membaaur ketika melakukan ibadah shalat.<sup>6</sup>

### **Strategi dan Manajemen Dakwah**

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktifitas dakwah. Awal penggunaan kata strategi dipergunakan dalam dunia militer. Lebih lanjut, Asmuni menambahkan, strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Azas filosofi, yaitu azas yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah. 2) Azas psikologi yaitu azas yang terkait dengan kejiwaan manusia. Seorang da'i adalah manusia, begitu juga sasaran serta objek dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik. 3) Azas sosiologi, yaitu azas yang membahas masalah yang terkait dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya, politik masyarakat setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran dakwah, sosiokultur dan lain sebagainya yang sepenuhnya diarahkan pada persaudaraan yang kokoh, sehingga tidak ada sekat di antara elemen dakwah, baik kepada obyek (mad'u) maupun kepada sesama subyek (pelaku dakwah).<sup>7</sup>

Dalam memahami keberagaman masyarakat, antara konsepsi psikologis, sosiologi dan religiusitas hendaknya tidak dipisahkan secara ketat, sebab jika terjadi percampuran maka akan

---

<sup>6</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, Juli-Desember 2015), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2. h. 213.

<sup>7</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*,... h. 209.



menghasilkan kesimpulan yang fatal. Selain ketiga hal tersebut diatas patut juga dipertimbangkan, pertama azas kemampuan dan keahlian (*achievement and professional*), yaitu azas yang menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subyek dakwah dalam menjalankan misinya. Latar belakang subyek dakwah akan dijadikan ukuran kepercayaan mad'u. Kedua, azas efektifitas dan efisiensi yaitu azas yang menekankan usaha melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan planning yang telah di tetapkan sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaan dakwah Islam sangat dibutuhkan pengelolaan melalui manajemen yang tersusun dan terencana.<sup>8</sup>

Secara sederhana, manajemen adalah upaya mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya, mencakup manusia (*man*), uang (*money*), dan barang (*material*), mesin (*machine*), metode (*method*) dan pasar (*market*). Namun, secara khusus definisi manajemen, *Management is a district process of planning, organizing, actuating and controlling, perform to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.*" Definisi di atas memberikan gambaran bahwa manajemen mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktifitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.<sup>9</sup>

Strategi dalam organisasi dakwah difokuskan pada unsur-unsur sebagai berikut: pertama inovasi para pelaku dakwah yang

---

<sup>8</sup>A Rosyad Shaleh, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, Juli-Desember 2015), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2. h. 209.

<sup>9</sup>G.R Terry, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, Juli - Desember 2015), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2. h. 210.



akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengejar inovasi menghadapi mad'u. Kedua, minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktifitas dakwah. Strategi dakwah yang dilakukan oleh LDII lebih meningkatkan pemahaman keagamaan terhadap para anggotanya. Meskipun jumlah jamaahnya dapat meningkat tetapi yang menjadi fokus dakwahnya kepada peningkatan terhadap paham keagamaan.

### Sumber Hukum Ajaran LDII

Aliran islam LDII dalam melaksanakan Ubudiyahnya mereka mengambil dari:<sup>10</sup>

#### 1. Al-Qur'an.

LDII menyakini al-Qur'an sebagai sumber dan asas akidah amnya sama dengan keyakinan majoriti umat Islam Indonesia, tetapi dalam kewajiban mempelajari al-Qur'an, LDII memiliki cara yang berbeda. LDII lebih mengutamakan mempelajari al-Qur'an dengan kaidah *manqul*. Menurut LDII kaidah *manqul* bertujuan menjaga kemurnian kandungan al-Qur'an serta mencegah dari kepentingan-kepentingan elit agama. Sehingga bukan perintah agama yang diamalkan tetapi justeru pemikiran dan kepentingan ulama. Oleh itu, LDII mempergunakan kaidah *manqul* dalam memahami al-Qur'an agar tetap di jalan yang benar, mengamalkan pembelajaran al-Qur'an dan al-hadish.

*Manqul* ialah sistem pembelajaran berangkai dan turun temurun (*muttasil*) mulai dari Nabi s.a.w., para sahabat, para *tabi'in*, *tabi'tabin* dan seterusnya sampai sekarang. Ahli LDII dianjurkan memahami kitab suci secara *manqul* kepada salah seorang mubaligh atau guru yang telah *manqul* kepada ulama terdahulu dan seterusnya sambung kepada Nabi s.a.w. Pengajian dengan sistem *manqul* ini bertujuan agar kefahaman agama para jemaah tetap di jalan wahyu, tidak terjejas daripada pemikirannya sendiri dan supaya tetap dalam barisan jamaah.

LDII menggunakan kaidah *manqul* sebagai pendekatan memahami al-Qur'an kerana kaidah *manqul* menurut majoriti

---

<sup>10</sup>Faizin, *Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) : Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya Di Kabupaten Kerinci*, Jurnal Islamika, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016, h. 65.



ulama mempunyai peringkat tertinggi dalam proses penyampaian hadish (*tariqa al-tahammul*). Berbanding kaidah *al-sima'* (mendengar) iaitu seorang guru membaca hadith baik dari hafalan mahupun dari kitabnya sedang hadirin mendengarnya baik majlis itu *imla'* atau bentuk lain.<sup>16</sup>

Meskipun LDII berbeda dalam mempelajari al-Qur'an dengan cara manqul namun tidak bererti mengembangkan faham liberal dalam memahami kitab suci. Menurut LDII mengamalkan agama mesti dalam konteks syari'at (wahyu).

## 2. Hadis

LDII sependapat dengan Ulama Jumhur menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an dan dasar dalam menetapkan akidah. Kewujudan LDII dalam menerima hadith sebagai sumber akidah ialah kerana dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai asas pemikiran itu ditemukan beberapa kata *al-Hikmah* yang menyertai kata *al-Kitab*, yang bermakna al-Sunnah, dan makna ini lebih logik, kerana setelah kata al-kitab adalah al-Qur'an, maka al-Hikmah tidak lain ialah al-Sunnah yang dijadikan sebagai penjelasan, penafsiran ataupun penambahan dari makna *al-kitab*. Keyakinan LDII dalam menerima hadith seperti penggunaan kitab hadith Kutub al-Sittah sebagai rujukan dalam hukum Islam mahupun memahami akidah.

Pertimbangan LDII hadis sebagai asas akidah, kerana penyelidikan dan penulisan kitab-kitab telah hadith melalui proses yang begitu teliti yang meliputi: *Pertama*, pembukuan hadith telah melawati proses yang teliti dan ketat sebelum ditetapkan dalam penulisan hadith. *Kedua*, kesungguhan para sahabat dalam menyampaikan sunah Rasulullah. *Ketiga*, pengetahuan tentang para perawi dan sikap kritis yang tinggi dalam menerima riwayat-riwayat mereka. *Keempat*, penyusunan ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*. *Kelima*, pengumpulan dan penyusunan *illat-illat* hadis dengan pembahasan yang lengkap. *Keenam*, penyusunan kaidah-kaidah yang menjelaskan kriteria penerimaan atau penolakan suatu hadith.

## 3. Akal

Dalam fungsi akal, LDII berpandangan bahawa akal mempunyai kedudukan yang amat tinggi dan mulia, kerana akal merupakan syarat yang harus ada pada diri manusia untuk dapat



menerima hukum taklif dari Allah. Hukum-hukum syari'at tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif, seperti orang yang kehilangan akalnya. Oleh itu, akal menjadi syarat dalam beragama. Kemudian LDII berpandangan bahawa kurang ilmu akan mempengaruhi pola fikir dan langkah-langkah seseorang dalam kehidupan sehari-hari sehingga tanpa sedar telah terkeluar dari kemurnian ajaran agama Islam. Dengan dimiliki ilmu seseorang dapat membezakan yang haq dan batal, halal dan haram sehingga dapat memperkukuh rasa taqwa kepada Allah.<sup>11</sup>

### Organisasi Keagamaan

Di dalam lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ada dua hal yang penting perlu diketahui, yaitu:

1. Dalam konteks organisasi, LDII menerapkan *leadership* (kepemimpinan) yang bertanggungjawab dan amanah sebagai *Ro'in*. Nilai-nilai kepemimpinan ini tidak hanya dikembangkan dalam organisasi LDII, tapi mulai di praktikan dari mulai keluarga, pondok pesantren dan lebih luas lagi dalam kehidupan bertentangan dan berasyarakat.
2. Dalam konteks agama, LDII bertujuan untuk secara khusus membangun warganya dan umat Islam pada umumnya agar menjadi hamba Allah yang tekun beribadah dan menjadi warga negara yang baik.

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang memiliki ketentuan UU no. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No 18 tahun 1986 dan peraturan menteri dalam negeri no 5 tahun 1986 dengan demikian LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

### Teologi LDII

Dalam memahami agama dia termasuk teguh pada pendirian dan tidak toleran terhadap mereka yang berbeda paham. Oleh karena itu kebanyakan doktrin teologis LDII dianggap sesat

---

<sup>11</sup>Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 23.



oleh mayoritas umat islam, berikut adalah faham-faham teologis LDII:<sup>12</sup>

### 1. Ajaran Islam Jama'ah

Inti ajaran yang dikembangkan oleh LDII adalah kembali kepada Quran dan Hadis, yang selama ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Di samping itu perbedaan di kalangan umat Islam terjadi karena tidak memiliki pemimpin pemersatu yang sangat ditaati oleh umat. Mereka beranggapan bahwa mempelajari ilmu-ilmu agama selain Quran dan Hadis, seperti fikih, tauhid, akhlak, dan sebagainya, percuma saja dan menyedihkan.

Dalam belajar hadis dilakukan dengan sistem *Manqul*, yaitu melalui sanad-sanad yang shahih, dan bukan kata-kata orang (*qila wa qala*). Dengan cara ini jamaah menjadi tahu persis apa yang dikehendaki Rasul, dan bukan sekedar dugaan-dugaan. Begitulah cara mereka mencapai kemurnian agama.

Untuk menjadi murid dari aliran ini tidak gampang, karena harus melalui seleksi ketat. Sementara itu tidak sembarang orang dapat dapat mengikuti pengajian mereka. Hanya dari mantan murid aliran itu sajalah kita bisa mengetahui ajaran mereka padahal kesetiaan murid terhadap ajaran sangat tinggi, sehingga amat sulit bagi orang luar bisa mengetahui selengkapnyanya ajaran aliran tersebut.

### 2. Akidah

Beberapa petunjuk bisa sedikit membuka ajaran mereka sebagai berikut. Ajaran mereka bersumber pada paham *salafiyah*, karena terbukti tidak mau menakwilkan ayat-ayat *mutasyabihat* (implisit). Mereka hanya mau memahami apa adanya, secara harfiah. Termasuk dalam menghadapi ayat-ayat tentang Allah dan perilaku-Nya, seperti wajah, tangan, duduk, marah, berkata, dan sebagainya. Tentunya dengan tambahan *bilakaifa* yang artinya tidak seperti apapun. Yang tidak meyakini seperti itu dianggap kafir oleh mereka. Ini termasuk ciri kaum fundamentalis Islam yang kaku, seperti kaum wahabi.

### 3. Ibadah

---

<sup>12</sup>Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada, 2010)..., h. 255-256



Mereka tidak merasa terkait dengan suatu madzhab, kecuali hanya mengacu pada Quran dan Hadis shahih. Bila di banding dengan keputusan Tarjih Muhammdiyah terdapat persamaan. Yang dimaksud dengan tarjih adalah proses yang digunakan Muhammdiyah dalam mencari ketentuan hukum dengan mengacu pada nas Quran dan Hadis shahih, serta membandingkan hasil ijtihad para ulama terdahulu. Seperti (1) membaca *basmallah* secara *sirr* dalam membaca Al-Fatihah, (2) tidak membaca *qunut* dalam shalat, (3) Jumlah rakaat salat tarawih hanya delapan, (4) *salat Id* sebaiknya diselenggarakan dilapangan terbuka, dan (5) *talqin* hanya dilakukan bagi orang yang sedang menghadapi maut. Sementara itu terdapat perbedaan diantara mereka. Yaitu (1) azan Jum'at dilakukan dua kali, dan (2) Khutbah dilakukan hanya dalam bahasa Arab, karena dianggap sebagai pengganti dua rakaat yang tidak dilakukan dalam salat Jum'at.

#### 4. Jamaah, Keamiran, dan Baiat

Menurut kelompok ini, umat Islam sekarang sudah terpecah belah menjadi beberapa golongan, karena tidak ada pemimpin yang layak dihormati dan dipercaya sebagai *amir*. Dengan ketinggian ilmunya Amir mampu membimbing ke jalan Allah dalam menyatukan jama'ah. Dan jamaah adalah menjadi salah satu syarat saahnya keislaman seseorang. Mereka mengacu sikap itu pada Q.S 3:103, maupun hadis Nabi yang berbunyi, "*Tetaplah olehmu berjamaah dan jangan bercerai berai*" (H.R at-Tirmidzi). Hadits lainnya lagi adalah: "*Tidak ada islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan keamiran, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat dan tidak ada baiat kecuali dengan ketaatan*" (H.R Ahmad ibn Hambal)

Untuk lebih meyakinkan kebenaran pandangan mereka tentang perlunya jamaah, amir maupun baiat, dengan ayat-ayat Quran maupun Hadis yang mereka anggap sesuai. Dan umat Islam di Indonesia wajib berbaiat dan taat kepada Nurhasan Al-Ubaidad, karena ia satu satunya amir di negeri ini.

Lebih dari itu mereka beranggapan bahwa orang yang tidak sepaham dengan mereka dihukum kafir atau syirik. Dan setiap orang kafir dan syirik adalah najis. Konsekuensi mereka harus diusir dari kalangan jamaah, meskipun tadinya



dalah anggota keluarga, seperti anak, orangtua, istri maupun suami. Ajaran Islam Jamaah yang demikian itu merupakan hasil ijtihad Wali Fatah, tokoh aliran Jamaah Muslim. Paham agama seperti ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena telah memecah belah persatuan atau Ukhuwah Islamiyyah. Dalam perkembangannya sekarang, setelah dengan nama LDII, tema-tema ajaran tentang jamaah, Keamiran maupun bai'at tidak lagi di tonjolkan. Kita tidak tahu persis alasan perubahan tema pengajian tersebut.<sup>13</sup>

#### 5. Takfir

Takfir adalah mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada imam suatu kelompok. Ciri takfir ini seringkali terdapat dan menjadi ciri khas kelompok yang menyimpang. Jadi secara psikologis, mereka ingin menanamkan rasa bangga dan eksklusivisme tertentu kepada anggotanya dengan memberi label muslim kepada kelompok mereka dan label non muslim kepada selain mereka (diluar kelompok).

Dan secara otomatis, setiap anggotanya tidak dibenarkan kawin dengan non anggota, karena menurut mereka, orang yang bukan anggota bukan muslim. Begitu pula dalam masalah sholat, kelompok mereka tidak akan mau jadi makmum di belakang orang yang bukan anggota kelompok mereka.

Bahkan ada juga yang sampai mencuci kursi tamunya lantaran punya tamu bukan anggota mereka. Tamu ini meski formalnya muslim, namun menurut pandangan mereka adalah kafir, sehingga tempat duduknya pun harus dicuci karena dianggap najis. Lebih kacau lagi, mereka yakin bahwa harta orang lain yang bukan anggota mereka boleh diambil karena milik orang kafir.

Padahal syari'at islam jelas-jelas melarang kita mudah mengkafirkan orang lain, kecuali memang secara tegas seorang menyatakan diri murtad. Atau melalui proses peradilan dengan memanggil orang yang bersangkutan dan telah diputuskan oleh mahkamah syar'iyah bahwa seseorang memang nyata keluar dari islam.

---

<sup>13</sup>Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada, 2010)..., h. 259.



Sedangkan orang yang lahir dari orang tua muslim, otomatis menjadi seorang muslim dan tidak perlu melakukan syahadat ulang di depan Amir, imam atau apapun istilahnya. Baca syahadat di depan tokoh tertentu lebih mirip dengan baptis gaya kristen ketimbang ajaran aqidah islam, jadi apapun nama organisasinya, bila punya faham takfir seperti ini, jelas telah menyimpang dari aqidah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dan para ulama pewartinya.

#### 6. Infak Wajib

Umumnya kelompok sesat berujung kepada pengalangan uang atau mobilisasi dana. Namun karena dikemas dengan doktrin dan segala macam asesorisnya, maka dengan setia dan taat mereka mengeluarkan uang untuk sang pimpinan. Kalau perlu jadi sampai miskin sekalian. Tidak jarang tarif infaq wajib itu termasuk gila-gilaan. Ada yang menetapkan 20% dari penghasilan, 30%, 50% bahkan sampai 100%. Belum lagi zakat, kafarat, denda dan lainnya.

Dalam banyak kasus, seringkali terbongkar bahwa kalangan jamaah yang sesat itu seringkali sudah tidak lagi peduli kepada halal atau haram, yang penting harus setor keatasan. Makin banyak menyetorkan dana, biasanya makin tinggi pangkat dan kedudukannya. Semua setoran yang sudah masuk tidak dibenarkan untuk diminta laporan pembukuaannya.

#### 7. Taqiyah

Ciri yang tidak pernah luput dari kelompok sesat adalah taqiyah yaitu menyembunyikan doktrin sesatnya kepada siapapun kecuali kepada mereka yang sudah resmi dibaiat hingga pada level tertentu, sehingga setiap ada orang yang ingin melakukan konfirmasi ke pihak mereka atas berita kesesatan ajaran mereka, selalu akan dipungkiri dengan sekian banyak dalih. Biasanya, apa yang mereka pajang di etalase adalah hal-hal yang baik, bagus, normal dan biasa saja. Barulah setelah kita masuk dapurnya, kita baru bisa tahu seperti apa wujud asli kelompok itu.

Tapi biasanya, pihak pimpinan akan memblack-list mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat dan penyebar fitnah karena sakit hati dan seterusnya. Jadi



keterangan dari orang yang sudah tobat itu terkadang tidak mempan, karena para anggota baru sudah diimunisasi atas info-info kesesatan kelompok mereka.

### **Bantahan Isu-Isu Negatif dari LDII**

Di bawah ini kita akan membahas tanggapan LDII terhadap tuduhan-tuduhan pada dirinya yang dianggap sesat. bantahan-bantahan tersebut mereka lontarkan melalui situs resmi yang mereka buat. Bantahan tersebut antara lain:

1. Benarkah warga LDII bila berjabat tangan dengan orang lain kemudian tangannya dicuci ?

**Tidak benar.** Karena di tahun 2017 s.d 2019 Awal atasan pemakalah adalah Pimpinan Tertinggi LDII tingkat Provinsi karena antara pemakalah dengan atasan hampir setiap bertemu berjabat tangan, LDII tidak mau berjabat tangan jika berjabat tangan dengan lawan jenis.

2. Benarkah warga LDII menganggap kafir orang diluar LDII ?

**Tidak benar.** Karna siapapun tidak memiliki wewenang untuk menyatakan kekafiran seseorang, berdasarkan dalil: "barang siapa yang menganggap kafir saudaranya, maka kekafiran akan berbalik kepada dirinya, jika saudaranya ternyata tidak kafir". Namun, jika seseorang itu diluar Islam maka LDII menyebut dengan kata Kafir.

3. Benarkah bahwa warga LDII tidak mau sholat di masjid selain di masjid LDII ?

**Tidak benar.** Warga LDII selalu berusaha tertib dalam menetapi salat lima waktu, dalam rangka menetapi firman Allah: "*Jagalah waktu-waktu solat dan salat yang tengah (Asar)*". Untuk menetapi kewajiban salat lima waktu tersebut, warga LDII dapat melaksanakan ibadah salat di masjid, di musholla, atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Adapun jika di lokasi terdekat ada masjid LDII, tentunya wajar saja jika warga LDII tersebut lebih memilih pergi ke masjid LDII. Hal tersebut semata-mata disebabkan karena di masjid LDII tersebut dapat diperoleh informasi-informasi mengenai kegiatan organisasi, sekaligus Silaturahmi dan menambah ilmu.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan kami menyimpulkan bahwa LDII merupakan aliran atau kelompok islam di indonesia, pendirinya adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir, pada awalnya organisasi ini bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI) pada tahun 1972, lalu berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), lalu berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hingga sekarang.

Banyak sekali kontroversi terhadap aliran ini sebagaimana yang sudah dipaparkan didalam makalah dan bahkan banyak juga yang menyatakan bahwa aliran LDII ini sesat, hal ini disebabkan karna kesalah pahaman disertai dengan minimnya informasi masyarakat tentang LDII, masyarakat hanya mengetahui isu-isu terkait doktrin-doktrin LDII yang dianggap sesat, tanpa mencari tahu kebenarannya. Dan pada pihak LDII pun membantah isu-isu yang menyebar luas di masyarakat tersebut, salah satunya adalah melalui situs resmi yang mereka buat.

### **Saran-Saran**

Beberapa saran yang ingin pemakalah sampaikan dalam makalah ini, antara lain :

1. Diharapkan kepada pengurus menambah sarana dan prasarana karena hal itu sangat penting demi kenyamanan jama'ah ketika melaksanakan pengajian kemudian diharapkan dapat menambah strategi dakwah lainnya agar tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Diharapkan agar jamaah senantiasa menyadari bahwa pentingnya setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus baik pengajian ataupun kegiatan non pengajian, agar lebih meningkatkan nilai keagamaan diri masing-masing dan dengan mengikuti segala kegiatan akan memperkuat tali silaturahmi sesama jamaah LDII.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Faizin, *Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) : Analisis Praktik Keagamaan Dan Pengaruhnya Di Kabupaten Kerinci*, Jurnal Islamika, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016.



- Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada, 2010).
- M Nuh, Nurihson, *Aliran/faham keagamaan dan Sufisme Perkotaan*, (Jakarta: PuslitbangKehidupan Keagamaan, 2009).
- Ulfah, Maria, Novi, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, (UIN Walisongo Semarang Juli-Desember 2015).
- Shaleh, Rosyad, A, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, Juli- Desember 2015), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2.
- Terry, G.R, Rosyad, A, *Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (UIN Walisongo Semarang, Juli- Desember 2015), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2





## **PENGUATAN NILAI-NILAI ISLAM MODERAT MELALUI PEMBELAJARAN DEMOKRASI DI MADRASAH**

**ZANNATUN NA'IMAH**

### **Abstrak**

Implementasi konsep penguatan nilai-nilai Islam moderat melalui metode pembelajaran demokrasi di madrasah sangat di butuhkan. Mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi jarak jauh sebagai dampak globalisasi dalam bidang teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan termasuk pengetahuan agama yang bisa dipelajari dengan bebas tanpa bimbingan seorang guru. Makalah ini merupakan studi literatur untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan penanaman Islam moderat dan pembelajaran demokrasi. Hasil makalah ini mendemonstrasikan bahwa Islam moderat (tawasuth) berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku adil dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai Islam moderat dapat diinternalisasikan di dalam kurikulum madrasah sebagai penguatan mulai jenjang Madrasah melalui penerapan pembelajaran demokrasi. Penerapan tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan simulasi. Implementasi metode pembelajaran demokratis mendorong adanya hubungan komunikatif antara pendidik dengan peserta didik, penanaman hubungan silaturahmi, dan peningkatan nilai ukhuwah. Lebih lanjut, metode-metode tersebut menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Makalah ini juga menggambarkan bahwa pembelajaran demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya secara kreatif dan kritis sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki.

**Kata Kunci: Islam Moderat, Pembelajaran Demokrasi, Madrasah**

### **PENDAHULUAN**

Sikap keras dan kasar (radikal) sebagian kelompok umat Islam terhadap umat Islam lain atau pada agama lain mencerminkan sikap yang tidak berprikemanusiaan. Mereka merasa paling benar karena



doktrin yang mendarah daging dan membuat mereka bersikukuh untuk menegakkan kebenaran versi mereka.

Berdasarkan hasil survei Wahid Foundation bersama Lingkaran Survei Indonesia pada 2016, diungkapkan bahwa 11 juta dari 150 juta penduduk muslim Indonesia siap melakukan tindakan radikal. Jumlah tersebut mencapai 7,7 persen dari total penduduk muslim Indonesia. Sementara itu, 600 ribu atau 0,4 persen penduduk muslim Indonesia pernah melakukan tindakan radikal (Tempo.co, 2017). Lebih mengejutkan lagi, Lestari menyebutkan bahwa anak-anak di madrasah tingkat dasar dan menengah bahkan taman kanak-kanak berisiko terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme.<sup>1</sup>

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan salah satu indikator dari sikap intoleran dalam menghadapi sebuah perbedaan; padahal sebenarnya perbedaan merupakan keniscayaan/sunatullah. Pola berpikir setiap manusia pasti berbeda, tetapi bagaimana perbedaan itu menjadikan satu sama lain saling mengerti. Madrasahftahuddin (2010: 3) berpendapat bahwa sumber rujukan agama Islam ialah sama, yaitu: Al-Quran dan Al-Hadits. Namun, fakta menunjukkan bahwa wajah Islam adalah tidak hanya satu. Ada berbagai golongan Islam yang terkadang mempunyai ciri khas tersendiri dalam praktik dan amaliah keagamaannya. Tampaknya, perbedaan itu sudah menjadi kewajaran, sunatullah, dan bahkan suatu rahmat.

Paham Islam moderat dapat merujuk pada cara yang dilakukan para Walisongo dalam menyebarkan Islam di nusantara. Sikap tawassuth (moderat) berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama.<sup>2</sup> Sikap inilah yang dijalani Walisongo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Indonesia sehingga mendapatkan keberhasilan seperti sekarang. Berdasarkan fakta sejarah, dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, Islam sebagai agama baru

---

<sup>1</sup> Lestari, S. (2016). Ketika paham radikal masuk ke ruang kelas madrasah. BBC News Indonesia. Diperoleh pada 26 Desember 2017 dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160519\\_indonesia\\_la\\_ps\\_us\\_radikalisme\\_anakmuda\\_madrasah](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_la_ps_us_radikalisme_anakmuda_madrasah)

<sup>2</sup> Cholid, N. (2017). Pendidikan Ke-NU-an: Konsepsi Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah. Semarang: Presisi Cipta Media



pada masa itu dapat diterima oleh para bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir Utara (Mas'ud, 2006: 54-58).

Generasi pengusung Islam moderat selanjutnya dapat merujuk pada praktik keberagamaan yang antara lain dilakukan oleh dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ber-Islam dalam konteks Indonesia semacam ini lebih cocok diungkapkan dengan ber-"Islam dalam bingkai keindonesiaan" (Ma'arif, 2009). Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan semangat keindonesiaan.

Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin keberhasilan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seseorang mencapai kesuksesannya dengan memiliki sikap moderat. Rohman (2017: 422) mengesakan bahwa lembaga pendidikan formal merupakan pilar yang sangat strategis untuk mentransfer nilai-nilai toleransi, moderasi, rasa hormat, dan empati serta untuk mengembangkan sikap tanpa kekerasan kepada siswa.

Hal ini mengimplikasikan bahwa kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan selembur ijazah semata, tetapi tidak diimbangi dengan budi pekerti yang luhur. Diperlukan usaha lebih dari lembaga pendidikan, termasuk madrasah ibtidaiyah, untuk menghadirkan metode pembelajaran yang diharapkan mampu mendorong penanaman nilai-nilai Islam moderat.

### **Metode Penulisan**

Pendekatan dan jenis penulisan makalah ini dengan pendekatan pendidikan yang memberikan pemahaman luas khususnya dalam bingkai Bhinneka. Tunggal Ika dengan kajian-kajian agama yang termuat dalam buku jawabul masa'il. Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan paradigma Deskriptif Kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan "Metodologi Kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotetis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu



keutuhan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan, dokumen dll) atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendeteksian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Metode Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa kurikulum madrasah, proses pembelajaran dan lainnya. (J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, 186). Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dari definisi tersebut, maka Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen kegiatan madrasah yang berkaitan dengan sikap moderat santri maupun data-data umum ketatausahaan baik berupa memori, atau catatan penting lainnya.

Dari dua metode tersebut maka, penulis melakukan penerapannya dengan melihat metode pembelajaran yang diberikan oleh madrasah melalui kurikulum yang mereka buat.

## **HASIL**

Salah satu metode yang tepat untuk melihat atau penerapan nilai-nilai islam moderat yaitu dengan melakukan pemilihan metode pembelajaran demokrasi. Pemilihan metode pembelajaran demokrasi di madrasah adalah pilihan yang tepat dan menjadi salah satu kunci guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Metode pembelajaran demokrasi menjadi salah satu tawaran untuk mewujudkan generasi yang memiliki paham Islam moderat karena Islam dipahami sebagai 'moderat' dan 'toleran' serta sesuai dengan bawaan demokrasi (Umar, 2016: 399).

Pelibatan semua peserta didik dengan menekankan cara berfikir kreatif dan kritis dalam mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki merupakan gambaran



metode pembelajaran demokrasi sebagai usaha dalam menumbuhkembangkan kesadaran dalam beragama (Islam) yang moderat. Berdasarkan isu-isu yang dipaparkan di atas, makalah ini mencoba untuk menginvestigasi implementasi konsep penguatan nilai-nilai Islam moderat melalui metode pembelajaran demokrasi yang dilaksanakan di madrasah.

Istilah 'Islam moderat' harus dipahami oleh umat Islam. Bakir & Othman mendefinisikan Islam moderat sebagai indera konseptual 'tengah' dari tindakan keseimbangan seperti pendekatan yang adil dan sederhana dan keadaan tindakan keseimbangan yang nol dari ekstrim dan fanatik dalam setiap aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup> Sementara itu, Yaakub & Othman (2016: 62) menggaris bawahi bahwa kata-kata 'Islam moderat' (wasatiyyah) adalah istilah termonologis yang mewakili kerangka kerja konseptual yang hanya diberikan kepada umat Islam seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah al-Baqarah (2: 143), sebagaimana diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI (2013):

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ummatan wasathan (umat yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

Surah Al-Baqarah Ayat 143 tersebut menunjukkan bahwa terdapat istilah ummatan wasathan. Kata wasath berarti tengah, pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub atau dua ekstrim (kanan dan kiri). Al-Munawwir menyatakan kata wasathan artinya tengah-tengah, sedangkan Sya'bi dalam kamus Al-Qalam mengartikan wasathan sebagai pertengahan (Cholid, 2017: 74). Definisi ini mengindikasikan bahwa ummatan washatan adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, serta orientasi duniawi dan ukhrawi.

Sikap tawasuth yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, termasuk pada madrasah ibtidaiyah, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala



bentuk pendekatan yang bersikap tatharruf (ekstrim) (Nurcholis, 2011: 96). Penerapan sikap tawasuth (dengan berbagai dimensinya) bukan berarti bersifat serba boleh dengan mencampurkan semua unsur (sinkretisme), juga bukan mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan unsur lain. Hal ini sejalan dengan Siddiq, 2005: 62-63) yang menyatakan bahwa prinsip dan karakter tawasuth yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, termasuk lembaga pendidikan, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Kaitannya dengan implementasi nilai-nilai Islam moderat di madrasah, manifestasi prinsip dan karakter moderat harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya. Hal ini mengonfirmasi apa yang dijelaskan oleh Cholid (2017: 76-81) bahwa beberapa prinsip dan karakter moderat (tawasuth) dalam ajaran Islam meliputi 1) moderat dalam bidang aqidah, 2) moderat dalam syariah, 3) moderat dalam bidang tasawuf dan akhlak, 4) moderat dalam bidang pergaulan (mu'asyarah), 5) moderat dalam bidang kehidupan bernegara, dan 6) moderat dalam bidang kebudayaan.

Prinsip dan karakter Islam moderat perlu ditanamkan sejak kepada peserta didik di tingkat madrasah ibtidaiyah agar menjadi generasi masa depan yang berkarakter Islam rahmatan lil 'alamin. Hal ini menyetujui apa yang ditegaskan oleh Wani, Abdullah, & Chang (2015: 653-654) bahwa keragaman adalah kecenderungan yang harus diterima oleh semua manusia. Orang dengan perilaku yang saling bertentangan adalah mereka yang tidak memiliki sikap moderasi, toleransi, akomodasi, dan kerja sama. Selanjutnya, melalui dialog peradaban, orang-orang dari berbagai filosofi dan ideologi dapat mengurangi perbedaan mereka.

## **PEMBAHASAN**

Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan ajar pada proses pembelajaran, baik secara individual atau kelompok. Salamun dalam Sudrajat (2009: 7) menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah



sebuah cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. Hal ini berarti pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran ialah 1) metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, semangat, atau gairah belajar peserta didik, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut, 3) metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mewujudkan hasil karya, 4) metode yang digunakan harus dapat menjadi perkembangan kegiatan kepribadian peserta didik, 5) metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi, dan 6) metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Syarat-syarat ini dapat diterapkan dalam metode pembelajaran demokrasi.

Metode pembelajaran demokrasi menekankan bahwa apa yang harus terjadi ialah bagaimana pola-pola demokrasi dalam proses pembelajaran terlaksana. Dengan kata lain pembelajaran demokrasi adalah pembelajaran yang direncanakan dengan konsep yang memungkinkan praktik dari proses pembelajaran demokratis itu terlaksana, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik seluas-luasnya untuk belajar, berfikir, bekerja, dan membiarkan mereka bergerak membangun keilmuannya, sehingga peserta didik memiliki peluang yang besar untuk belajar memberanikan diri membuka wawasannya. Hal ini konsisten dengan apa yang dijelaskan oleh Rosyada (2004: 19-20) bahwa terpenuhinya mutu pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan setting demokrasi pada peserta didik, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk belajar. Hal ini mengimplikasikan bagaimana menciptakan madrasah menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk semaksimal mungkin mereka belajar.

Lebih lanjut lagi, pembelajaran demokratis adalah pembelajaran yang mengedepankan hal-hal yang bernuansa

---

<sup>3</sup> Sabri, A. (2005). Strategi Belajar Mengajar Madrasahcro Teaching. Jakarta: Quantum Teaching



demokratis yaitu suasana pembelajaran yang saling menghargai adanya kebebasan berpendapat dan mengungkapkan gagasan, serta keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas (Wahid, 2010). Menurut Sugarda Purwakawatja yang dikutip oleh Ramayulis (2006: 333) mengatakan bahwa demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Dengan kata lain, metode pembelajaran demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan peserta didik dengan suasana pembelajaran yang saling menghargai dan memperhatikan semua inisiatif, pemikiran, gagasan, ide, kreativitas, dan karya peserta didik sehingga dapat mengondisikan peserta didik untuk lebih mengenal dan mengungkapkan kehidupannya secara nyata dengan sikap kritis yang dimadrasahlikinya.

Terkait dengan hal itu, kita bisa membuka paradigma berpikir kita bahwasanya tujuan hakiki peserta didik belajar ialah tidak hanya untuk menambah khazanah keilmuan semata, tetapi lebih jauh dari itu, agar mereka mampu merasakan kehidupannya secara nyata dari pengalaman belajar yang telah didapatkannya sehingga pada akhirnya mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya satu saat nanti. Oleh karenanya, seorang guru dituntut benar-benar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang tepat agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini relevan dengan dinyatakan oleh Christopel & Kuntoro (2016: 15) bahwa nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi, khususnya dalam bidang melalui pendidikan, yang diaplikasikan dengan penggunaan metode pembelajaran demokrasi.

Suasana yang demokratis dalam kelas juga akan banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih mewujudkan dan mengembangkan hak atau kemampuannya serta kewajibannya. Suasana yang demokratis dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui hubungan antara guru dengan peserta didik.

Tambahan pula, dalam suasana demokratis tersebut, semua pihak memperoleh penghargaan sesuai dengan potensi dan prestasinya masing-masing sehingga dapat memupuk rasa percaya diri dan dapat berkreasi sesuai dengan kemampuannya tersebut.



Dalam pembelajaran, peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar yang diibaratkan seperti halnya botol kosong yang siap untuk diisi apapun, bukan pula seperti halnya kertas putih yang siap ditulisi apapun oleh gurunya.

Akan tetapi, dengan posisinya sebagai subjek belajar maka posisi guru hanya sebatas fasilitator dengan memaksimalkan peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini mengafirmasi apa yang dipaparkan oleh Taniredja & Abduh (2016: 331) bahwa guru atau dosen perlu menerapkan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran di dalam kelas dengan memainkan peran sebagai fasilitator atau role model kepada peserta didik sehingga dapat memberikan teladan yang baik. Hal ini mendemonstrasikan bahwa metode pembelajaran demokratis menjadi sangat urgen untuk mengawal tumbuh kembangnya seluruh potensi yang dimiliki peserta didik sebagai subjek belajar yang hakiki.

Setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut *schemata*, yaitu: sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses *asimadrasah* (proses menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan proses *akomodasi* (proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Husamah (2016: 81) menegaskan bahwa dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal ini mendemonstrasikan bahwa perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.

Lebih lanjut, Husamah (2016: 82) menjelaskan bahwa anak usia madrasah dasar setingkat madrasah berada pada tahapan operasional konkret. Pada rentang usia madrasah dasar tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku-perilaku belajar diantaranya: 1) mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, 2) mulai berpikir secara operasional, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, 4)



membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan- aturan, prinsip ilmu sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, dan 5) memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat.

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia madrasah dasar memiliki tiga karakteristik, yaitu: konkret, integratif, dan hierarkis. Karakteristik pertama mengilustrasikan bahwa proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret; dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, hasil belajarnya menjadi lebih bermakna dan bernilai sebab peserta didik dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri kedua memaparkan bahwa usia anak madrasah memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan.

Mereka belum mampu memahami masalah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni dari hal umum menuju hal yang lebih khusus (bagian-bagian). Sementara itu, karakteristik ketiga menunjukkan cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, cakupan keluasan serta kedalaman materi (Husamah, 2016: 83-87).

Berdasarkan hal di atas, sebagai upaya untuk keluar dari pembelajaran yang bersifat membelenggu menuju pada pembelajaran yang membebaskan atau demokratis dibutuhkan keterbukaan dan sikap lapang dada dari guru untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik guna mengekspresikan gagasan dan pikirannya.

Dalam pembelajaran demokratis ini, tidak ada subjek yang membebaskan atau objek yang dibebaskan karena tidak ada dikototomi antara subjek dan objek. Pendidik dan peserta didik sama-sama sebagai subjek dan objek sekaligus. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya memungkinkan untuk saling take and give (menerima dan memberi).

Metode pembelajaran yang demokratis tidak bertujuan menciptakan manusia siap kerja, tetapi membentuk manusia matang



dan berwatak yang siap belajar terus, siap menciptakan lapangan kerja dan siap mengadakan transformasi sosial karena sudah lebih dahulu mengalami transformasi diri lewat pendidikan. Pendidikan yang demokratis merupakan sebuah karya pembentukan manusia merdeka yang human, matang, berbudaya, dan bertanggung jawab sehingga wajib dikelola oleh birokrat pendidikan yang demokratis, human, matang serta memiliki compassion dan passion pada manusia muda. Hal ini mengonfirmasi pendapat Rosyid (2006: 103) yang memaparkan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya pembelajaran demokratis ialah: 1) peserta didik mampu melaksanakan pola belajar demokratis, 2) menjadikan belajar demokratis sebagai strategi baru sekaligus mentradisikannya dalam proses pembelajaran bagi pendidik ataupun calon pendidik, dan 3) menemukan berbagai konsepsi yang serba baru dalam mensosialisasikan pembelajaran demokratis.

Deskripsi di atas mengilustrasikan bahwa metode pembelajaran demokratis tidak hanya untuk menyiapkan peserta didik bagi kehidupan mereka nanti di masyarakat, melainkan madrasah juga harus menjadi masyarakat madrasahni, tempat praktik demokrasi, sesuatu yang ada dalam bangunan masyarakat perlu diadakan secara nyata di madrasah.

Dengan demikian, peserta didik dibiasakan dengan karakteristik kehidupan yang demokratis. Untuk mewujudkan terciptanya metode pembelajaran demokratis, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, hindari indoktrinasi. Biarkan peserta didik aktif dalam bertanya, bersikap kritis terhadap apa yang dipelajarinya, dan mengungkapkan alternatif pandangannya yang berbeda dengan gurunya. Kedua, hindari paham bahwa hanya ada satu nilai saja yang benar. Guru tidak berpandangan bahwa apa yang disampaikannya adalah yang paling benar. Seharusnya sikap yang dikembangkan adalah memberi peluang yang cukup lapang akan hadirnya gagasan alternatif dan kreatif terhadap penyelesaian suatu persoalan. Ketiga, berikan anak kebebasan untuk berbicara. Peserta didik mesti dibiasakan untuk berbicara. Peserta didik dibiasakan dalam konteks penyampaian gagasan serta proses membangun dan meneguhkan sebuah pengertian harus diberi ruang yang seluas-luasnya. Keempat, berikan peluang bahwa peserta didik boleh berbuat salah. Kesalahan merupakan bagian penting dalam pemahaman. Guru dan peserta didik menelusuri bersama di mana



terjadi kesalahan dan membantu meletakkannya dalam kerangka yang benar. Kelima, kembangkan cara berfikir ilmiah dan berfikir kritis. Dengan ini peserta didik diarahkan untuk tidak selalu mengiyakan apa yang telah dia terima, melainkan dapat memahami sebuah pengertian dan memahami mengapa harus demikian. Keenam, berikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk bermimpi dan berfantasi. Kesempatan bermimpi dan berfantasi bagi peserta didik menjadikan dirinya memiliki waktu untuk berandai-andai tentang sesuatu yang menjadi keinginannya. Sehingga peserta didik dapat mencari inspirasi untuk mewujudkan rasa ingin tahunya (Departemen Pendidikan Nasional, 2006: 17- 18).

Berdasarkan beberapa langkah di atas, ada beberapa metode yang akan mendukung terlaksananya pembelajaran yang demokratis di madrasah supaya peserta didik tidak terbelenggu dan lebih aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Metode pertama ialah diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para peserta didik. Metode ini mempunyai beberapa manfaat yang bisa diambil, antara lain: a) suasana kelas lebih hidup karena peserta didik mengarahkan perhatian atau pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan, b) menaikkan prestasi kepribadian individu seperti, toleransi, berfikir kritis, demokratis, sistematis, sabar dan sebagainya, c) simpulan hasil diskusi mudah dipahami peserta didik karena mereka mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan, dan d) tidak terjebak ke dalam pikiran individu yang kadang-kadang salah, penuh prasangka, dan sempit. Dengan diskusi, seseorang dapat mempertimbangkan alasan-alasan/pikiran-pikiran orang lain (Arief, 2002: 148- 149). Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya metode diskusi, peserta didik bisa menjadi lebih mandiri dalam memecahkan suatu permasalahan dan lebih bisa menghargai pendapat orang lain sehingga akan tertanam sikap demokratis dari diri peserta didik sejak dini.

Metode kedua ialah tanya jawab. Metode ini memungkinkan terjadinya two-way communication (komunikasi dua arah) karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik; guru bertanya peserta didik menjawab atau peserta didik bertanya guru menjawab. Metode tanya jawab memiliki beberapa tujuan yang dapat dicapai, antara lain: a) mengecek dan mengetahui sampai sejauh



mana materi pelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik, b) merangsang peserta didik berfikir, c) memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan masalah yang belum dipahami, d) memotivasi peserta didik untuk menimbulkan sikap kompetisi dalam belajar dan e) melatih peserta didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran orisinal (Majid, 2008: 210). Hal ini mendemonstrasikan bahwa dengan adanya penerapan metode tanya jawab, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk langsung bisa menanyakan hal yang belum dipahaminya. Dengan demikian, peserta didik merasa bahwa semua dianggap sama dihadapan gurunya, karena guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk menanyakan masing-masing hal yang belum diketahuinya. Metode ketiga ialah kerja kelompok. Metode ini mengandung pengertian bahwa peserta didik dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (subbag kelompok) (Majid 2008: 211).

Metode kerja kelompok memadrasahliki beberapa keuntungan, antara lain: 1) melatih dan menumbuh rasa kebersamaan, toleransi dalam sikap dan perbuatan, 2) menumbuhkan rasa ingin maju dan mendorong anggota kelompok untuk tampil sebagai kelompok yang terbaik, dan (3) timbul rasa kesetiakawanan sosial antara kelompok yang dilandasi motivasi kerja sama untuk kepentingan dan kebaikan bersama (Arief, 2002: 112). Hal ini melukiskan bahwa dengan adanya penerapan metode kerja kelompok, peserta didik akan merasa memadrasahliki sifat toleransi tinggi, saling tolong-menolong dalam memecahkan masalah pada kelompoknya, dan saling menghargai pendapat antar satu kelompok untuk dapat menemukan suatu simpulan.

Metode keempat ialah simulasi. Metode ini dapat dijadikan sebagai bekal bagi peserta didik dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Penggunaan metode simulasi juga memiliki keuntungan, antara lain: 1) mengembangkan kreativitas peserta didik, 2) dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri peserta didik, dan 3) memperkaya pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis (Majid, 2008: 207-208). Penerapan metode simulasi diharapkan dapat menjadikan peserta didik lebih berani



untuk maju dan tampil dalam melakukan suatu keterampilan tertentu seperti dalam mensimulasikan gerakan thawaf pada materi haji dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Adanya pembelajaran demokratis, pendidik tidak sekedar memberikan informasi, memberikan tes dan kemudian memberikan nilai, tetapi pendidik berusaha memahami apa yang dipikirkan dan dipahami oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Zamroni (2001: 189) bahwa di samping memahami materi, pendidik juga berusaha memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri peserta didik, serta mengembangkan hubungan yang akrab dengan mereka sehingga dapat menciptakan suasana di mana peserta didik berusaha mencapai prestasi secara optimal.

Prinsip belajar anak didik aktif dalam metode pembelajaran demokratis ini lebih memberikan tekanan pada kegiatan peserta didik yang disebut sebagai pengajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered) sangat ditonjolkan (Djamarah & Zain, 2003: 84-85). Metode pembelajaran demokratis memandang bahwa anak didik memadrasahliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya secara langsung, baik dengan tindakan maupun dengan gerakan, selama mereka tidak melanggar kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Hal ini konsisten dengan apa yang dinyatakan oleh Khalifah & Quthub (2009: 55) bahwa dalam metode pembelajaran demokratis, semua peserta didik berhak dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kebosanannya, kemarahannya, atau ketidaksenangannya terhadap materi pelajaran. Kebebasan berekspresi ini dianggap sebagai jamanan untuk kebaikan perilaku dan kedisiplinannya di bawah naungan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh kelompok mereka sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan kondisi seperti itu, anak didik dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk meningkatkan kemandirian belajar sehingga akan menjadi anak didik yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam belajar yang tidak selalu menggantungkan kepada pengajar, tetapi dengan selalu berlatih. Tambahan lagi, Khalifah & Quthub (2009: 334) mendeskripsikan bahwa metode pembelajaran demokratis memiliki beberapa prinsip dalam pendidikan, prinsip-prinsip demokrasi tersebut antara lain: 1) kebebasan dalam menuangkan ilmu, 2) penghormatan terhadap manusia, 3) persamaan, 4) keadilan hukum



dan 5) musyawarah mufakat. Penerapan prinsip-prinsip pendidikan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang dan proses yang berkelanjutan. Dengan demadrasahkian, prinsip-prinsip itu ketika sudah diturunkan dalam konsep yang lebih sederhana cenderung dapat berubah sesuai tuntunan dan perkembangan. Oleh karenanya, harus dipahamadrasah bahwa konsep demokrasi tidak dapat dirumuskan sekali untuk selama-lamanya sebab nilai-nilai itu tumbuh dalam proses yang berkelanjutan.

Menariknya, implemementasi dari metode pembelajaran demokratis memiliki beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain: 1) hubungan komunikatif antara pendidik dengan peserta didik yang berimbas pada kemudahan pemahaman dalam pembelajaran. Dengan hubungan yang sealur (komunikatif) dalam proses pembelajaran antara guru dengan peserta didik maka kekhawatiran munculnya akses negatif imbas dari aktifitas pembelajaran dapat diantisipasi sedini mungkin, masalahnya munculnya persepsi, komunikasi, dan akses negatif lainnya terutama hubungannya dengan karakter pendidik dan peserta didik yang bernuansa negatif; 2) penanaman nilai silaturrahim karena hubungan yang linier. Dengan terkondisinya nuansa silaturrahim antara guru dan peserta didik maka harapan ideal menuju terwujudnya pembelajaran demokratis sedikit terbuka jika dibandingkan dengan terciptanya hubungan yang tidak harmonis, tidak linier, dan konfrontatif, mengingat konsepsi silaturrahim adalah konsepsi islamadrasah yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pelaksanaan pendidikan.

Karena dengan silaturrahim menipiskan angan-angan negatif, kecurigaan, dan persepsi lainnya yang menggajal proses pendidikan, hlm itu telah diantisipasi dengan adanya jalinan; 3) terjadinya nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah dapat terbentuk jika hubungan komunikatif antara pendidik dan penanaman nilai silaturrahim telah menjadi bagian dari kehidupannya bahkan menjadi aktifitas riil (Rosyid, 2006: 164-165).

## **KESIMPULAN**

Tulisan ini menyoroti penguatan nilai-nilai Islam moderat yang diinternalisasikan dengan metode pembelajaran demokrasi di madrasah cukup mendesak untuk diimplementasikan di dalam kelas, setidaknya didasarkan pada:



1. Bahwa prinsip Islam sebagai agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan dan ketenteraman bagi semua makhluknya. Tidak ada satupun ajaran di dalamnya yang mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain. Kalaupun ada, itu adalah bagian kecil dari salah satu upaya pemecahan masalah yang dilakukan umatnya dan bukan ajarannya. Kitab suci Al-Qur'an dan Hadits diyakini oleh umat Islam sebagai sumber utama dalam memecahkan semua persoalan yang ada. Keyakinan ini adakalanya bisa menjadi obat penenang dan bisa juga menjadi alasan untuk merugikan pihak lain, semua itu bergantung dari umatnya dalam memahi teks kitab suci ataupun sunah Nabi.
2. Pemahaman agama yang radikal akan menimbulkan masalah sehingga pemahaman agama yang moderat sangat penting untuk menangkal radikalisme. Agama harus memberikan penguatan terhadap masalah yang ada baik politik, kebangsaan, dan kenegaraan.
3. Kompleksnya kehidupan yang dihadapi peserta didik setelah lulus menuntut mereka mampu menyesuaikan diri. Prinsip belajar yang relevan adalah belajar untuk bagaimana belajar (learning how to learn). Hal ini berarti bahwa di kelas, target pembelajaran bukan sekadar penguasaan materi, melainkan peserta didik juga harus mampu belajar bagaimana belajar memecahkan masalahnya. Ini bisa terjadi apabila dalam kegiatan pembelajaran peserta didik telah dibiasakan untuk berpikir sendiri, berani berpendapat, dan berani bereksperimen. Keempat, kenyataan bahwa pendidik atau guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Dalam era globalisasi informasi sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa akses terhadap berbagi sumber informasi menjadi begitu luas dan mudah bahkan murah, seperti halnya televisi, radio, buku, koran, majalah, dan internet.

Saat berada di kelas, peserta didik telah memiliki seperangkat pengalaman, pengetahuan dan informasi. Semua ini sesuai dengan bahan pelajaran, tetapi bisa juga berseberangan. Metode pembelajaran demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan instruksional yang ditetapkan. Tanpa demokrasi di kelas, guru akan menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Peserta didik terkekang dan pada akhirnya, potensi kreativitas peserta didik menjadi statis. Kelima, dalam



konteks metode pembelajaran demokrasi, sebagai bagian dari anggota masyarakat, peserta didik hendaknya sejak dini telah dibiasakan bersikap demokratis bebas berpendapat, tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Ini bisa dimulai di kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang menekankan adanya sikap demokrasi. Dengan demikian maka penguatan penanaman nilai-nilai moderasi islam secara umum adalah suatu proses berupa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memelihara, melatih, membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan pengetahuan keagamaan, kecakapan sosial, dan praktek serta sikap keagamaan anak (aqidah/tauhid, ibadah dan akhlak) yang memiliki ciri-ciri tawassuth, tawazun, dan ta'adul atau bisa disatukan menjadi wasathiyyah (keseimbangan antara dua hal yang berbeda), selanjutnya untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun penanaman nilai-nilai agama yang harus ditanamkan kepada siswa meliputi: 1) Nilai keimanan, 2) Nilai ibadah, dan 3) Nilai akhlak, ada beberapa dasar dalam pendidikan akhlak yang perlu diterapkan, diantaranya adalah<sup>23</sup> a) Menanamkan kepercayaan pada jiwa anak, yang mencakup percaya pada diri sendiri, percaya pada orang lain terutama dengan pendidikannya, dan percaya bahwa manusia bertanggungjawab atas perbuatan dan perilakunya. Ia juga mempunyai cita-cita dan semangat, b) Menanamkan rasa cinta dan kasih terhadap sesama, anggota keluarga, dan orang lain, c) Menyadarkan anak bahwa nilai-nilai akhlak muncul dari dalam diri manusia, dan bukan berasal dari peraturan dan undang-undang. Karena akhlak adalah nilai-nilai yang membedakan manusia dari binatang. d) Menanamkan perasaan peka pada anakanak. Caranya adalah membangkitkan perasaan anak terhadap sisi kemanusiaannya, e) Membudayakan akhlak pada anak-anak sehingga akan menjadi kebiasaan dan watak pada diri mereka

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, A. (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pers.
- Bakir, M., & Othman, K. (2017). A Conceptual Analysis of Wasatiyyah (Islamadrasahc Moderation-IM) from Islamadrasahc Knowledge Management (IKM) Perspective. *Revelation and Science*, 7(1), 21-31.



- Cholid, N. (2017). Pendidikan Ke-NU-an: Konsepsi Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah. Semarang: Presisi Cipta Media.
- Christopel, & Kuntoro, S. A. (2016). Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Metode Inquiri Pada Pembelajaran Pkn Di Sma Negeri 1 Gamping Sleman. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 3(1), 14-26.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Teropong Pendidikan Kita*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional.
- Husamah. (2016). *Belajar dan Pembelajaran*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Mushaf An-Nahdilah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Hati Mas.
- Khalifah, M., & Quthub, U. (2009). *Menjadi Guru yang Dirindu*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Lestari, S. (2016). Ketika paham radikal masuk ke ruang kelas madrasah. *BBC News Indonesia*. Diperoleh pada 26 Desember 2017 dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160519\\_indonesia\\_laps\\_us\\_radikalisme\\_anakmuda\\_madrasah](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_laps_us_radikalisme_anakmuda_madrasah)
- Ma'arif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Madrasahzan.
- Majid, A. (2008). *Perencanaan Pembelajaran dalam Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Madrasahftahuddin. (2010). Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Mozaik: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4338>
- Nurcholis. (2011). *Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Nahdlatul Ulama*. Tulungagung: PC NU Kabupaten Tulungagung.
- Rosyid, M. (2006). *Strategi Pembelajaran Demokratis*. Semarang: Unnes Press
- Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rohman, A. 2017. *Pesantren as a Basis for Internalization of*



Pluralistic Values for Preparing Democratic Citizens in a Diverse Society. *Walisongo: Jurnal Makalah Sosial Keagamaan*, 25(2), 419-442.

<https://doi.org/10.21580/ws.25.2.1324>

Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta:

Kencana. Sabri, A. (2005). *Strategi Belajar Mengajar Madrasah*. Jakarta: Quantum Teaching.

Siddiq, A. (2005). *Khitah Nahdliyah (Cet.III)*. Surabaya: Khalista-LTNU.

*Penguatan Nilai-nilai Islam Moderat Melalui Pembelajaran Demokrasi di  
Madrasah*  
**Zannatun Na'imah**





## KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

NONI WITISMA

### Abstrak

sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah* ini. Artinya, sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemeritahan yang lain, seperti monarchi (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, Undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan, maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukumhukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

**Kata Kunci : Khilafah, Hizbut Tahrir**

### PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.<sup>1</sup>Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004,hlm. 8-9.



tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.<sup>2</sup>

Sistem *khilafah* adalah sistem pemerintahan khas yaitu pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi.<sup>3</sup>

Untuk menerapkan sistem *khilafah*, menurut Hizbut Tahrir tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan (angkat senjata), namun dengan cara damai dengan memberikan pendidikan politik kepada umat Islam tentang perlunya sistem *khilafah*. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan operasional guna menerapkan sistem *khilafah*. *Pertama*, tahapan *tatsqif*, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang paham dengan sistem *khilafah* serta fikrah Islamiyah guna membentuk kerangka gerakan. *Kedua*, tahapan *tafa'ul ma'al ummah*, yaitu tahap berinteraksi dengan masyarakat agar masyarakat turut memikul kewajiban menerapkan *khilafah*, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Ketiga*, tahapan *istilami hukm*, yaitu tahap pengambilalihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia.<sup>4</sup>

Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas, tentunya sebuah wacana yang menarik. Terlebih lagi Hizbut Tahrir mengidealkan praktik Rasulullah dan *al-Khulafa' al-Rasyidun* kembali dihidupkan dalam konteks kehidupan modern. Namun sejauh mana konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ini

---

<sup>2</sup> Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 16.

<sup>3</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, hal. 72-76

<sup>4</sup> Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 56- 57.



lebih rasional dan dapat diterima lebih dari pemikir sebelumnya atau pemikir kontemporer termasuk dengan konsep Barat modern, hal inilah yang menjadi obyek makalah ini.

## KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

### 1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah Islamiyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953.<sup>5</sup>

Sejak di dirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina, doktor lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina.<sup>6</sup> Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zalum hingga wafat 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha' Abu Rastah secara internasional.<sup>7</sup>

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.<sup>8</sup> Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih

---

<sup>5</sup> Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm 4.

<sup>6</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 359.

<sup>7</sup> Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 265-266

<sup>8</sup> Ihsan Samarah, *op.cit.*, hlm. 5-6.



banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah *ghazw al-fikr* (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.<sup>9</sup>

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu: *Pertama*, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kaderkader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. *Kedua*, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a alummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.<sup>10</sup>

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah*. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam *daulah Islam*, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.<sup>11</sup>

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara,

---

<sup>9</sup> Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 23.

<sup>10</sup> Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 57-73.

<sup>11</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenai Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 20.



Tunisia, , Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, termasuk Indonesia, meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi.<sup>12</sup>

## 2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan *sivitas academica* IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah adalah alumni dan dosen IPB.<sup>13</sup>

Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.<sup>14</sup> HTI dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian seksama.

Hizbut Tahrir maupun HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini karena menurut HTI dalam

---

<sup>12</sup> John L. Esposito, (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 126.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua DPD I HTI Jawa Tengah, di Banyumanik Semarang,

Jam 19.30-21.00 WIB, tanggal 12 Mei 2008.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua DPD I HTI Jawa Tengah, di Banyumanik Semarang, Jam 19.30-21.00 WIB, tanggal 12 Mei 2008.



situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian seksama.

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena ini, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* atau kekhalifahan Islam.

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya. Khalifah ini yang wajib melakukan dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (*ghazw al-fikr*), melaksanakan syari'at, memimpin jihad dan melindungi umat Islam. Dakwah merupakan satusatunya untuk meraih keberhasilan mendirikan *khilafah* ini.

Meski demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan *khilafah* itu. Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah. Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan. Namun demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan Hizbut Tahrir lebih banyak melontarkan ide/wacana, dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dipandang pro Barat.



### **Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir**

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan politiknya, bahwa:

... Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *khilafah* ... Sistem *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia ....

*Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.<sup>15</sup>

*Khilafah* merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem *khilafah* sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan *monarchi*, republik, kekaisaran ataupun federasi.

Sistem *khilafah* merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah populer saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dari aspek landasannya maupun substansisubstansinya ataupun yang lain, sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir menyerupai.

### **Analisis terhadap Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir**

*Khilafah Islamiyah* selalu menjadi topik pembicaraan menarik untuk diperbincangkan, baik oleh kelompok yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun golongan yang berpandangan sekuler.

---

<sup>15</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000 hlm. 18.



Munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan; 'apakah kerasullan Muhammad s.a.w. mempunyai kaitan dengan masalah politik'; atau 'apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik kenegaraan atau pemerintahan', dan 'apakah sistem dan bentuk pemerintahan Islam harus selalu berbentuk *khilafah*, atau boleh menggunakan sistem lain disesuaikan dengan kondisi zaman?'

Munculnya permasalahan tersebut wajar karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang (*qawanin*) yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat. Sebuah analisis politik yang dilakukan oleh Alan Samson tentang keterpaduan agama dan politik seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir, merefleksikan hubungan formal antara Islam dan negara. Karenanya, Islam dianggap agama yang memiliki penjelasan paling lengkap tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batasan antara agama dan politik sebagaimana tidak ada batasan nilai-nilai religi dan nilai-nilai nasionalisme. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menyepakatinya.<sup>16</sup>

Keyakinan sebagian tokoh-tokoh Islam tanah air masa lalu bahwa Islam mencakup sistem kepercayaan dan politik serta ada hubungan langsung antara Islam dan negara, menurut Fachry Ali merupakan cikal bakal lahirnya Islam politik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-organisasi dan para politisi Islam. Perkembangan Islam politik sendiri di kalangan tokoh-tokoh Islam adalah suatu hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik membutuhkan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonial

---

<sup>16</sup> Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 95.



dan dominasi Barat. Atau sebagai hasil dari faktor-faktor internal, yaitu dalam bentuk 'perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antara kekuatan-kekuatan politik dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi, baik secara ekonomi maupun secara kultural.<sup>17</sup>

Hizbut Tahrir maupun HTI, dengan konsep *khilafahnya*, rupanya menggunakan pendekatan idealistik ini. Hizbut Tahrir mengklaim bahwa kekhilafahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Negara-negara lain merupakan bagian dari negara *khilafah*. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Dengan sistem kekhilafahan dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam bentuk kolonialisme fisik maupun non fisik. Persoalannya, apakah negaranegara yang berpenduduk mayoritas Islam yang ada saat ini yang sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara nasional) rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara *khilafah*. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI memang mengakui bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhilafahan. Kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an, apalagi melihat kondisi sekarang di mana persatuan umat Islam kian rapuh.

Menurut penulis, idealisme Hizbut Tahrir untuk menghidupkan kembali kekhilafahan ini tampaknya dipicu oleh kenyataan kontekstual di mana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit.

Hizbut Tahrir sangat menjunjung tinggi model kekhilafahan klasik sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan Islam, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai tujuan ini, Hizbut Tahrir menyusun konstitusi yang merinci sistem politik,

---

<sup>17</sup> Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 96



ekonomi, politik luar negeri, pendidikan, dan sosial bagi sistem khilafah..

Sebagai kelompok yang sangat menghormati pemimpinnya, Hizbut Tahrir selalu mengikuti pendapat pemimpinnya, khususnya Taqiyuddin al- Nabhani yang merupakan aktivis politik Islam yang memiliki semangat tinggi untuk membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat. Dengan semangat anti dominasi Barat, Hizbut Tahrir membangun idealisasi politik Islam dengan menentang realitas politik yang berkembang saat ini yang cenderung berkiblat ke pola Barat. Lebih dari itu, menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum.

Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi bahwa konsep *khilafah* yang digagas Hizbut Tahrir merupakan konsep ideal dalam formalasi politik Islam. Namun terlepas dari setuju atau tidak terhadap konsep *khilafah* tersebut, melihat realitas politik yang ada sekarang ini, maka konsep tersebut akan sulit diwujudkan.

## KESIMPULAN

Konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah* ini. Artinya, sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemeritahan yang lain, seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, Undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan, maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan



wujud negara. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukumhukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Abdelwahab el-Afendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, terj. Amiruddin al-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002
- John L. Esposito, (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004,
- Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Negara Islam*, terj. Umar Faruq, dkk., Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000



Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah

Wawancara dengan Abdullah, Ketua DPD I HTI Jawa Tengah, di Banyumanik Semarang, Jam 19.30-21.00 WIB, tanggal 12 Mei 2008